



Rencana Strategis 2015-2019

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air



Kata Pengantar



Mudjadi

Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015), yang telah disesuaikan dengan Nawacita (visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden) sebagai agenda prioritas nasional. Selanjutnya, agenda tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Peraturan Menteri PUPR No. 13.1/PRT/M/2015), memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PUPR.

Mengacu pada hal tersebut diatas, selanjutnya disusun dan ditetapkan Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2015-2019, dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terjadi begitu cepat, antara lain:

- a. Adanya disparitas antar-wilayah, tuntutan peningkatan daya saing global, kualitas hidup manusia, dan kemandirian ekonomi.
- b. Perubahan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan SDA sebagai tindak lanjut Keputusan MK terkait UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- c. Target kinerja yang meningkat 3 kali lipat.
- d. Perubahan struktur organisasi, baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.
- e. Restrukturisasi program dan kegiatan mengacu pada Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) yang diselaraskan dengan perubahan struktur organisasi dalam rangka pencapaian target kinerja oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.



Tantangan pembangunan ke depan menuntut perencanaan yang lebih sistematis berbasis wilayah sungai dengan memperhatikan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah pengembangan strategis (WPS), sebagai kerangka kerja dalam rangka pencapaian target kinerja yang berorientasi pada impact (sasaran strategis), outcome (sasaran program), dan output (sasaran kegiatan).

Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2015-2019 merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam menyusun perencanaan dan pemograman (RENJA-K/L) dan penganggaran (RKA-K/L), serta perjanjian kinerja dan evaluasi kinerja (PK dan LAKIP).

Dengan izin Allah SWT serta kerjasama dan dukungan seluruh jajaran Direktorat Jenderal SDA dan seluruh pihak, besar harapan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam rangka mewujudkan Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Jakarta, 31 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


MUDJIADI




**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 23/7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7393 006, Fax. 7206285

Jakarta, 31 Desember 2015

Kepada yang terhormat :

1. Para Direktur dan Kepala Pusat;
2. Para Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai;
3. Para Kepala SNVT/SKPD-TP OP;

di

Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Perihal : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2015-2019

SURAT EDARAN

Nomor: 21/SE/D/2015

A. Umum

Dalam rangka menjabarkan rencana strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019, perlu disusun rencana strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2015 – 2019 dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dengan cepat. Perubahan dimaksud menuntut perencanaan yang lebih sistematis sebagai kerangka kerja dalam rangka pencapaian target kinerja yang berorientasi pada sasaran strategis (*impact*), sasaran program (*outcome*), dan sasaran kegiatan (*output*).

Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); dan
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007).

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam menyusun rencana pembangunan tahunan maupun rencana pembangunan jangka menengah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2015 – 2019.

Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

Surat Edaran ini ditujukan sebagai pengendali penyelenggaraan penyusunan program, rencana kegiatan, sasaran program (*outcome*), dan sasaran kegiatan (*output*) pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2015 – 2019.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini menetapkan Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2015 – 2019 yang meliputi:

1. kondisi umum yang memuat tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
2. kondisi dan tantangan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
3. kebijakan dan strategi penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air;
4. program dan kegiatan serta sasaran program (*outcome*) dan sasaran kegiatan (*output*) target capaian; dan
5. skenario pendanaan sebagai acuan perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi penyelenggaraan sumber daya air.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

E. Ketentuan Lain-lain

1. Dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan rencana strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, pimpinan puncak pada setiap Unit Kerja yang meliputi Sekretaris Direktorat Jenderal, Para Direktur, Para Kepala Pusat, dan Para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air segera melakukan penyusunan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis sesuai dengan bidang tugasnya dan atau wilayah kerjanya.

Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

2. Koordinasi pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan oleh Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air.
3. Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air menyampaikan laporan hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan rencana strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2015 – 2019 kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

F. Penutup

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR



MUDJIADI



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
4. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.

Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
SURAT EDARAN	iv
DAFTAR ISI	02
DAFTAR GAMBAR	04
DAFTAR TABEL	05
DAFTAR LAMPIRAN	05
DAFTAR SINGKATAN	05
BAB 1 PENDAHULUAN	06
1.1. KONDISI UMUM	08
1.1.1. Peningkatan Dukungan Ketahanan Air	09
1.1.2. Peningkatan Dukungan Kedaulatan Pangan	15
1.1.3. Peningkatan Dukungan Kedaulatan Energi	16
1.1.4. Peningkatan Keberlanjutan Fungsi Infrastruktur SDA	17
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	18
1.2.1. Potensi	18
1.2.2. Permasalahan	20
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	32
2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL	34
2.2. VISI DAN MISI KEMENTERIAN PUPR	34



2.3. PENJABARAN VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PUPR KE DALAM TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL SDA	36
---	----

2.4. SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN PROGRAM	37
--	----

BAB 3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI 42

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	44
---	----

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PUPR	47
---	----

3.3. ARAH KEBIJAKAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SDA	50
--	----

3.4. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDA PER PULAU	52
--	----

3.5. ARAH KEBIJAKAN DUKUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN	53
--	----

3.6. ARAH KEBIJAKAN DUKUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN SEKTOR LAINNYA	54
---	----

3.7. STRATEGI OPERASIONAL	54
---------------------------	----

3.7.1. Strategi Operasional Konservasi SDA	54
--	----

3.7.2. Strategi Operasional Pendayagunaan SDA	55
---	----

3.7.3. Strategi Operasional Pengendalian Daya Rusak	58
---	----

3.7.4. Strategi Operasional Peningkatan Keterpaduan Tata Kelola SDA	59
---	----

3.7.5. Strategi Operasional Operasi Dan Pemeliharaan	62
--	----

3.8. DUKUNGAN INTERNAL PROCESS	62
--------------------------------	----

3.9. OPERASIONALISASI STRATEGI KE DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN	63
--	----

3.10. KERANGKA REGULASI	70
-------------------------	----

3.11. KERANGKA KELEMBAGAAN	71
----------------------------	----

Daftar Isi

BAB 4	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN⁶⁶	78
4.1.	PROGRAM DAN KEGIATAN	80
4.2.	TARGET KINERJA	81
4.3.	KERANGKA PENDANAAN	81

Daftar Gambar

Gambar 1	Idle Capacity Penyediaan Air Baku hingga Desember 2013	12
Gambar 2	Kapasitas Tampung per Kapita Beberapa Negara di Dunia	12
Gambar 3	Daerah Irigasi yang Airnya Bersumber dari Waduk	13
Gambar 4	Pengembangan PLTA Berpotensi Menurunkan Emisi CO ₂	16
Gambar 5	Biaya Operasi Pembangkit Rata-rata/kWh per Jenis Pembangkit (Rp/kWh) Tahun 2012	17
Gambar 6	Ketersediaan Air Baku di Indonesia	18
Gambar 7	Kontribusi Ketersediaan Air Permukaan Pada Kepulauan (%)	18
Gambar 8	Potensi Tenaga Air yang Dapat Dikembangkan (dalam MW)	19
Gambar 9	Kondisi Irigasi Permukaan di Indonesia	21
Gambar 10	Peta Strategi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	38
Gambar 11	Tahapan Pembangunan Nasional	45
Gambar 12	Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019	46
Gambar 13	Konsepsi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)	49
Gambar 14	Sebaran 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)	50



Gambar 15 Zonasi Pengembangan Sumber Daya Air

53

Gambar 16 Prosedur Perijinan Pengusahaan Atas Air

61

Daftar Tabel

Tabel 1 Kebutuhan Investasi Sarana Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2034

20

Tabel 2 Capaian Renstra 2005-2009 dan Renstra 2010-2014

26

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Daftar Kegiatan, Output, Outcome,
dan Satuannya

Lampiran 2 : Sasaran Strategis, Sasaran Program dan
Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air 2015-2019

Lampiran 3 : Rencana Pencapaian Sasaran Strategis
dan Sasaran Program Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air 2015-2019

Lampiran 4 : Matriks Kinerja Dan Pendanaan Renstra
Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2015 - 2019

Lampiran 5 : Daftar Daerah Tertinggal Renstra
Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2015 - 2019

Lampiran 6 : Daftar Kawasan Perbatasan
Ditjen Sumber Daya Air Tahun 2015 - 2019

Lampiran 7 : Destinasi Pariwisata Nasional

Daftar Singkatan

ADIK : Arsitektur dan Informasi Kinerja

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BBWS : Balai Besar Wilayah Sungai

BWS : Balai Wilayah Sungai

DAK : Dana Alokasi Khusus

DOISP : Dam Operational Improvement / Safety

LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

PHLN : Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

PHLN : Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

PLTA : Pembangkit Listrik Tenaga Air

PLTM : Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro

PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

PUPR : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renja-K/L : Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Renstra : Rencana Strategis

RKA-K/L : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

RKP : Rencana Kerja Pemerintah



BENDUNGAN JATIGEDE

JAWA BARAT

BAB 1

Pendahuluan



1.1. KONDISI UMUM

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Infrastruktur merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi serta peningkatan daya saing di dunia internasional. Pembangunan infrastruktur mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, kualitas lingkungan dan pengembangan wilayah.

Ke depan, tuntutan dan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terjadi begitu cepat, menjadi tantangan pembangunan infrastruktur, antara lain:

- a. Adanya tuntutan peningkatan daya saing global, kualitas hidup manusia, dan kemandirian ekonomi, disparitas antar-wilayah.
- b. Perubahan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan SDA sebagai tindak lanjut Keputusan MK terkait UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- c. Target kinerja yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal SDA meningkat 3 kali lipat.

- d. Perubahan struktur organisasi, baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.
- e. Restrukturisasi program dan kegiatan mengacu pada anggaran berbasis kinerja yang sasaran kinerjanya disusun berdasarkan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) yang diselaraskan dengan perubahan struktur organisasi dalam rangka pencapaian target kinerja oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.

Direktorat Jenderal SDA sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian PUPR, berdasarkan Perpres Nomor 15 tahun 2015 dan Permen PUPR Nomor 15/PRT/M/2015, bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan SDA sesuai dengan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal SDA menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Hingga tahun 2014, telah dilaksanakan berbagai langkah kebijakan, dengan capaian sasaran-sasaran strategis meliputi:

1. Peningkatan dukungan terhadap ketahanan air melalui peningkatan kapasitas tampung; peningkatan layanan air baku; dan peningkatan pengendalian daya rusak air.
2. Peningkatan dukungan kedaulatan pangan melalui peningkatan layanan irigasi.
3. Peningkatan dukungan kedaulatan energi melalui pembangunan bendungan yang berpotensi sebagai sumber energi.

4. Peningkatan keberlanjutan fungsi infrastruktur SDA menjaga melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.

1.1.1. Peningkatan Dukungan Ketahanan Air

Ketahanan air didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan yang berkelanjutan untuk kehidupan serta kemampuan dalam mengurangi resiko yang berkaitan dengan air. Ketahanan air menjadi prioritas utama dan program utama yang merupakan prasyarat bagi tercapainya kedaulatan pangan nasional. Dengan ketahanan air, kualitas hidup masyarakat meningkat, perekonomian menjadi produktif, lingkungan menjadi aman, nyaman dan berkelanjutan, sehingga akhirnya visi mencapai Indonesia sejahtera dapat tercapai.

Hingga tahun 2014, peningkatan dukungan ketahanan air diperkirakan baru mencapai 28,95%, melalui pencapaian 3 (tiga) indikator, yaitu.

- a. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan sehari-hari (66,35%). Angka ini dihitung berdasarkan asumsi bahwa untuk mendukung pencapaian target MDGs 68% pada tahun 2015, dibutuhkan dukungan air baku sebesar 56 m³/detik, sementara hingga tahun 2014 dukungan air baku baru 51,44 m³/detik atau setara dengan pemenuhan sebesar 66,35%.

- b. Peningkatan kapasitas tampung per kapita (2,5%). Angka ini dihitung berdasarkan kapasitas tampung di Indonesia adalah hingga tahun 2014 adalah 12,68 milyar m^3 , atau 50 m^3 per kapita per tahun, dimana angka ini hanya 2,5% dari angka ideal tampungan per kapita di suatu negara (1.975 m^3 per kapita per tahun).
- c. Peningkatan layanan infrastruktur pengendali daya rusak air (18%). Angka ini dihitung berdasarkan capaian hingga tahun 2014 sudah dibangun 1.447 km prasarana pengendali banjir atau melindungi sekitar 36.199 Ha (LAKIP 2014) atau sekitar 18% dari 200 ribu hektar yang harus dilindungi.

A. PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BAKU UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI

Dalam upaya meningkatkan layanan air baku bagi kebutuhan rumah tangga, industri, dan perkotaan, sampai dengan saat ini telah dibangun jaringan air baku dengan kapasitas layanan 51,44 m^3 /detik, yang belum memenuhi target kapasitas yang direncanakan (56 m^3 /detik).

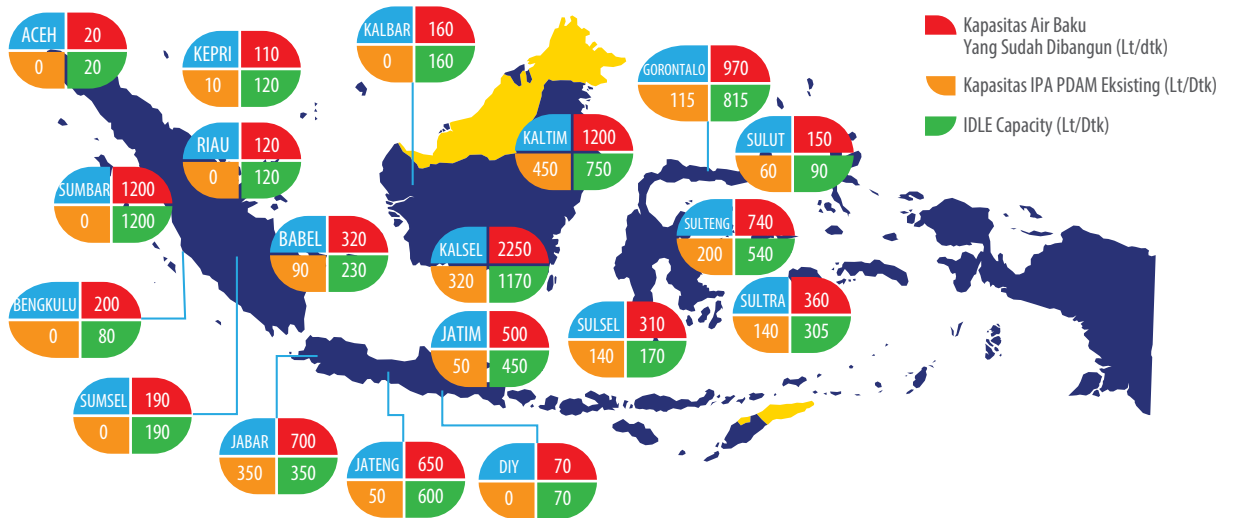
Disisi lain, masih terdapat sekitar 7,04 m^3 /detik kapasitas air baku yang belum dimanfaatkan (*idle capacity*) untuk menjadi air bersih oleh pengelola air bersih/air minum (baru dimanfaatkan sebesar \pm 36,83 m^3 /detik). Hal ini perlu mendapat perhatian pada pengembangan air baku ke depan.





BENDUNGAN JATIGEDE
JAWA BARAT

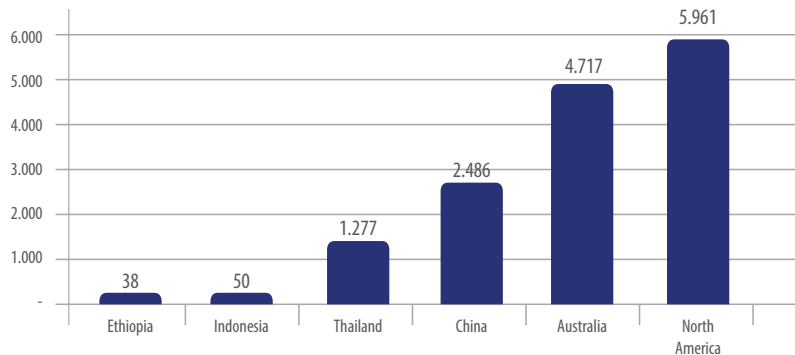
Gambar 1 Sebaran Idle Capacity Penyediaan Air Baku hingga Desember 2013



B. PENINGKATAN KAPASITAS TAMPUNG PER KAPITA

Indonesia memiliki total potensi air sebesar ± 3,9 trilyun m³ per tahun, namun hingga tahun 2014 baru ± 12,68 milyar m³ atau 50 m³ per kapita per tahun yang dapat dikelola melalui tampungan bendungan (melalui 208 bendungan, 178 bendungan diantaranya dikelola

oleh Kementerian PUPR). Angka ini jauh lebih rendah dari Thailand (1.277 m³ / kapita) dan satu tingkat di atas Ethiopia (38 m³/kapita). Hal ini berarti kapasitas tampung di Indonesia masih rawan untukantisipasi kekritisn air dan ketahanan pangan ke depan. Ke depan, dibutuhkan pembangunan tampungan-tampungan baik berupa bendungan maupun embung/situ/bangunan penampung air lainnya.



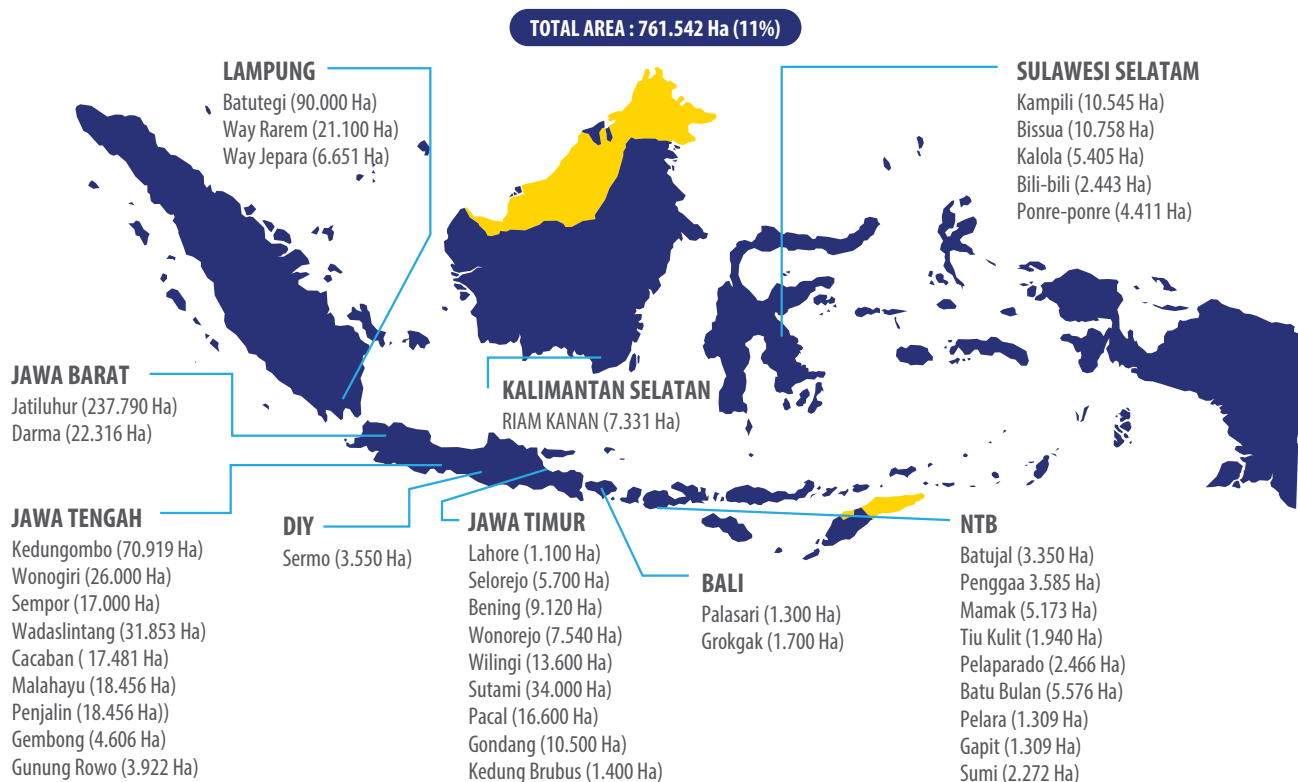
Gambar 2 Kapasitas Tampung per Kapita Beberapa Negara di Dunia

Untuk mendukung ketahanan pangan, kapasitas tampung air yang ada saat ini baru dapat mengairi jaringan irigasi waduk seluas 760 ribu hektar atau sekitar 11% dari luas daerah irigasi yang ada. Areal irigasi yang diairi oleh waduk akan terjamin keandalan tersediaan airnya, sehingga produksi pangan lebih terjamin. Ke depan, hal ini perlu ditingkatkan, sehingga dapat mengantisipasi kekritisn air untuk pangan.

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas tampung sumber-sumber air dalam rangka mendukung

ketahanan air, pada tahun 2010-2014, telah dilaksanakan beberapa upaya diantaranya: pelaksanaan pembangunan 21 waduk, 3 (tiga) diantaranya selesai. Waduk yang selesai dibangun hingga tahun 2014 adalah Waduk Gonggang (2011); Waduk Pandanduri (2014); dan Waduk Jatibarang (2014). Dengan demikian, hingga tahun 2014, total bendungan di Indonesia adalah 208 buah dengan total kapasitas tampung adalah 12,68 milyar m³, yang dimanfaatkan untuk air baku, irigasi, pengendalian banjir, serta sebagian untuk PLTA. Selain itu juga dilakukan rehabilitasi 82 bendungan,

Gambar 3 Daerah Irigasi yang Airnya Bersumber dari Waduk



yang beberapa diantaranya dilaksanakan melalui pendanaan Dam Operational Improvement / Safety Project (DOISP).

Pembangunan tampungan lainnya adalah berupa embung/situ/bangunan penampung air lainnya. Dari 730 buah yang ditargetkan untuk dibangun, tercapai 1.332 buah pembangunan embung/situ/bangunan penampung air lainnya. Ke depan, pembangunan tampungan skala kecil masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk irigasi maupun untuk kebutuhan sehari-hari.

rangka pelestarian sumber daya air, aspek kualitas air juga perlu diperhatikan, dampak dari pencemaran perlu diminimalkan.

Terkait dengan hal tersebut, hingga tahun 2014 telah dilaksanakan:

- a. Pengendalian banjir yang terdiri dari pembangunan (1.450 km) dan rehabilitasi bangunan pengendali banjir (1.100 km).
- b. Pengendalian sedimen dan lahar yang terdiri dari pembangunan (150 buah) dan rehabilitasi bangunan pengendali lahar (140 buah).



BENDUNGAN JATIGEDE
JAWA BARAT

C. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PENGENDALI DAYA RUSAK AIR

Selain mempunyai fungsi yang berdaya guna, sumber daya air juga mempunyai potensi daya rusak dalam bentuk banjir, banjir lahar/sedimen, dan abrasi pantai. Selain itu, dalam

- c. Pengaman pantai yang terdiri dari pembangunan (270 km) dan rehabilitasi bangunan pengaman pantai (20 km).
- d. Pelaksanaan monitoring kualitas air 33 BBWS/BWS, dengan kegiatan meliputi: 1) penentuan lokasi sampel; 2) pengambilan sampel dan pengukuran beberapa

parameter di lapangan, serta pengawetan sampel; 3) analisis sampel di laboratorium; serta 4) analisa data kualitas air. Monitoring kualitas air masih difokuskan pada sungai-sungai utama karena keterbatasan SDM dan pendanaan.

1.1.2. Peningkatan Dukungan Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan (*food sovereignty*) adalah pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hingga tahun 2014, peningkatan dukungan kedaulatan pangan diperkirakan baru mencapai 45,83%, melalui pencapaian indikator peningkatan layanan air baku untuk irigasi. Hingga tahun 2014, sasaran strategis kegiatan irigasi dan rawa yang telah dicapai meliputi:

1. Pembangunan jaringan irigasi permukaan dengan target mengairi 425.000 ha daerah irigasi, telah tercapai bahkan melebihi target, yakni 429.739 ha.
2. Pembangunan jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi air tanah dengan target 237.000 ha, berhasil mencapai 216.406 ha.
3. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan target mengairi 1.700.000 ha daerah irigasi telah berhasil mencapai 2.021.439 ha.
4. Rehabilitasi jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi air tanah dengan target 663.000 ha, dan berhasil melebihi target, yakni mencapai 697.568 ha.

Selain itu, dalam rangka mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi yang menjadi kewenangan kab/kota dan provinsi khususnya pada daerah lumbung pangan nasional (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah) untuk mendukung program kedaulatan pangan nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan salah satu wujud intervensi Pemerintah Pusat terhadap penanganan irigasi kewenangan daerah. Alokasi rata-rata DAK selama ini adalah Rp 13 Milyar per provinsi dan Rp 2,4 Milyar per kabupaten/kota memang teramat kecil bila dibandingkan dengan skala kerusakan infrastruktur irigasi yang terjadi di lapangan, yang mencapai lebih dari 50%.

Dari tahun 2009 hingga tahun 2014, melalui DAK telah ditangani 492.538 hektar daerah irigasi yang rusak, dengan total pendanaan Rp 2,3 Trilyun. Ke depan, pengalokasian DAK akan ditingkatkan. Prioritas pemanfaatan DAK ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 03/PRT/M/2015 adalah:

- Rehabilitasi jaringan irigasi, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan layanan irigasi.
- Peningkatan jaringan irigasi, yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau menambah luas areal pelayanan pada

jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

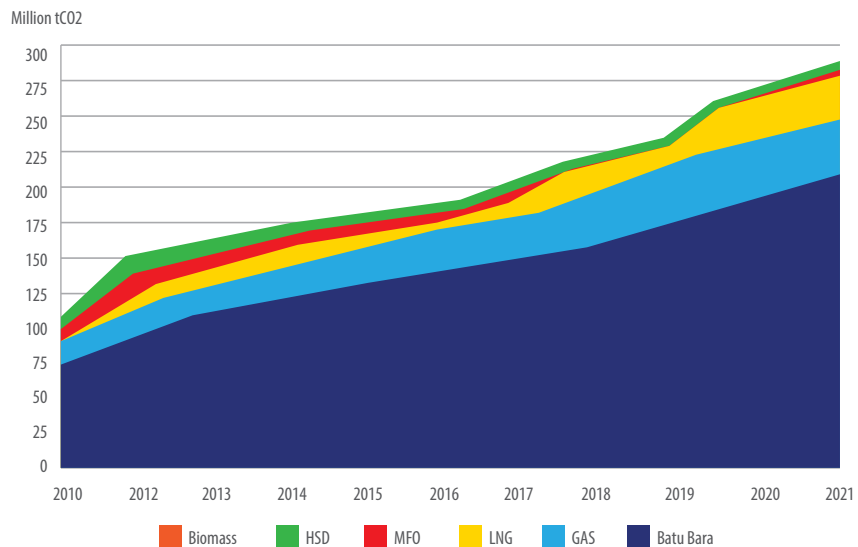
- Pembangunan baru yang selektif, yang bertujuan untuk menyediakan jaringan irigasi baru, bilamana jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota sudah berfungsi dengan baik.

1.1.3. Peningkatan Dukungan Kedaulatan Energi

Pada tahun 2014, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional mencapai 53.065 MW, sekitar 10%-nya (5.059 MW) adalah PLTA¹. Kapasitas terpasang dari PLTA ini adalah 40,7% dari total potensi PLTA yang ada saat ini (12.411,24 MW)².

Dari 208 bendungan yang ada di Indonesia hingga tahun 2014, terdapat potensi sumber energi sekitar 8.653 MW. Dari 208 bendungan tersebut, 178 bendungan adalah milik Kementerian PUPR.

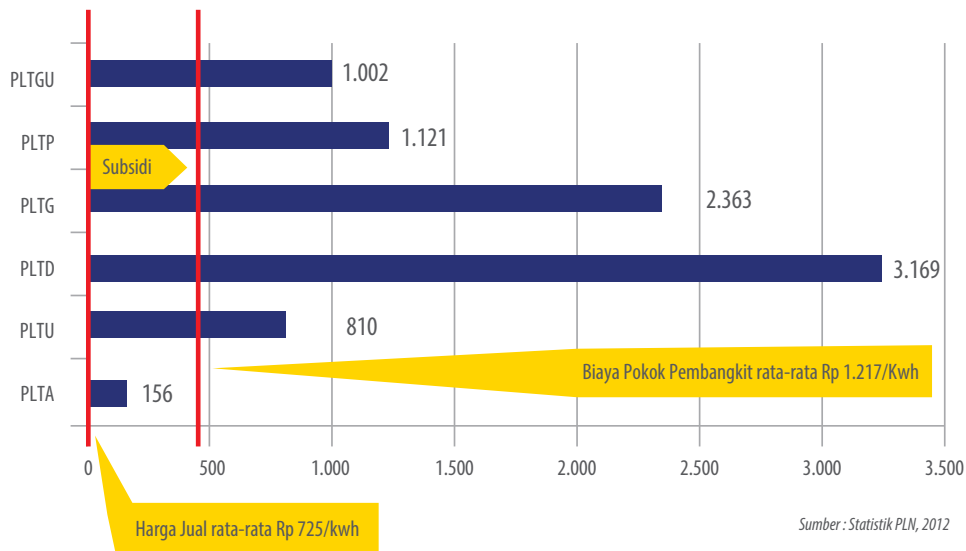
Potensi PLTA yang dimiliki oleh bendungan eksisting dan akan dibangun tersebut merupakan potensi listrik yang cukup besar. Pengembangan PLTA diharapkan dapat menurunkan emisi CO₂ (Gambar 4). Biaya operasi PLTA merupakan biaya operasi terendah dibandingkan biaya pembangkitan lainnya. Percepatan pembangunan PLTA akan menurunkan biaya produksi listrik dan subsidi karena biaya produksi listrik menurun (Gambar 5).



Gambar 4
Pengembangan PLTA Berpotensi Menurunkan Emisi CO₂

¹Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2015-2034, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Draft, 2015)

²Data dari Badan Geologi (2014) sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN RUKN 2015-2034.



Gambar 5
Biaya Operasi Pembangkit Rata-rata/kWh per Jenis Pembangkit (Rp/kWh) Tahun 2012

Namun disisi lain, sebaran potensi PLTA yang besar tersebut tidak sama dengan sebaran kebutuhan. Sebagai contoh, Papua yang memiliki potensi 22.370 MW merupakan sekitar 30% dari total potensi namun kebutuhan listrik di Papua juga sangat kecil, hanya 414 MW di tahun 2027, atau sebesar 0,3 % dari total kebutuhan.

1.1.4. Peningkatan Keberlanjutan Fungsi Infrastruktur SDA

Guna menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur SDA, dilaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) seluruh infrastruktur SDA yang telah dibangun. Hingga tahun 2014, pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan meliputi:

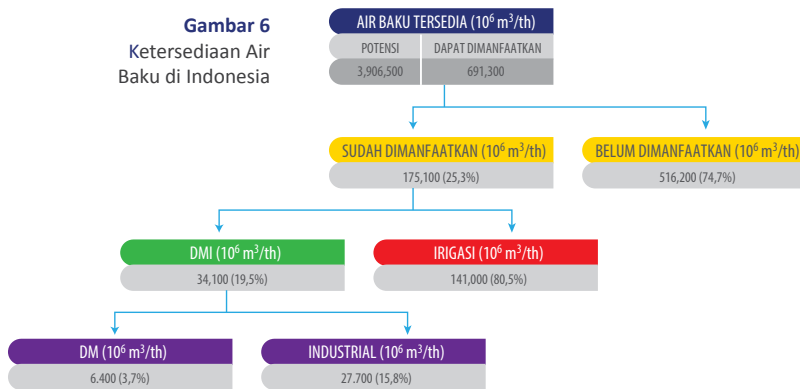
1. OP jaringan irigasi seluas 3.79 juta hektar, yang terdiri dari irigasi permukaan seluas 2,4 juta hektar; irigasi rawa seluas 1,2 juta hektar; irigasi air tanah seluas 43.840 hektar; serta irigasi tambak seluas 155.098 hektar.
2. OP waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya sebanyak 1.207 buah, yang terdiri atas 178 bendungan dan 1.029 embung/situ/bangunan penampung air lainnya.
3. OP sarana dan prasarana air baku dengan kapasitas 47,47 m³/detik.
4. OP sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 2.091,81 km, OP sarana dan prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi sebanyak 293 buah, serta OP sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 142,03 km.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi

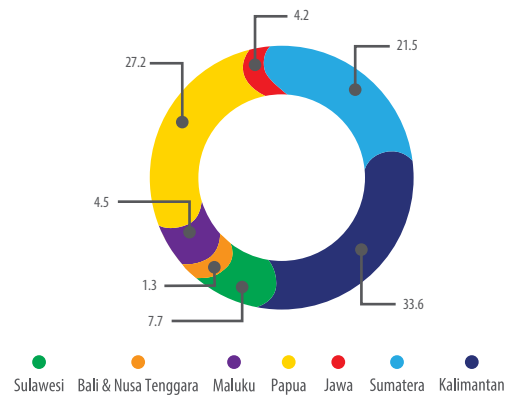
Ketersediaan air di Indonesia mencapai 3,9 trilyun m³/tahun, namun yang dapat dimanfaatkan baru sekitar 691,3 juta m³/tahun (baru sekitar 17,69%). Dari air yang dapat dimanfaatkan tersebut hanya sekitar 25,3% yang sudah termanfaatkan, utamanya sekitar 80,5% untuk memenuhi kebutuhan irigasi, sedangkan sisanya untuk kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada air cukup besar yang belum termanfaatkan.

Gambar 6 Ketersediaan Air Baku di Indonesia



Namun disisi lain, ketersediaan air tersebut juga tidak merata. Pulau Kalimantan merupakan pulau dengan ketersediaan air terbesar (33,6%), sedangkan Pulau Jawa (4,2%) dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki ketersediaan air terkecil setelah Bali dan Nusa Tenggara (7,7%).

Gambar 7 Kontribusi Ketersediaan Air Permukaan pada Kepulauan (%)



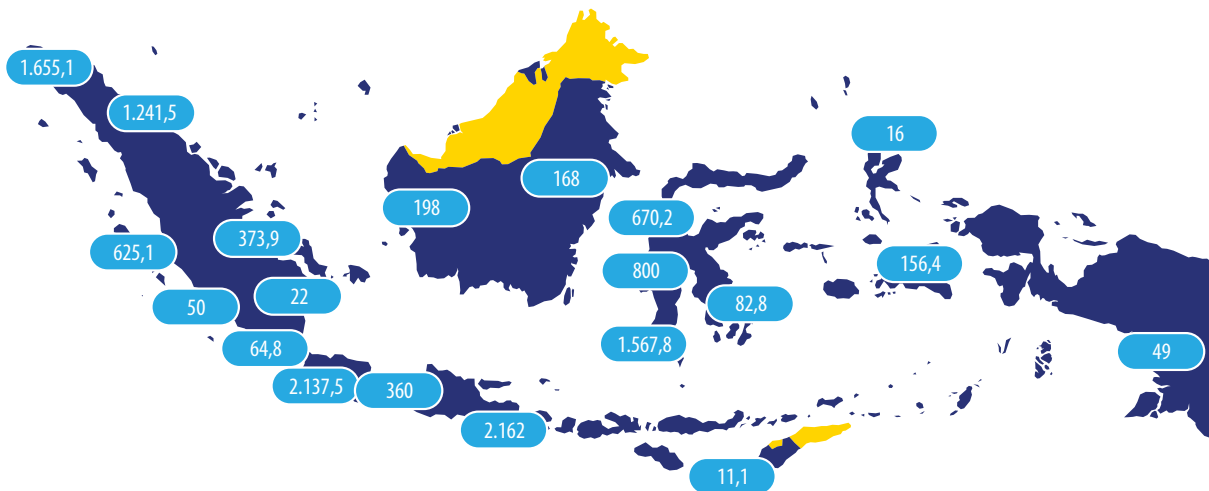
Selain untuk pemanfaatan domestik, perkotaan, dan industri, air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2015-2034, pada tahun 2019 diperkirakan kebutuhan tenaga listrik di Indonesia mencapai 347 TWh dengan konsumsi mencapai 1.293 kWh per kapita. Sementara, hingga 2014, total kapasitas terpasang pembangkit nasional adalah sebesar 53.065 MW, diantaranya adalah sumber energi terbarukan dari sumber daya air, yang meliputi: Pembangkit Listrik Tenaga Air / PLTA (5.059 MW); Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro / PLTM (140 MW), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (30 MW).

Pengembangan bendungan di Indonesia yang dilaksanakan saat ini berpotensi untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Beberapa waduk yang berpotensi dikembangkan PLTA yaitu: Waduk Karian (Kab. Lebak, Banten), Jatigede (Kab. Sumedang,

Jabar), Jatibarang (Kota Semarang, Jateng), Bajulmati (Kab. Banyuwangi, Jatim), Bendo (Kab. Ponorogo, Jatim), Lolak (Kab. Bolmong, Sulut), Kuwil (Kab. Minahasa Utara, Sulut), Karalloe (Kab. Gowa, Sulsel), Tugu (Kab. Trenggalek, Jatim), Titab (Kab. Buleleng, Bali), dan Marangkayu (Kab. Kukar, Kaltim).

Memberamo, Derewo, Ballem, Tuuga, Wiriagar/Sun, Kamundan dan Kladuk dengan total potensi mencapai 12.725 MW. Potensi terbesar lainnya yaitu Kalimantan Timur, meliputi Sungai Kerayan, Mentarang, Tugu, Mahakam, Boh, Sembakung dan Kelai dengan total potensi mencapai 6.743 MW.

Gambar 8 Potensi Tenaga Air yang Dapat Dikembangkan (dalam MW)



Sumber: *Final Report of Project for Master Plan Study of Hydropower Development in Indonesia*, JICA&Nippon Koei, Co. Ltd (2011) sebagai tercantum pada LAMPIRAN RUKN 2015-2034

Potensi sumber energi lainnya dalam bentuk kecil adalah pengembangan PLTMH yang sesuai untuk kawasan pelosok di Indonesia. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Energi Baru Terbarukan (RIPEBAT) 2010-2025 (Kementerian ESDM), terdapat 6 (enam) provinsi yang yang potensi tenaga airnya besar untuk dimanfaatkan menjadi PLTMH, diantaranya Papua, meliputi sungai

Empat provinsi lain yang memiliki potensi adalah Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Aceh³.

Biaya operasional PLTMH relatif lebih murah dibandingkan sumber energi lainnya. Hingga tahun 2034, pengembangan tenaga listrik diperkirakan membutuhkan pendanaan sekitar Rp 325.464 juta USD untuk pembangkit.

³ Sebagaimana diberitakan di <http://economy.okezone.com/> pada 14 Oktober 2010.

Tabel 1 Kebutuhan Investasi Sarana Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2034

dalam USD juta

SARANA	JAWA-BALI	LUAR JAWA-BALI	TOTAL
Pembangkit	189.355,5	136.108,5	325.464,0
Jaringan Transmisi dan Gardu Induk *)	9.646,2	10.916,8	20.563,0
Jaringan Tegangan Menengah, Jaringan Tegangan Rendah dan Gardu Distribusi *)	7.409,9	7.120,1	14.530,0

*) hanya sampai tahun 2024
Sumber: RUKN 2015-2034

1.2.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pengelolaan SDA ke depan, antara lain:

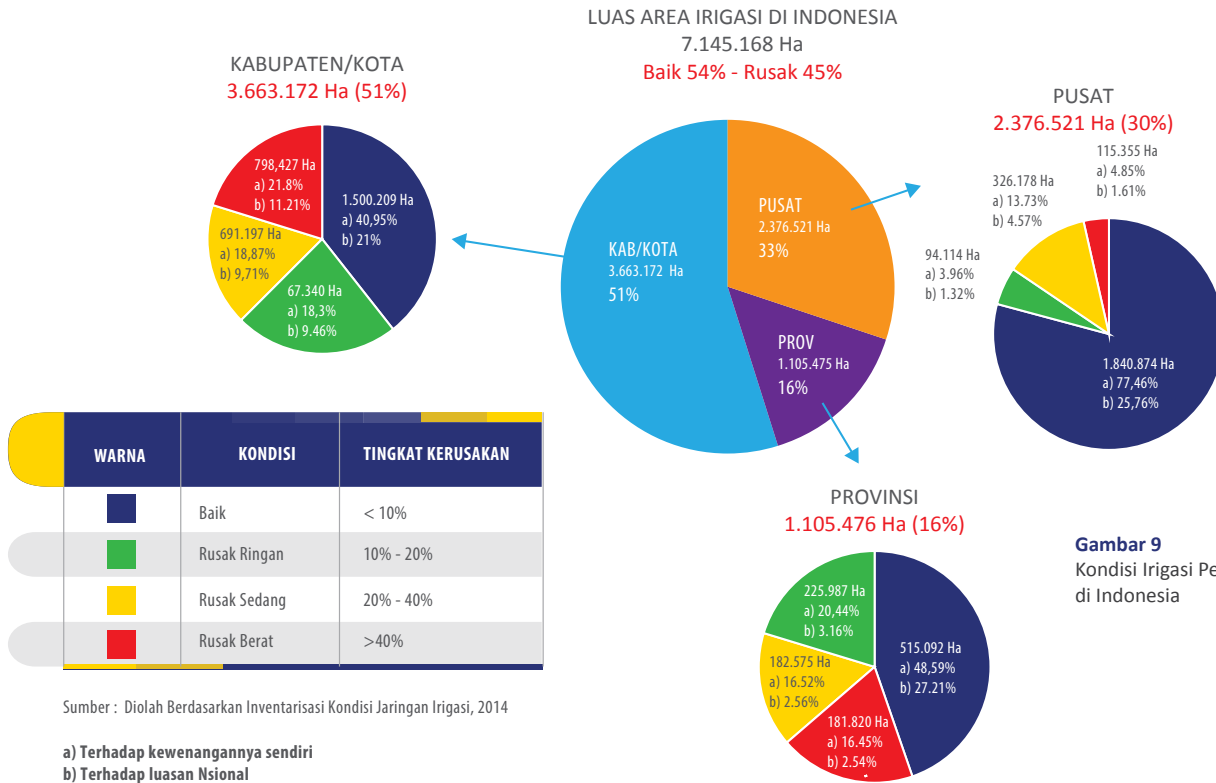
A. KERUSAKAN JARINGAN IRIGASI

Dari 7,15 juta hektar areal irigasi yang telah dibangun, hanya sekitar 11% (\pm 760 Hektar) yang ketersediaan airnya dapat dijamin melalui bendungan, sedangkan sisanya masih mengandalkan debit sungai atau mata air (*free intake*). Sebagian jaringan irigasi tidak berfungsi optimal akibat bencana alam serta belum lengkapnya sistem jaringan irigasi. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi, pada kurun waktu 2006-2013 mencapai 100-110 ribu hektar per tahun⁴. Pengembangan lahan rawa sebagai alternatif lahan irigasi baru masih

terbatas. Di sisi lain, penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi. Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu, partisipasi masyarakat petani dan kinerja kelembagaan pengelolaan irigasi belum optimal.

Luas daerah irigasi di Indonesia sekitar 7,15 juta hektar, dengan 46% diantaranya dalam kondisi rusak. Kerusakan terbesar pada jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah. Lebih dari 50% jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah mengalami kerusakan. Di sisi lain, pembangunan jaringan irigasi baru relatif sulit dilakukan, karena keterbatasan ketersediaan lahan dan petani.

⁴ Sebagaimana diberitakan di <http://psp.pertanian.go.id/> dan <http://bappeda.jatimprov.go.id/>.



Gambar 9
Kondisi Irigasi Permukaan di Indonesia

B. LAYANAN AIR BAKU YANG BELUM OPTIMAL

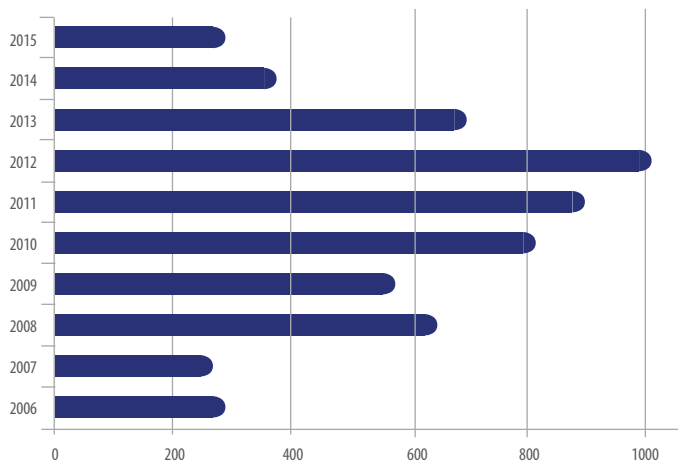
Suplai air baku semakin terbatas akibat menurunnya debit pada sumber-sumber air dan tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air, seperti bendungan, embung, danau, dan situ. Selain itu, kualitas air semakin rendah akibat tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya. Di sisi lain, kebutuhan air baku semakin tinggi akibat

pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri, berkembangnya aktivitas manusia, dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air. Rendahnya ketersediaan prasarana air baku, terutama di perdesaan, daerah terpencil, kawasan perbatasan, kawasan pariwisata, dan pulau-pulau terdepan menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga menyebabkan *land subsidence* dan intrusi air laut.

C. BANJIR DAN KEKERINGAN

Frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai meningkat, akibat kerusakan daerah tangkapan air dan perubahan iklim seperti terjadi pada DAS Ciliwung, Citarum dan Bengawan Solo. Tahun 2006 bencana banjir terjadi sebanyak 319 dan meningkat menjadi 1015 pada tahun 2012. Angka ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2015 kejadian banjir sebanyak 290.

Frekuensi Kejadian Banjir (2006-2015)



Penanganan banjir di kota-kota besar juga masih perlu dioptimalkan, seperti : Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, dll. Banjir di kawasan perkotaan tersebut disebabkan oleh buruknya sistem drainase mikro dan pembuangan sampah di badan sungai. Penambangan bahan mineral yang tidak terkendali di beberapa sungai memicu terjadinya degradasi dasar sungai serta erosi tebing sungai.

Disisi lain, tidak meratanya distribusi dan pola hujan di Indonesia menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan, seperti di Prov. NTT dan NTB. Pada daerah-daerah tersebut perlu dibangun tampungan-tampungan air skala kecil sehingga air dapat tetap ada pada saat musim kemarau.

Alih fungsi lahan, khususnya pada kawasan tangkapan air (hulu) yang menyebabkan kerusakan DAS juga berkontribusi pada kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan yang mengakibatkan banjir dan musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan. Hal lain yang menjadi penyebab bencana ini adalah perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan pola hujan di Indonesia, perubahan suhu permukaan wilayah daratan, kenaikan suhu permukaan laut, kenaikan tinggi muka air laut dan tren kejadian cuaca dan iklim ekstrim. Peningkatan erosi pada daerah hulu yang mengakibatkan sedimentasi di hilir juga menjadi penyebab banjir karena kapasitas sungai di hilir menjadi berkurang.

D. PELAKSANAAN OP YANG BELUM OPTIMAL

Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA antara lain disebabkan oleh: manual OP yang belum seluruhnya tersedia; kurangnya fasilitas OP; kurangnya kesiapan kelembagaan dan personil pelaksana OP; belum seluruhnya pedoman dan Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP) tersedia; dan keterbatasan penganggaran kegiatan OP sesuai dengan AKNOP. Hal ini mengakibatkan belum semua infrastruktur

SDA di-OP secara mantap, menyebabkan umur fungsional infrastruktur tersebut tidak sesuai dengan umur rencana. Kerusakan yang terjadi pun, jika tidak cepat tertangani, menyebabkan kebutuhan akan rehabilitasi meningkat dan hal ini membutuhkan dana yang lebih besar daripada pelaksanaan OP itu sendiri.

E. KETERPADUAN PENGELOLAAN SDA

Pelaksanaan pengelolaan SDA secara terpadu sebagaimana prinsip *Integrated Water Resources Management* (IWRM), belum terlaksana secara optimal. Beberapa isu yang masih harus dihadapi terkait pengelolaan SDA secara terpadu dan menyeluruh, antara lain:

- a. Koordinasi antarinstansi, antarpemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan antarpemilik kepentingan belum optimal akibat pendekatan yang bersifat sektoral dan pembagian urusan/tanggung jawab masih tumpang tindih dan kurang jelas. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, potensi konflik pengelolaan sumber daya air yang secara alamiah berbasis wilayah sungai, dapat terjadi akibat ketersediaan air yang tidak merata antarwilayah administrasi. Wadah-wadah koordinasi dibentuk sebagai upaya mengatasi hal ini, yaitu: Dewan SDA di tingkat Nasional dan provinsi serta Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) di tingkat wilayah sungai. Hingga 2014, sudah terbentuk 30 dewan SDA provinsi, masih 4

provinsi lagi yang belum membentuk dewan SDA (Prov. Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara). Sementara TKPSDA pada WS kewenangan Pusat sudah dibentuk pada 41 WS, masih 23 WS lagi yang belum terbentuk TKPSDA-nya.

- b. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air masih rendah, karena kurangnya pemahaman atas fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari air.
- c. Kelembagaan pengelolaan SDA baik di tingkat Pusat (Direktorat Jenderal SDA, BBWS/BWS), di tingkat daerah (Dinas, Balai Provinsi, Balai Kabupaten), hingga di tingkat unit khusus (PJT, pengelola irigasi, pengelola bendungan), perlu ditata dan diperkuat, untuk mencapai pemisahan fungsi yang jelas dengan tetap menjaga sinergi antarfungsi. Perkuatan ini juga harus didukung dengan SDM yang berkualitas dan kompeten.
- d. Pendanaan yang tidak konsisten dan berkelanjutan menyebabkan ketidakpastian akan pelaksanaan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Keterbatasan pendanaan menuntut adanya penetapan skala prioritas berdasarkan urgensi dan kesiapan pelaksanaan serta terbatasnya pendanaan dari APBN yang memerlukan pembiayaan dari pemegang izin (Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air/BJPSDA).

- e. Pengelolaan data dan informasi SDA, perlu ditingkatkan keakuratannya sehingga dapat menjadi dasar bagi penyusunan rencana pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran.
- f. Pasca pembatalan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2015), pengelolaan SDA kembali mengacu pada UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Praktek pengelolaan sumber daya air yang selama ini mengacu kepada UU No. 7 tahun 2004 perlu segera direview dan diberikan payung hukumnya sementara Rancangan UU pengganti akan disusun, dengan pertimbangan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, lembaga pengelolaan yang sudah ada saat ini harus tetap ada, dan kesepakatan/kontrak dengan pihak ke-3 harus tetap berjalan sampai akhir kontrak. Sehubungan dengan hal tersebut, payung hukum pengelolaan SDA yang kembali mengacu pada UU No. 1 tahun 1974 dilaksanakan dengan dengan mengharmonisasikan dengan UU lain lain yang terkait pengelolaan SDA serta peraturan pelaksanaan UU UU No. 11 tahun 1974 yang telah mengakomodasi isu-isu kekinian sambil melaksanakan penyusunan RUU pengelolaan SDA yang baru. Hingga 2015, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan SDA dan Peraturan Pemerintah No. 122 tentang Penyelenggaraan SPAM; Rakerpres tentang Dewan SDA; Rakerpres tentang Pembentukan Dewan SDA Nasional; serta 21 Peraturan Menteri PUPR.
- g. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA pada masing-masing WS masih perlu percepatan. Hingga tahun 2015, dari 64 WS kewenangan Pusat sudah 44 Pola Pengelolaan SDA WS kewenangan pusat yang ditetapkan oleh Menteri PU, sedangkan sisanya 5 Pola masih dalam proses penetapan dan 12 Pola masih dalam proses perbaikan. Adapun 3 Pola untuk WS yang baru menjadi kewenangan pusat berdasarkan Permen PUPR No.4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan WS masih belum disusun. Sementara Rencana Pengelolaan SDA WS sudah ditetapkan 1 (satu) buah yaitu Rencana PSDA WS Bengawan Solo, sedangkan 6 Rencana masih dalam proses penetapan, 48 Rencana masih dalam proses perbaikan, dan sisanya 9 Rencana masih dalam proses penyusunan termasuk 3 Rencana untuk WS baru.
- h. Adanya keterpaduan dengan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 13.1/PRT/M/2015, telah ditetapkan 35 WPS yang menjadi panduan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR, baik antar Eselon I di lingkungan Kementerian PUPR maupun antar K/L terkait. Dengan adanya keterpaduan pembangunan infrastruktur di dalam 1 (satu) WPS dapat menjadi pengungkit ekonomi yang bersinergi dengan potensi dan kekurangan wilayah tersebut serta selaras dengan kelestarian lingkungan.



DAERAH IRIGASI TOMMO
SULAWESI BARAT

TABEL 2 CAPAIAN RENSTRA 2005-2009
DAN RENSTRA 2010-2014

No	Program/Sasaran Strategis /IKU/Ouput	Satuan	Realisasi Periode Kabinet Indonesia Bersatu I				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
I PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN)							
A Pendayagunaan Air Dalam Rangka Ketahanan Pangan							
1	Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi dan Rawa						
	a. Pembangunan/Peningkatan						
	1 Jaringan irigasi yang terbangun/ditingkatkan	ha	160.601	58.786	116.072	118.520	67.640
	2 Jaringan irigasi air tanah yang terbangun	ha	1.435	1.490	13.88	1.060	2.548
	3 Jaringan rawa yang terbangun/ditingkatkan	ha					
	4 Jaringan tata air tambak yang terbangun/ditingkatkan	ha					
	b. Rehabilitasi						
	1 Jaringan irigasi yang di rehabilitasi	ha	322.278	495.356	265.658	238.609	173.495
	2 Jaringan irigasi air tanah yang di rehabilitasi	ha	2.062	599	2.580	675	3.033
	3 Jaringan rawa yang di rehabilitasi	ha	63.976	110.000	187.388	459.234	194.608
	4 Jaringan tata air tambak yang di rehabilitasi	ha					
	c. Operasi dan Pemeliharaan						
	1 Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	ha	425.216	1.902.936	1.956.302	2.039.336	2.091.528
	2 Jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	ha	2.780	1.987	900	751	3.000
	3 Jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara	ha	207.470	257.856	451.291	365.505	637.954
	4 Jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan dipelihara	ha					

	Total S.D 2009*)	Target RPJMN 2010-2014	Target Review Renstra 2010-2014	Realisasi Periode Kabinet Indonesia Bersatu II				Program 2014
				2010	2011	2012	2013	
				Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	
9	10	11	12	13	14	15	16	
	521.619,32	129.380	425.000	115.000	66.249	94.792	77.741	75.957
	7.921,00	70 sumur /1400 ha	12.000	2.246	3.027	3.467	1.960	3.320
	-	10.000	225.000	8.080	70.509,53	49.043	32.632	42.121
	-	1.000	38.000	1.021	10.706	6.623	6.279	7.077
	1.495.396,00	1.340.000	1.700.000	293.044	284.137	589.443	523.361	331.454
	8.949,00	1.875 sumur /37.500 ha	38.000	8.882	10.790	7.634	8.465	6.360
	1.015.206,00	450.000	625.000	79.373	120.810	194.951	119.073	141.230
	-	175.000	60.000	2.800	7.297	27.945	10.118	34.900
	2.091.528,00	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.143.589	2.164.000	2.278.510	2.479.412
	3.000,00	2.192 sumur /43.840 ha	43.840	9.180	2.733	7.820	12.787	43.840
	637.954,00	1.200.000	1.100.000	1.107.996	1.040.005	1.033.000	1.027.393	1.275.352
	-	-	72.000	550	64.993	19.097	64.792	155.098

No	Program/Sasaran Strategis /IKU/Ouput	Satuan	Realisasi Periode Kabinet Indonesia Bersatu I				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
I PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN)							
B Ketahanan Air (Konservasi dan Penyediaan Air Baku)							
1	Peningkatan Kapasitas Tampung Sumber Air						
a.	Kapasitas Layanan Air Baku						
1	Prasarana dan sarana air baku yang terbangun	m ³ /detik	2,89	0,69	0,99	3,95	4,14
2	Prasarana air baku yang di rehabilitasi	m ³ /detik					
3	Prasarana dan sarana air baku yang di operasikan dan dipelihara	m ³ /detik					
b.	Pembangunan/Peningkatan						
1	Waduk - Selesai dibangun	waduk	-	2	4	3	2
	- Dalam Pelaksanaan	waduk					
2	Embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang dibangun	buah	69	130	121	111	12
c.	Rehabilitasi						
1	Waduk yang di rehabilitasi	waduk					
2	Embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang di rehabilitasi	buah					
d.	Operasi dan Pemeliharaan						
1	Embung/situ/bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	buah	16	9	47	119	54
2	Kawasan sumber air yang dilindungi/dikonservasi	kawasan					

	Total S.D 2009*)	Target RPJMN 2010-2014	Target Review Renstra 2010-2014	Realisasi Periode Kabinet Indonesia Bersatu II				Program 2014
				2010	2011	2012	2013	
				Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	
9	10	11	12	13	14	15	16	
	12,66	43,40	56,00	6,31	8,60	14,94	13,39	8,20
	-	12,30	24,00	3,76	4,74	4,52	15,56	5,54
	-	44,75	44,75	9,88	13,17	15,16	23,61	47,47
	11,00	11	8	-	1	-	1	2
					Gonggang			Jatibarang, Pandanduri
	-	1	21	7	8	9	21	28
	443,00	158	730	32	105	175	509	511
	-	29	91	12	18	13	29	10
	-	289	300	21	41	74	132	74
	119,00	166	1.200	65	298	411	706	1.207
	-	15	36	7	9	10	36	12

No	Program/Sasaran Strategis /IKU/Ouput	Satuan	Realisasi Periode Kabinet Indonesia Bersatu I				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
I PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN)							
C Berkurangnya Luas Kawasan yang Terkena Dampak Banjir							
1	Luas Kawasan yang Terlindungi dari Bahaya Banjir						
a.	Prasarana dan sarana pengendali banjir						
2	Rehabilitasi						
	a) Prasarana Pengendali banjir yang direhabilitasi	km					
	b) Pengendali sedimen/lahar yang direhabilitasi	buah					
	c) Prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi	km					
3	Operasi dan Pemeliharaan						
	a) Prasarana Pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara	km	123,00	225,00	139,28	48,24	163,15
	b) Pengendali sedimen/lahar yang dioperasikan dan dipelihara	buah					
	c) Prasarana pengaman pantai yang dioperasikan dan dipelihara	km					

	Total S.D 2009*)	Target RPJMN 2010-2014	Target Review Renstra 2010-2014	Realisasi Periode Kabinet Indonesia Bersatu II				Program 2014
				2010	2011	2012	2013	
				Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	
9	10	11	12	13	14	15	16	
	-	386	1.100	171,19	143,62	321,84	302,24	192,83
	-	85	140	5	18	49	57	11
	-	50	20	3,00	2,45	4,46	4,87	3,32
	225,00	2.000	2.000	611,00	648,00	1.228,00	1.168,71	2.091,81
	-	150	150	11	5	47	76	293
	-	100	100	10,00	25,35	26,00	62,10	142,03



PANTAI MANSINAM
PAPUA BARAT

BAB 2

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis



2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan seperti apa yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum pada RPJMN 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.”

Visi tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.2. VISI DAN MISI KEMENTERIAN PUPR

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 sebagaimana tercantum pada Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.”

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan

kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Guna mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi, yang harus dapat menjembatani penjabaran visi ke dalam tujuan. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 adalah:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan

2.3. PENJABARAN VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PUPR KE DALAM TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL SDA

Perumahan Rakyat mendukung pencapaian visi kementerian melalui pencapaian misi ke-1, yaitu: *“mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.”*

Untuk mewujudkan visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjabarkan visi Kementerian PUPR tersebut ke dalam tujuan dan sasaran program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya. Penjabaran visi dan misi tersebut juga mempertimbangkan pencapaian pembangunan terkait bidang Sumber Daya Air 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019.

Dari visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dirumuskan tujuan-tujuan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun 2015 – 2019 dalam rangka mendukung upaya pencapaian target dukungan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketahanan air serta keterpaduan pembangunan bidang PUPR dengan pengembangan wilayah, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PUPR sebagaimana yang

tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis.

Tujuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian PUPR untuk pencapaian mencapai sasaran dan tujuan Kementerian PUPR serta sasaran-sasaran Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2015-2019 meliputi:

1. Tujuan 1 : Menyelenggarakan pembangunan Infrastruktur PUPR bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2. Tujuan 2 : Menyelenggarakan keterpaduan tatakelola pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

3. Tujuan 3 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Direktorat Jenderal SDA yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung, pengendalian dan pengawasan, serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bidang sumber daya air yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2.4. SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN PROGRAM

Kementerian PUPR memiliki 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan.
2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi.
3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.

Berdasarkan hal tersebut, sasaran strategis Direktorat Jenderal SDA adalah mewujudkan kehandalan infrastruktur sumber daya air dalam mewujudkan kedaulatan pangan,

ketahanan air, dan kedaulatan energi.

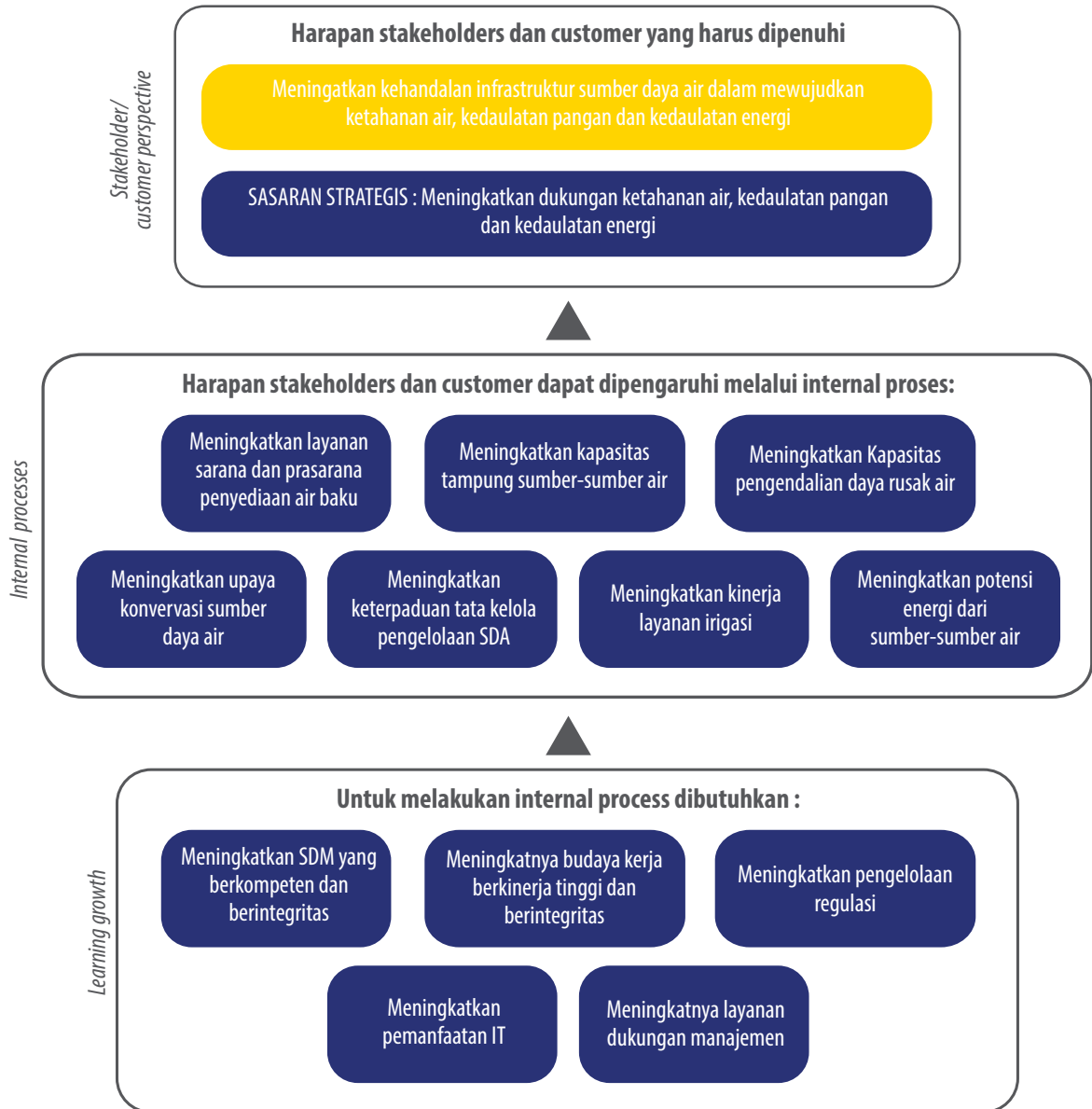
Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal SDA menetapkan sasaran program yang menggambarkan kinerja Direktorat Jenderal SDA yang akan dicapai dalam rangka pencapaian sasaran strategis, meliputi:

1. Meningkatnya kinerja layanan irigasi.
2. Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku.
3. Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air.
4. Meningkatnya potensi energi dari sumber-sumber air.
5. Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak.
6. Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air.
7. Meningkatnya keterpaduan tata kelola sumber daya air.

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran program tersebut dibutuhkan dukungan upaya-upaya internal, seperti:

- Meningkatkan SDM yang berkompeten dan berintegritas.
- Meningkatkan budaya kerja berkinerja tinggi dan berintegritas.
- Meningkatkan pengelolaan regulasi.
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (IT).
- Meningkatkan layanan dukungan manajemen.

Gambar 10 Peta Strategi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air



Tujuan, sasaran strategis, dan sasaran program Direktorat Jenderal SDA sebagaimana di atas memiliki hubungan hirarki yang terkait satu dengan lainnya sebagai berikut:

Tujuan 1 : Menyelenggarakan pembangunan Infrastruktur PUPR bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis program sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, melalui:
 - a. Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku
 - b. Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula
 - c. Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku
- 2) Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air, melalui:

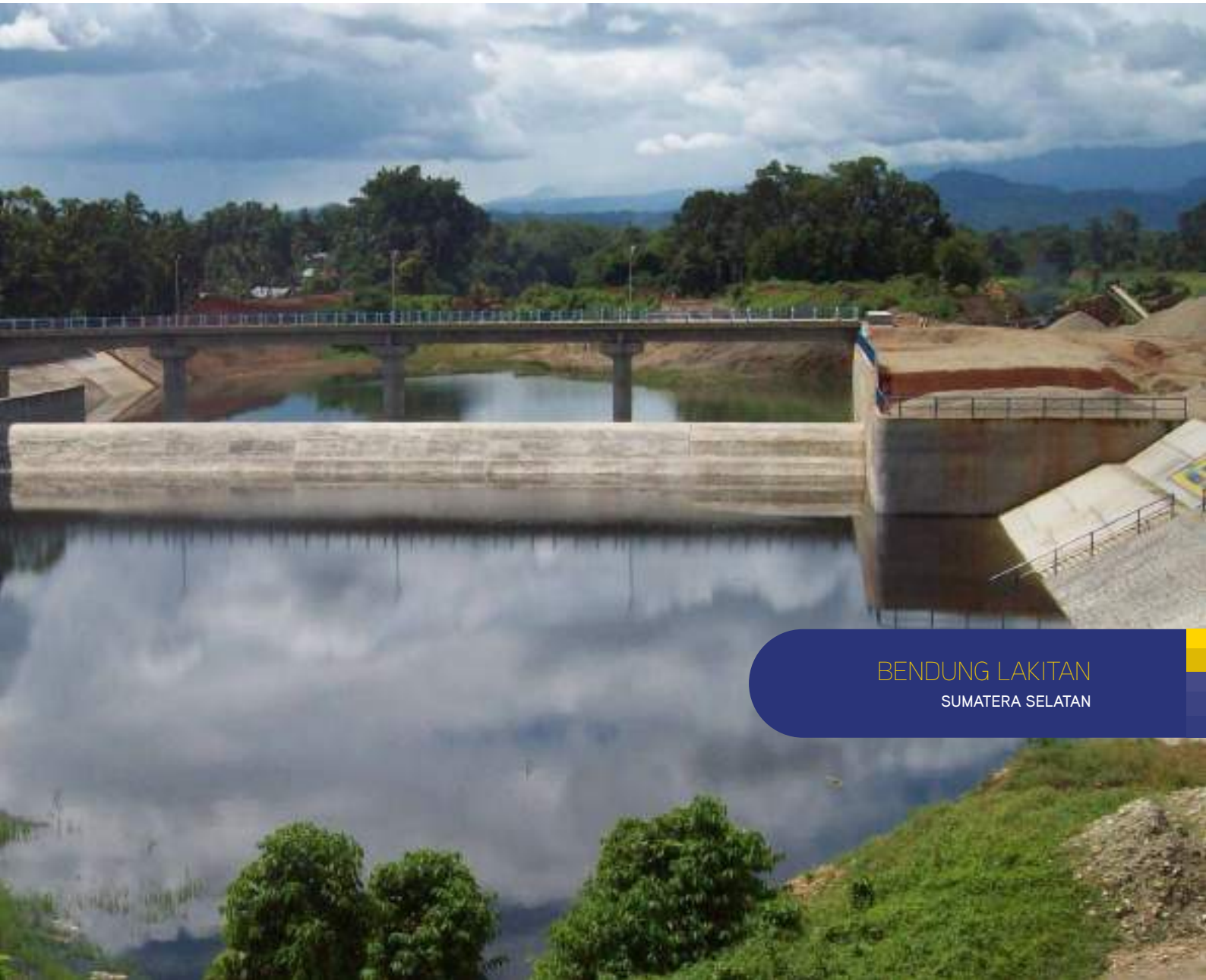
- a. Peningkatan kapasitas tampung sumber air
 - b. Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air
 - c. Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air
- 3) Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air, melalui: peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air
 - 4) Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air, melalui: peningkatan persentase kawasan/ lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas
 - 5) Meningkatnya kinerja layanan irigasi, melalui :
 - a. Peningkatan layanan jaringan irigasi
 - b. Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi
 - c. Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi
 - 6) Meningkatnya potensi energi dari sumber-sumber air, melalui: peningkatan potensi energi sumber air

Tujuan 2 : Menyelenggarakan keterpaduan tatakelola pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah guna menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran program meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA melalui peningkatan indeks RBO (indeks)

Tujuan 3: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Direktorat Jenderal SDA yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung, pengendalian dan pengawasan, serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bidang sumber daya air yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui upaya-upaya internal organisasi Direktorat Jenderal SDA.





BENDUNG LAKITAN
SUMATERA SELATAN



BAB 3

Kebijakan dan Strategi



CIKAPUNDUNG
JAWA BARAT

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam RPJMN. Saat ini, kita telah memasuki tahap ketiga dari 4 (empat) tahap pelaksanaan RPJP Nasional. RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan kepada:

1. Norma Pembangunan, meliputi antara lain:
 - a. membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
 - b. setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang

dapat merusak keseimbangan pembangunan;

- c. aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Dimensi Pembangunan; meliputi:

- a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.
- b. Dimensi pembangunan sektor unggulan. Hal ini meliputi kedaulatan pangan, ketahanan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai modal untuk memenuhi kebutuhannya, agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan ketahanan energi dan ketenagalistrikan, sedangkan potensi kemaritiman dan kelautan harus dapat dimanfaatkan secara optimal. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal pengembangan pariwisata nasional, sedangkan

potensi industri untuk penciptaan nilai tambah.

- c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antar kelompok pendapatan, maupun antar wilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan prioritas pada wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil, meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tatakelola dan reformasi birokrasi.
4. Quickwins, dilakukan agar output pembangunan segera dapat terwujud dan dirasakan hasilnya dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.



Gambar 11
Tahapan Pembangunan Nasional

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Direktorat Jenderal SDA berkontribusi pada cita ke-7, melalui dukungan terhadap kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro: meliputi pembangunan manusia dan masyarakat serta ekonomi makro.
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: meliputi kependudukan dan keluarga berencana; pendidikan; kesehatan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; serta perlindungan anak.
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan: meliputi kedaulatan pangan; ketahanan energi; maritim dan kelautan; pariwisata dan industri manufaktur; serta ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas.
4. Sasaran Dimensi Pemerataan: meliputi penurunan kesenjangan antar kelompok ekonomi; serta peningkatan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu.

Gambar 12 Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019



3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PUPR

Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun perlu lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Disamping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), pembangunan infrastruktur juga ditujukan untuk pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan

pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah. Dengan kata lain pembangunan wilayah perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataannya kawasan yang sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor daripada kawasan yang belum berkembang.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Terkait sasaran strategis Direktorat Jenderal SDA, arah kebijakan Kementerian PUPR adalah untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi

guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi tampungan air dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.

Dalam rangka pencapaian tujuan menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan pariwisata, dan kawasan perdesaan, Kementerian PUPR menyelenggarakan keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah meliputi baik perencanaan, pemrograman maupun pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, Kementerian PUPR menyusun Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yang didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan maritim berdasarkan pada tema atau potensi per pulau, yaitu:

- 1) Pulau Sumatera. Tema besar pengembangan wilayah Pulau Sumatera adalah Pintu Gerbang Perdagangan Internasional; Industri Berbasis Komoditas Kelapa Sawit,

Karet, Timah, Bauksit, & Kaolin; Lumbung Energi Nasional, Termasuk Pengembangan Energi Terbarukan Biomassa; Hilirisasi Komoditas Batu Bara; dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Maritim (Kelautan).

- 2) Pulau Jawa. Tema besar pengembangan wilayah Pulau Jawa adalah Sebagai Lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai Pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan).
- 3) Pulau Papua. Tema besar pada Wilayah Pulau Papua adalah: Percepatan Pengembangan Industri Komoditas Lokal Perkebunan, Peternakan, Kehutanan; Percepatan Pengembangan Ekonomi Kemaritiman; Percepatan Pengembangan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat; Percepatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Alam; Peningkatan Kawasan Konservasi dan Daya Dukung Lingkungan; dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Kampung Masyarakat Adat.
- 4) Pulau Kalimantan. Tema besar pada pengembangan Wilayah Kalimantan adalah: Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia; Salah satu lumbung pangan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, dan karet; dan Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas

batu bara, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon & pasir kuarsa.

- 5) Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Tema Besar pada pengembangan Wilayah Bali adalah: Sebagai lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). Sedangkan tema besar pada pengembangan Wilayah Nusa Tenggara adalah: Pintu gerbang pariwisata ekologis; Pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan Pengembangan industri mangan, dan tembaga.
- 6) Kepulauan Maluku. Tema besar pada pengembangan Wilayah Maluku adalah: Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga; dan Pariwisata bahari.
- 7) Pulau Sulawesi. Tema besar pada pengembangan Wilayah Sulawesi adalah: Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi & gas bumi; Pintu gerbang perdagangan internasional & kawasan timur; Lumbung pangan nasional dengan pengembangan

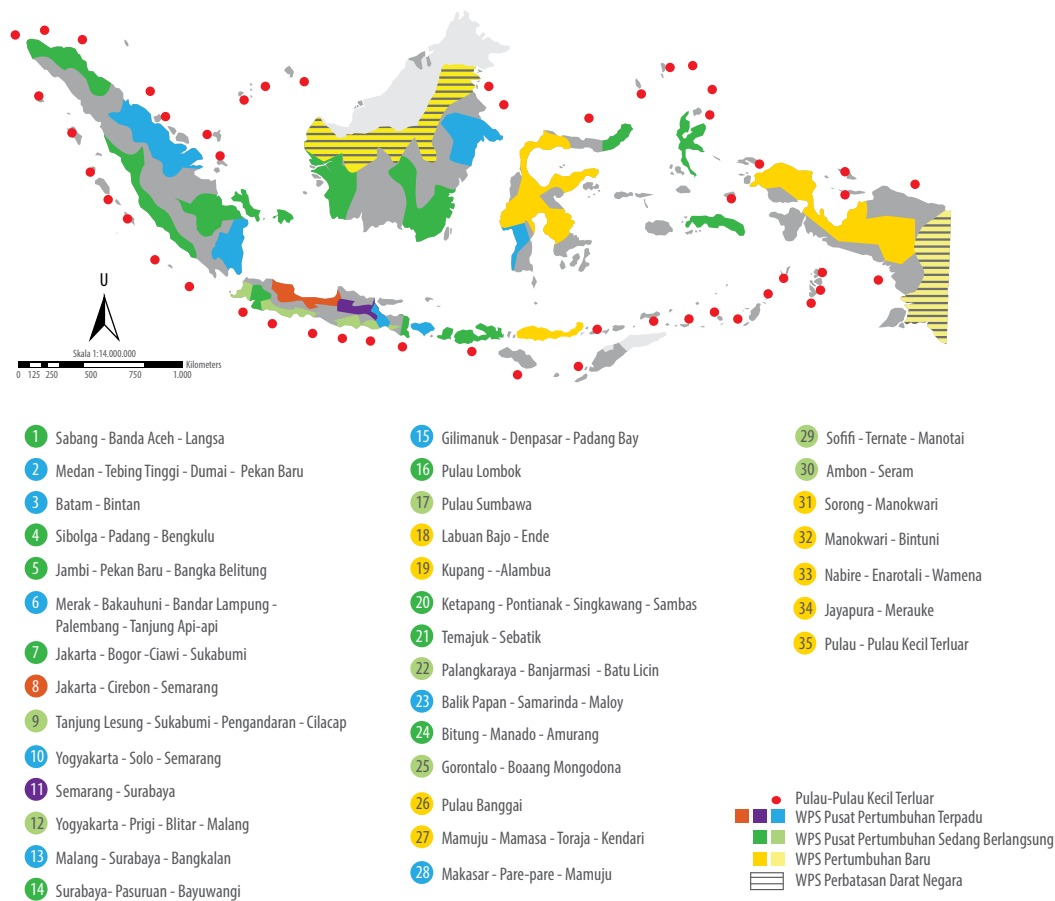
industri kakao, padi, dan jagung; Pengembangan industri berbasis logistik; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan & pariwisata bahari.

Setiap WPS akan dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan atau pariwisata. Terdapat 35 WPS yang direncanakan untuk dikembangkan.

Gambar 13
Konsep Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)



Gambar 14 Sebaran 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)



3.3. ARAH KEBIJAKAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SDA

Arah kebijakan umum Direktorat Jenderal SDA adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply yang berkeadilan
2. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dilaksanakan berbasis wilayah sungai dan didasarkan pada rencana tata pengaturan air dan tata pengairan (pola pengelolaan SDA) dan rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan (rencana pengelolaan SDA), yang

- diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersangkutan.
3. Konservasi sumber air dilaksanakan dalam rangka mencapai keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.
 4. Pengendalian pemanfaatan air tanah seiring dengan peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan, pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.
 5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
 6. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis.
 7. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategis.
 8. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, kawasan permukiman, serta pusat kegiatan ekonomi untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah.
 9. Mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut.
 10. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.
 11. Penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan serta kemungkinan berbagi peran atau role sharing dalam pengelolaan SDA secara terpadu.
 12. Penataan dan penguatan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan dalam rangka pelayanan data dan informasi, baik ke dalam maupun ke luar Direktorat Jenderal SDA.

3.4. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDA PER PULAU

Berdasarkan kondisi ketersediaan air, jumlah dan kepadatan penduduk, kejadian banjir, serta potensi pengembangan irigasi dan tampungan air, kebijakan pengelolaan SDA di masing-masing pulau di Indonesia secara umum diarahkan sebagai berikut:

1. Pulau Sumatera, dengan curah hujan memadai dan ketersediaan air cukup, pengembangan SDA ke depan diarahkan pada pengembangan jaringan irigasi dan rawa, penanganan banjir, serta pengembangan tampungan dengan kapasitas besar (bendungan).
2. Pulau Jawa, dengan ketersediaan air yang rawan, jumlah penduduk yang padat, pengembangan SDA diarahkan pada peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada, penanganan banjir secara menyeluruh dan terpadu, pengembangan tampungan dengan kapasitas besar (bendungan), pengembangan SPAM regional untuk penyediaan air baku untuk air bersih, serta pendekatan demand management.
3. Pulau Kalimantan, dengan ketersediaan air yang cukup, namun dipengaruhi oleh keberadaan rawa (payau) dan kejadian banjir di beberapa lokasi, pengembangan SDA diarahkan pada pengembangan jaringan irigasi dan rawa (secara terbatas), penanganan banjir di lokasi rawan banjir, serta pengembangan SPAM perkotaan.
4. Pulau Sulawesi, dengan ketersediaan air cukup dan kejadian banjir yang mulai meningkat di beberapa lokasi, pengembangan SDA diarahkan pada pengembangan ekstensif jaringan irigasi, penanganan banjir di lokasi rawan banjir, serta pengembangan tampungan besar (bendungan) dan SPAM regional sebagai upaya penyediaan air baku untuk air bersih.
5. Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dengan curah hujan cenderung rendah dan ketersediaan air yang kritis, pengembangan SDA diarahkan pada pengembangan jaringan irigasi secara selektif, serta pengembangan tampungan sederhana (embung) dan pemanfaatan sumur air tanah sebagai alternatif sumber air baku.
6. Pulau Maluku dan Papua, dengan ketersediaan air tinggi, namun kepadatan penduduk rendah, serta potensi irigasi dan rawa terbatas, pengembangan SDA diarahkan pada pengembangan irigasi dan rawa dengan mempertimbangkan ketersediaan petani dan keberlanjutan lingkungan, penanganan banjir di lokasi rawan banjir, serta pengembangan air baku perkotaan dan distrik.

Gambar 15 Zonasi Pengembangan Sumber Daya Air



Dukungan terhadap pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan diarahkan sebagai berikut:

1. Dukungan pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada 122 daerah tertinggal sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 sebagai upaya meminimalkan kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Kedalaman lokus adalah kabupaten.
2. Dukungan yang diberikan pada daerah tertinggal tersebut mengacu pada 3
3. Dukungan pengembangan kawasan perbatasan difokuskan pada kawasan perbatasan dengan 10 negara tetangga sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 (187 lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 pulau terluar). Kedalaman lokus adalah kecamatan perbatasan.
4. Dukungan yang diberikan pada kawasan perbatasan, selain mengacu pada 3 (tiga) pilar utama pengelolaan SDA, yaitu: konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.

3.5. ARAH KEBIJAKAN DUKUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN

3.6. ARAH KEBIJAKAN DUKUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN SEKTOR LAINNYA

pilar utama pengelolaan SDA, juga pada Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Dukungan terhadap sektor lainnya, mencakup sektor pertanian dan agropolitan, perikanan (kemaritiman) pariwisata, dan pengarusutamaan gender diarahkan sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap sektor pertanian dan agropolitan difokuskan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi air tanah.
2. Dukungan terhadap sektor perikanan (kemaritiman) difokuskan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak pada lokasi yang disepakati dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Dukungan terhadap sektor pariwisata difokuskan pada kegiatan penyediaan air baku untuk air bersih dan penanganan banjir pada lokasi 50 Destinasi Pariwisata Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Dukungan terhadap pengarusutamaan gender difokuskan pada penyusunan anggaran berbasis gender untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki isu

kesetaraan gender, termasuk dalam rangka pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

3.7. STRATEGI OPERASIONAL

Dalam rangka mencapai arah kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat Kementerian PUPR sebagaimana disebutkan di atas, strategi operasional Direktorat Jenderal SDA 2015-2019 dibagi atas strategi operasional:

1. Konservasi sumber daya air
2. Pendayagunaan sumber daya air
3. Pengendalian daya rusak air
4. Peningkatan kualitas pengelolaan SDA terpadu, termasuk didalamnya peningkatan peran serta stakeholders dan peningkatan sistem informasi dan data sumber daya air
5. Operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA

3.7.1. Strategi Operasional Konservasi SDA

Konservasi sumber air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan. Strategi pelaksanaan konservasi meliputi konservasi fisik dan non-fisik.

Strategi pelaksanaan konservasi fisik dicapai melalui:

- a. Pembangunan 65 bendungan, yang terdiri dari penyelesaian/lanjutan 16 bendungan dan memulai pembangunan baru 49 bendungan, dengan target 29 bendungan dapat diselesaikan pada periode 2015-2019. Disamping itu juga dibangun \pm 1.186 embung/bangunan penampung air lainnya.
- b. Rehabilitasi/peningkatan 45 bendungan serta 651 embung dan bangunan penampung air lainnya.
- c. Restorasi 42 sungai, revitalisasi 25 danau dan konservasi 34 kawasan rawa.
- d. Pembangunan 180 pengendali sedimen (check dam).
- e. Operasi dan pemeliharaan 229 bendungan dan 1.899 embung/situ/bangunan penampung air lainnya.
- f. Pemeliharaan sungai, danau, mata air, dan sumber-sumber air alami lainnya.
- g. Konservasi air tanah difokuskan pada kawasan yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber air baku.
- h. Mendukung revitalisasi Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 8 Menteri pada 9 Mei 2015, baik dengan kegiatan fisik maupun non-fisik.

Sementara, strategi pelaksanaan konservasi non-fisik dicapai melalui:

- a. Sosialisasi terkait perlunya konservasi kepada masyarakat disekitar sumber air
- b. Peningkatan peran serta masyarakat pada

- c. kegiatan konservasi sumber-sumber air.
- c. Pembinaan Pemerintah Daerah dan dunia usaha terkait kegiatan konservasi sumber-sumber air.
- d. Peningkatan peran wadah koordinasi (Dewan SDA, TKPSDA, Komisi Irigasi, dll) dalam perumusan kebijakan maupun strategi dan pelaksanaan operasionalnya.

3.7.2. Strategi Operasional Pendayagunaan SDA

Pendayagunaan sumber daya air yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat dicapai melalui strategi:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku dari kapasitas 51,44 m³/detik menjadi 118,17 m³/detik atau peningkatan sebesar 67,52 m³/detik.
- b. Rehabilitasi fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku kapasitas sebesar 21,76 m³/detik.
- c. Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air baku kapasitas sebesar 94,75 m³/detik.
- d. Penyediaan air baku diutamakan bersifat regional dengan mempertimbangkan aspek keterpaduan dengan RTRW serta pola dan rencana pengelolaan SDA dan didasarkan

- atas desain yang menyeluruh mulai dari unit air baku, unit produksi, hingga unit distribusi.
- e. Sinkronisasi lokus penyediaan air baku dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, mencakup: 1) Kawasan Strategis Nasional (KSN); 2) kawasan yang rawan air bersih; 3) kawasan perbatasan, pulau terluar, dan pesisir; 4) kawasan perkotaan; 5) kawasan pariwisata prioritas; serta kawasan strategis lainnya.

Untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dicapai melalui strategi:

1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, irigasi rawa, irigasi tambak, dan irigasi air tanah untuk mendukung kedaulatan pangan, yang dilaksanakan melalui:
 - a. Peningkatan suplai irigasi yang dilayani dari bendungan dari 11% (760 ribu hektar) menjadi 12,6% (929 ribu hektar).
 - b. Peningkatan layanan jaringan irigasi seluas 1 juta Ha, yang terdiri dari:
 - 1) jaringan irigasi kewenangan Pusat yang dibangun sepanjang 4.160 Km, jaringan irigasi rawa yang dibangun 2.282 Km, jaringan irigasi tambak sepanjang 158,28 km, jaringan irigasi air tanah 1.967 Km. Total daerah irigasi yang dilayani adalah 471.791 hektar.
 - 2) jaringan irigasi kewenangan Daerah yang dibangun sepanjang 12.323 km. Total daerah irigasi yang dilayani adalah 616.157 hektar.
- c. Pengembalian fungsi dan layanan (rehabilitasi) jaringan irigasi seluas 3 juta Ha, yang terdiri dari:
 - 1) Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat sepanjang 21.289 Km, jaringan irigasi rawa sepanjang 8.093 Km, jaringan irigasi tambak sepanjang 837 Km, jaringan irigasi air tanah sepanjang 3.428 Km). Total daerah irigasi yang dilayani adalah 1,9 juta hektar.
 - 2) Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah sepanjang 21.289 Km. Total daerah irigasi yang dilayani adalah 1,1 juta hektar.
- d. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Daerah dilaksanakan melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- e. Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan, meliputi: jaringan irigasi 3.6 juta Ha (OP Jaringan Irigasi Permukaan 51.312 km, OP Jaringan Irigasi Air Tanah 5.325 km, OP Jaringan Irigasi Rawa 8.872 km, OP Jaringan Irigasi Tambak 988 km).
- f. Pengembangan irigasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Pengembangan irigasi pada masing-masing pulau dibedakan sebagai berikut:

- Pengembangan irigasi di P. Sumatera diarahkan pada peningkatan sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi.
 - Pengembangan irigasi di P. Jawa diarahkan pada rehabilitasi dan modernisasi daerah irigasi yang telah habis umur ekonomisnya. Pada kurun 2015-2019, modernisasi difokuskan pada DI Jatiluhur (Jawa Barat), DI Rentang (Jawa Barat), dan DI Wadas Lintang. Modernisasi irigasi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air, melalui peningkatan keandalan penyediaan air prasarana, pengelolaan irigasi, institusi pengelola, dan sumber daya manusia.
 - Pengembangan irigasi di P. Bali diarahkan pada rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, didukung oleh sistem pengembangan padi SRI.
 - Pengembangan irigasi di P. Nusa Tenggara diarahkan pada irigasi air tanah, didukung oleh pengembangan sumber-sumber air (embung/bendungan).
 - Pengembangan irigasi di P. Kalimantan diarahkan pada pengembangan irigasi rawa, terutama untuk *food estate*.
 - Pengembangan irigasi di P. Maluku diarahkan pada pengembangan irigasi permukaan.
 - Pengembangan irigasi di P. Papua diarahkan pada pengembangan irigasi rawa terutama untuk *food estate*.
- g. Pengembangan irigasi rawa, termasuk untuk *food estate* harus mempertimbangkan tata air rawa dalam rangka pencegahan emisi gas rumah kaca serta mempertimbangkan rencana tata ruang.
 - h. Pengembangan irigasi tambak dilakukan dengan bersinkronisasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - i. Pengembangan irigasi air tanah difokuskan pada daerah-daerah minim sumber air permukaan didukung oleh konservasi air tanah sebagai upaya menjaga keberlanjutan air tanah.
 - j. Pengelolaan dan pengembangan irigasi difokuskan pada 13 lumbung pangan: Aceh, Sumut, Sumsel, Sumbar, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Kalsel, Kalbar, Sulsel, dan Sulteng.
 - k. Pengembangan irigasi didukung oleh pemantapan pengelolaan irigasi, antara lain melalui: penerapan SRI, penyelenggaraan O&P yang didukung oleh anggaran yang memadai (AKNOP), dan lain-lain.
 - l. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi, antara lain melalui: pemberdayaan petani (P3A), peningkatan kemampuan personil O&P, pembentukan dan operasionalisasi Unit Pengelola Irigasi, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah).

2. Peningkatan kapasitas sumber energi untuk mendukung kedaulatan energi, yang dilaksanakan melalui:
 - a. Inventarisasi bendungan eksisting yang memiliki potensi PLTA dan identifikasi potensi-potensi PLTM dan PLTMH.
 - b. Pemanfaatan potensi tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT. PLN (Persero).
 - c. Pelibatan swasta dan badan usaha lainnya dalam pemanfaatan air sebagai sumber energi dilaksanakan melalui mekanisme perijinan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan 6 (enam) prinsip dasar batasan pengelolaan SDA sesuai Putusan MK Nomor 58/PUU-XI/2013.
 - b. Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air seluas 200 ribu Ha.
 - c. Penanganan banjir dilaksanakan secara menyeluruh berdasarkan studi penanganan banjir pada masing-masing wilayah sungai.
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana pengendali sedimen sebanyak 306 buah.
 - e. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 530 Km.
 - f. Penanganan drainase perkotaan sepanjang 4 km.

Sementara strategi dengan pendekatan non-struktural meliputi:

3.7.3. Strategi Operasional Pengendalian Daya Rusak

Pengendalian daya rusak air ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, abrasi pantai, dan pencemaran air yang akan dicapai, baik melalui strategi dengan pendekatan struktural, maupun non-struktural. Strategi dengan pendekatan struktural meliputi:

- a. Normalisasi sungai dan pembangunan/ peningkatan tanggul sepanjang 3.080 Km.
- a. Penyusunan *masterplan* penanganan banjir pada sungai-sungai prioritas, sehingga nantinya penanganan banjir akan menyeluruh tidak hanya spot-spot tertentu.
- b. Pelaksanaan monitoring kualitas air pada sungai-sungai utama di masing-masing wilayah kerja BBWS/BWS.
- c. Pelibatan/pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir dan upaya pengurangan pencemaran air, terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai.
- d. Pelibatan Pemerintah Daerah dalam penanganan banjir, drainase perkotaan, dan pencemaran air.
- e. Penetapan sempadan sungai dan sumber-sumber air lainnya.
- f. Pembuatan atau *updating* (pembaruan) peta rawan bencana (*flood risk map*).

- g. Pengoperasian *flood forecasting warning system* (FFWS) di sungai-sungai utama sebagai upaya peringatan dini.

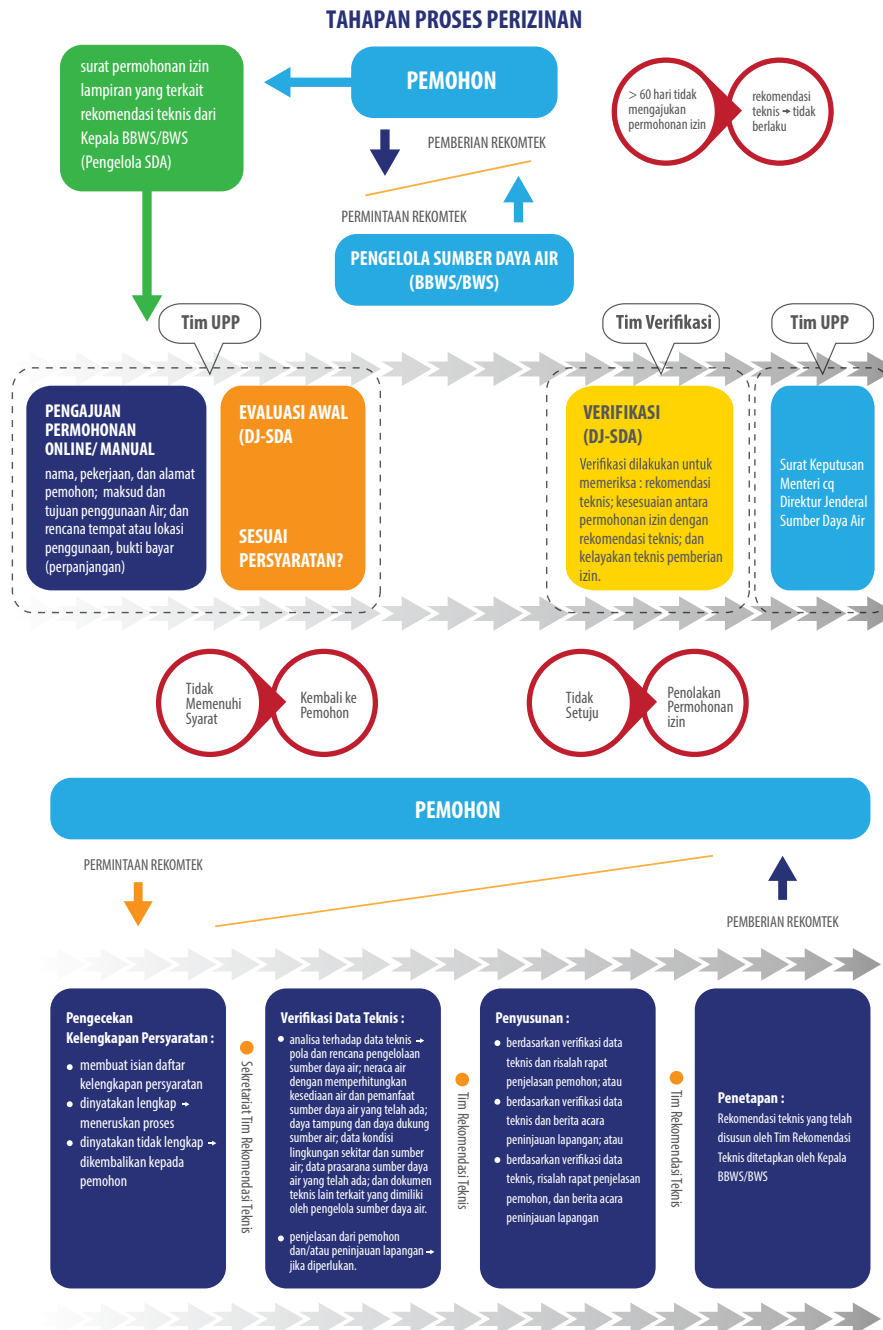
3.7.4. Strategi Operasional Peningkatan Keterpaduan Tata Kelola SDA

Peningkatan keterpaduan tata kelola SDA ditujukan untuk mewujudkan tata kelola SDA yang lebih *accountable*, didukung oleh *decision making process* yang lebih partisipatif dan demokratis dalam rangka terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan, yang dicapai melalui strategi:

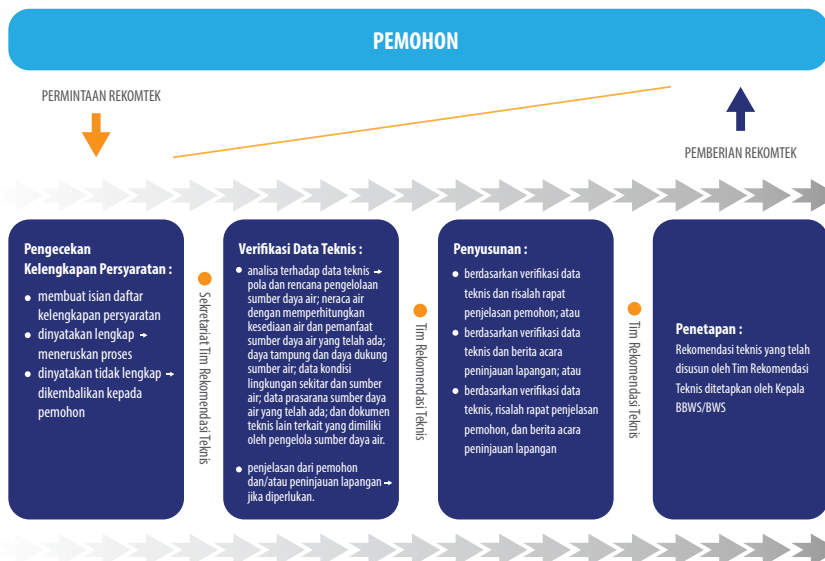
1. Perencanaan pengelolaan SDA pada masing-masing wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, melalui:
 - a. Penyelesaian penyusunan, pembahasan dan penetapan dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA pada masing-masing WS di wilayah kerja BBWS/BWS.
 - b. Penyusunan rencana alokasi air pada masing-masing wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 - c. Operasionalisasi unit perencanaan pada masing-masing BBWS/BWS untuk memperkuat kapasitas desain infrastruktur SDA.
 - d. Pemberian rekomendasi teknis sebagai dasar pemanfaatan SDA.
2. Peningkatan peran serta stakeholders, melalui:
 - a. Optimalisasi peran stakeholder pada Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) pada masing-masing WS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga O&P pengelolaan SDA, untuk meminimalkan konflik kepentingan dalam pengelolaan air di WS yang bersangkutan, terutama pada penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA, rencana prioritas dan alokasi penggunaan air, kesepakatan mengenai program, rencana kegiatan dan alokasi pembiayaan pengelolaan SDA antar instansi, serta hal-hal lain yang bersifat taktis operasional di tingkat WS.
 - b. Pembinaan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA pada WS yang menjadi kewenangannya.
 - c. Pembatasan pelibatan swasta hanya pada pemberian ijin pemanfaatan sumber daya air, bukan pada bentuk kerjasama.
3. Peningkatan Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air (SISDA) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, melalui:
 - a. Pemantapan *website* Direktorat Jenderal SDA yang dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan akuntabel. Website ini didukung oleh pemantapan website

di masing-masing BBWS/BWS yang menampilkan data dan informasi lebih detil terkait pengelolaan WS dan infrastruktur SDA di wilayah kerjanya masing-masing.

- b. Pengembangan jejaring SISDA, yang mencakup informasi terkait kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA, prasarana SDA, teknologi SDA, lingkungan SDA dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang terkait dengan SDA.
 - c. Penerapan *one map policy* pada penyelenggaraan pengelolaan SDA.
 - d. Pengembangan sistem *e-government* yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan SDA di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, meliputi:
 - 1) Pengembangan dan penerapan *e-programming* untuk perencanaan pemrograman kegiatan.
 - 2) Penerapan *e-budgeting* dengan memanfaatkan RKA-K/L yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk penganggaran kegiatan.
 - 3) Penerapan *e-procurement* dan *e-monitoring* yang dikembangkan di lingkungan Kementerian PUPR.
 - 4) Pengembangan dan penerapan *e-kinerja* untuk pengukuran kinerja unit organisasi dan kinerja individu (pegawai).
 - e. Pemantapan sistem komunikasi publik Direktorat Jenderal SDA yang didasarkan pada data dan informasi yang lengkap, akurat, dan akuntabel yang terintegrasi dengan *e-programming*.
 - f. Peningkatan kapasitas SDM di bidang komunikasi publik dan teknologi informasi melalui pelatihan, studi banding, dan lain-lain.
4. Pengusahaan atau penggunaan oleh perseorangan atau badan usaha dilakukan berdasarkan ijin pengusahaan atau ijin penggunaan Sumber Daya Air, yang ditetapkan berdasarkan ketersediaan air dan peruntukan air sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan perijinan diberikan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut :
- a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;
 - b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
 - d. pengusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
 - e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - f. pengusahaan sumber daya air oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta.



Gambar 16
Prosedur Perijinan
Pengusahaan Atas Air



3.7.5. Strategi Operasional Operasi dan Pemeliharaan

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan ditujukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur sumber daya air, yang dicapai melalui strategi:

1. Seluruh prasarana SDA yang berupa aset harus dioperasikan dan dipelihara.
2. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pada seluruh objek O&P yang terdiri atas:
 - a. seluruh infrastruktur SDA, yang meliputi jaringan irigasi, bendungan, sarana prasarana air baku, dan sarana prasarana pengendali banjir.
 - b. wadiah (alami) yang strategis meliputi sungai perkotaan dan danau/situ.
3. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan O&P sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata O&P (AKNOP) secara bertahap.
4. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan pelaksana O&P dibagi atas:
 - a. Untuk sistem makro (sungai dan bendungan) dilakukan oleh BBWS/BWS dan Perum Jasa Tirta
 - b. Untuk sistem mikro (jaringan irigasi, situ, air baku) dapat diserahkan ke Pemerintah Daerah melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP).
5. Pengembangan kelembagaan O&P dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan SDM dan regulasi.

3.8. DUKUNGAN INTERNAL PROCESS

Dalam rangka mendukung strategi operasional sebagaimana disebut diatas, diperlukan dukungan internal process yang berfungsi sebagai *enabler*. Strategi dukungan *internal process* ini diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Direktorat Jenderal SDA, melalui:
 - a. Penambahan SDM yang dilakukan dengan mempekerjakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sesuai yang diatur oleh UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - b. Percepatan regenerasi dan peningkatan kualitas SDM di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, melalui pelatihan/ pendidikan, rotasi pegawai, dan *on-site placement* SDM muda sesuai dengan latar belakang pendidikan. Standar kompetensi jabatan dan penilaian kompetensi pegawai menjadi dasar perencanaan karir pegawai, serta penempatan dalam jabatan.
 - c. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional pada masing-masing bidang keahlian melalui Diklat dan Uji Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya.
2. Peningkatan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA yang difokuskan pada upaya penerapan motto kerja bekerja keras,

bergerak cepat, bertindak tepat di lingkungan Direktorat Jenderal SDA. Penerapan sistem kinerja pegawai dan unit juga menjadi bagian peningkatan budaya dan etika kerja.

3. Peningkatan pengelolaan regulasi pengelolaan SDA yang difokuskan pada penyusunan dan harmonisasi Rancangan UU Pengganti UU No. 7 tahun 2004 serta peraturan pemerintah yang menjadi turunannya. Termasuk didalamnya adalah prosedur perijinan, penyelenggaraan pembinaan Pemerintah Daerah, serta mekanisme yang mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan perangkat kerja berbasis teknologi informasi, melalui pemantapan fungsi *e-budgeting*, *e-monitoring* dan *e-procurement* yang sudah ada saat ini, serta pengembangan *e-programming* untuk memudahkan penyusunan program dan anggaran dan *e-kinerja* untuk memudahkan pengukuran kinerja unit organisasi dan individu (pegawai). Termasuk dalam strategi ini adalah penerapan teknologi hasil dari Puslitbang Air.
5. Peningkatan layanan dukungan manajemen melalui pemantapan dan fungsionalisasi struktur organisasi yang sudah dibentuk berdasarkan kinerja organisasi yang diharapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi serta uraian kerja masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan, didukung oleh perumusan mekanisme kerja yang efektif dan efisien. Termasuk dalam strategi ini

adalah peningkatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), peningkatan ketertiban administrasi laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), serta audit internal dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

3.9. OPERASIONALISASI STRATEGI KE DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN

Operasionalisasi strategi Direktorat Jenderal SDA tersebut dilaksanakan dalam sebuah program yaitu Program Pengelolaan SDA, sebagaimana tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan (Lampiran-2), yang meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Tambak
2. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
3. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu
4. Pengelolaan Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
5. Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
6. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA

Adapun Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa Dan Tambak, mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

- (1) Layanan teknis irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak, melalui pemberian bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak, serta monitoring dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan OP irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak
- (2) Tanah untuk konstruksi bendung dan irigasi permukaan kewenangan Pusat, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dibebaskan melalui pengadaan tanah serta monitoring dan evaluasi luas tanah yang dibebaskan.
- (3) Rencana teknis dan dokumen lingkungan bendung dan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dibangun dan ditingkatkan/direhabilitasi melalui penyusunan rencana teknis.
- (4) Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dilaksanakan konstruksinya melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring serta persiapan OP dan evaluasi jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dilaksanakan.
- (5) Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang diairi oleh bendungan melalui pelaksanaan konstruksi dan supervisi konstruksi jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang diairi oleh bendungan yang dilaksanakan serta persiapan OP.
- (6) Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dilaksanakan konstruksinya dengan jumlah konstruksi bendung irigasi kewenangan Pusat yang dilaksanakan melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (7) Tanah untuk konstruksi bendung dan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dibebaskan melalui pengadaan tanah dan monitoring.
- (8) Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dilaksanakan konstruksinya melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP panjang jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dilaksanakan konstruksinya.
- (9) Bendung irigasi kewenangan Daerah yang dilaksanakan konstruksinya melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, serta monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (10) Jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan konstruksinya melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (11) Jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan konstruksinya melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (12) Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (13) Bendung kewenangan Pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.

- (14) Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (15) Bendung kewenangan Daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (16) Jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan/direhabilitasi melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (17) Jaringan irigasi tambak yang ditingkatkan/direhabilitasi melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (18) Kawasan rawa yang dikonservasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.

Kegiatan Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai, mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

- (1) Layanan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai, melalui pemberian bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai
- (2) Tanah untuk konstruksi bangunan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai yang dibebaskan melalui pengadaan tanah serta monitoring dan evaluasi luas tanah yang dibebaskan.
- (3) Rencana teknis dan dokumen konstruksi bangunan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi melalui penyusunan rencana teknis.
- (4) Normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (5) Bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (6) Kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (7) Stasiun pompa banjir yang dibangun/ditingkatkan melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (8) Polder/kolam retensi yang dibangun/ditingkatkan melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (9) *Flood Forecasting & Warning System (FFWS)* yang dikembangkan, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (10) Pengendali lahar gunung berapi yang dibangun/ditingkatkan melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.

- (11) Bangunan pemecah gelombang (*break water*) yang dibangun/ditingkatkan, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (12) Tembok penahan gelombang (*sea wall*) yang dibangun/ditingkatkan, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (13) Saluran drainase yang dibangun/ditingkatkan, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (14) Bangunan sarana prasarana drainase yang dibangun/ditingkatkan, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (15) Tanggul yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (16) Perkuatan tebing yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (17) Kanal banjir yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (18) Stasiun pompa banjir yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (19) Polder/kolam retensi yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (20) Pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (21) Bangunan pemecah gelombang (*break water*) yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (22) Tembok penahan gelombang (*sea wall*) yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (23) Bangunan pengendali sedimen (*check dam*) yang dibangun, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (24) Bangunan pengendali sedimen (*check dam*) yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (25) Sungai yang direstorasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (26) Sungai dan garis sempadannya yang diupayakan perlingkungannya, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu, mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :
- (1) Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu, melalui pemberian bimbingan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu.
 - (2) Komunikasi dan layanan publik yang diselenggarakan, melalui pengembangan,

pelayanan, serta monitoring dan evaluasi komunikasi dan layanan publik.

- (3) Sistem data dan informasi SDA yang diselenggarakan, melalui pengembangan sistem, pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan data dan informasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem data dan informasi SDA.
- (4) Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview melalui penyusunan/review, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.
- (5) Data hidrologi dan kualitas air yang dikelola, melalui pengembangan sistem, pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan data dan informasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data hidrologi dan kualitas air.
- (6) Rekomendasi teknis yang diberikan, melalui penyusunan konsep, serta monitoring dan evaluasi.
- (7) Alokasi air yang diberikan, melalui penyusunan konsep, serta monitoring dan evaluasi.
- (8) Pengelolaan BMN, melalui penyusunan konsep, serta monitoring dan evaluasi.
- (9) Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya, melalui pembentuk, operasionalisasi, pelatihan, RBO benchmarking, serta monitoring dan evaluasi.

Kegiatan Pengelolaan Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, mempunyai

Sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

- (1) Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya, melalui pemberian bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya.
- (2) Tanah untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibebaskan, melalui pengadaan tanah serta monitoring dan evaluasi luas tanah yang dibebaskan.
- (3) Rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun dan ditingkatkan/direhabilitasi, melalui penyusunan rencana teknis.
- (4) Bendungan baru yang dibangun, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (5) Bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going) , melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (6) Prasarana sumber energi yang dibangun, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (7) Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (8) Bendungan yang direhabilitasi, melalui

- pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (9) Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (10) Danau yang direvitalisasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (11) Danau dan garis sempadannya yang diupayakan perlindungannya, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (12) Mata air yang dilindungi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.

Adapun Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku, mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

- (1) Layanan teknis sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku, melalui pemberian bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku.
- (2) Tanah untuk konstruksi sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku yang dibebaskan, melalui pengadaan tanah serta monitoring dan evaluasi luas tanah yang dibebaskan.
- (3) Rencana teknis dan dokumen lingkungan sarana prasarana penyediaan air tanah dan

- air baku yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi, melalui penyusunan rencana teknis.
- (4) Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun/ditingkatkan, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (5) Embung untuk air baku yang dibangun/ditingkatkan, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (6) Saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (7) Intake air baku yang dibangun/ditingkatkan, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (8) Sumur JIAT yang dibangun/ditingkatkan, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (9) Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (10) Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (11) Embung untuk air baku yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
 - (12) Saluran pembawa yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.

- (13) Intake air baku yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (14) Sumur JIAT yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.
- (15) Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi, melalui pelaksanaan konstruksi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta persiapan OP.

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA, mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut:

- (1) Layanan teknis OP sarana prasarana SDA, melalui pemberian bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA.
- (2) Tampungan air yang dioperasikan dan dipelihara, meliputi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya, melalui pelaksanaan OP, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan tenaga OP bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya.
- (3) Unit pengelola bendungan yang difungsikan, melalui pelaksanaan OP, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan tenaga OP bendungan.
- (4) Sarana dan prasarana air baku yang dioperasikan dan dipelihara, meliputi sumur air tanah untuk air baku, embung untuk air baku, serta unit air baku (intake dan jaringan), melalui pelaksanaan OP, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan tenaga OP sarana dan prasarana air baku.
- (5) Sarana dan prasarana pengendali daya rusak, meliputi tanggul/tebing banjir, kanal banjir, stasiun pompa, polder/kolam retensi, pengendali lahar gunung berapi bangunan pengamanan pantai, melalui pelaksanaan OP, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan tenaga OP sarana dan prasarana pengendali daya rusak.
- (6) *Flood Forecasting & Warning System (FFWS)* yang dioperasikan dan dipelihara, melalui pelaksanaan OP, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan tenaga OP.
- (7) Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dioperasikan dan dipelihara, melalui pelaksanaan OP, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan tenaga OP.
- (8) Sungai yang dipelihara, melalui pelaksanaan OP, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan tenaga OP.
- (9) Danau yang dipelihara, melalui pelaksanaan OP, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan tenaga OP.
- (10) Kawasan rawa yang dipelihara, melalui pelaksanaan OP, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan tenaga OP.
- (11) Mata air yang dipelihara, melalui pelaksanaan OP, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan tenaga OP.
- (12) Bendung dan jaringan irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara, meliputi bendung, irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak, dan irigasi air

tanah, melalui pelaksanaan OP, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan tenaga OP bendung dan jaringan irigasi kewenangan Pusat.

- (13) Unit pengelola irigasi yang difungsikan, melalui pembentukan, operasionalisasi, serta monitoring dan evaluasi fungsionalisasi unit pengelola irigasi.
- (14) Peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan, melalui pemetaan dan penetapan kawasan rawan bencana.
- (15) Peralatan dan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan SDA melalui pelaksanaan OP peralatan, penyediaan bahan banjiran, serta monitoring dan evaluasi OP.
- (16) Kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air yang dilaksanakan, melalui pelaksanaan OP, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan tenaga OP

1. Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri
3. Kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945
4. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak
5. Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN dan BUMD
6. Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan ijin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat

Implikasi dari pembatalan ini adalah praktek pengelolaan sumber daya air saat ini tidak memiliki payung hukum, untuk itu perlu direview dan diberikan payung hukumnya sementara Rancangan UU pengganti akan disusun. Payung hukum harus mengacu pada UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan dengan mengharmonisasikan dengan UU lain lain yang terkait pengelolaan SDA serta peraturan pelaksanaan UU UU No. 11 tahun 1974 yang telah mengakomodasi isu-isu kekinian sambil melaksanakan penyusunan RUU pengelolaan SDA yang baru.

Pembatalan UU No. 7 tahun 2004 dan berlakunya kembali UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan berdampak pada praktek pengelolaan sumber

Pasca dibatalkannya UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU. XI/2015), dasar hukum pengelolaan SDA kembali kepada UU No. 11 tahun 1974. Keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaan SDA dan pergeseran makna air dari barang publik menjadi komoditas (mementingkan aspek ekonomi, berorientasi pada keuntungan) adalah aspek-aspek yang menyebabkan pembatalan tersebut, karena dianggap melanggar UUD 1945 Pasal 33.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan SDA ke depan perlu memperhatikan 6 prinsip:

3.10. KERANGKA REGULASI

daya air yang selama ini mengacu kepada UU No. 7 tahun 2004 perlu segera direview dan diberikan payung hukumnya sementara Rancangan UU pengganti akan disusun, dengan pertimbangan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, lembaga pengelolaan yang sudah ada saat ini harus tetap ada, dan kesepakatan/kontrak dengan pihak ke-3 harus tetap berjalan sampai akhir kontrak.

Pada tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan SDA dan Peraturan Pemerintah No. 122 tentang Penyelenggaraan SPAM; Raperpres tentang Dewan Sumber Daya Air; Rakerpres tentang Pembentuk Dewan SDA Nasional; serta 21 Peraturan Menteri PUPR, yang mengatur:

1. Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
2. Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan
3. Pengamanan Pantai
4. Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi
5. Penggunaan SDA
6. Rencana dan Rencana Teknis Pengaturan Air dan Tata Pengairan
7. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut
8. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
9. Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air
10. Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
11. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak
12. Komisi Irigasi
13. Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan
14. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
15. Pengelolaan Aset Irigasi
16. Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai
17. Bendungan
18. Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
19. Rawa
20. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
21. Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air

3.11. KERANGKA KELEMBAGAAN

Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan SDA terpadu memerlukan kerangka kelembagaan efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program pengelolaan SDA terpadu yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada Direktorat Jenderal SDA dan lembaga lain yang terkait dalam pengelolaan SDA terpadu, pengaturan hubungan internal dan antar lembaga, serta sumber daya manusia aparaturnya. Lembaga mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan internal dan eksternal antar-lembaga mencakup peran tanggung jawab dan/atau tata hubungan kerja internal dan eksternal antar lembaga pengelola SDA terpadu,

sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan lembaga tersebut. Aspek sumber daya manusia aparatur di dalam isu kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

Pengelolaan SDA terpadu merupakan kerja bersama beberapa sektor dalam kabinet pemerintahan salah satunya adalah Direktorat Jenderal SDA sebagai sektor yang menjadi motor dalam pengelolaan SDA terpadu yang juga melibatkan berbagai *stakeholders* (Dewan SDA Nasional di tingkat Pusat dan TKPSDA di tingkat wilayah sungai) terkait dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Pelaksanaan pengelolaan SDA terpadu harus dapat menjawab tantangan yang besar serta kompleksitas permasalahan yang tinggi.

Ketersediaan lembaga yang efektif dan akuntabel merupakan prasyarat bagi keberhasilan pengelolaan SDA yang terpadu yang efektif dan akuntabel untuk mewujudkan hasil/kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk keberhasilan pengelolaan SDA terpadu diperlukan penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA di berbagai bidang secara berkelanjutan, termasuk membangun kelembagaan wadah koordinasi.

Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan pengelola SDA terpadu tidak harus diartikan berupa pembentukan unit/wadah baru

bahkan dalam beberapa kasus dapat dilakukan perampingan dan penyederhanaan unit untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan kinerjanya. Upaya penguatan kelembagaan dalam rangka pengelolaan SDA terpadu masih sangat perlu terus dilanjutkan. Direktorat Jenderal SDA masih dibayangi berbagai permasalahan, antara lain karena masih belum optimalnya kualitas kelembagaannya. Yang menjadi masalah utama pengelolaan SDA terpadu bukanlah hanya masalah pendanaan/pembiayaan semata, tetapi juga karena terbatasnya lembaga-lembaga terkait pengelolaan SDA terpadu yang efektif dan akuntabel yang dapat melaksanakan pengelolaan SDA terpadu sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Upaya penguatan kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal SDA ke depan diarahkan guna perwujudan:

- 1) Tugas dan fungsi yang jelas, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan, dan inefisiensi belanja operasional;
- 2) Tata laksana dan tata hubungan kerja yang efektif, efisien, transparan, dan sinergis (*well-connected governance system*); dan
- 3) Meningkatnya profesionalitas, integritas, dan kinerja SDM aparatur yang mampu melaksanakan visi, misi, program, dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Direktorat Jenderal SDA – Kementerian PUPR.

Penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA dilakukan dengan koordinasi yang sangat intensif dan efektif di antara berbagai lembaga yang terkait dengan pengelolaan SDA terpadu, dengan memperhatikan:

- 1) Sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengelolaan SDA terpadu oleh Direktorat Jenderal SDA – Kementerian PUPR terpadu;
- 2) Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- 3) Prinsip-prinsip kelembagaan yang modern; serta
- 4) Penerapan prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik, seperti transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pengaturan, pendendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran pemerintah.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penguatan kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal SDA diarahkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan SDA terpadu senantiasa memanfaatkan kelembagaan/ wadah koordinasi yang sudah ada namun bila diperlukan dapat pula dibentuk wadah konsolidasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan SDA terpadu yang bersifat lintas sektor dari berbagai sektor agar semua sektor saling mengetahui kemajuan masing-masing sektor secara berkala.

2. Dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan pengelola SDA terpadu agar ada kejelasan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga pengelola SDA terpadu untuk menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;
- b. Penataan struktur Direktorat Jenderal SDA baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengelolaan SDA terpadu;
- c. Penyempurnaan tata laksana/ hubungan tata kerja internal maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana pengelolaan SDA terpadu yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
- d. Penyempurnaan semua sistem manajemen/ tata kelola di Direktorat Jenderal SDA terkait pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan SDA terpadu;
- e. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi pengelolaan SDA terpadu Direktorat Jenderal SDA dengan baik;

- f. Peningkatan koordinasi dan pemanfaatan hasil riset pengelolaan SDA terpadu oleh lembaga riset baik internal Kementerian PUPR maupun eksternal agar lebih efektif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan riset untuk meningkatkan kapasitas inovasi dalam rangka pengelolaan SDA terpadu.
3. Dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan pengelolaan SDA terpadu, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pengelolaan SDA terpadu nasional, untuk memastikan bahwa kelembagaan pengelola SDA terpadu terutama Direktorat Jenderal SDA yang diperkuat dan/atau dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antara tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga pengelola SDA terpadu dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
 - c. Transparansi, efektivitas, dan efisiensi untuk memastikan bahwa hasil

penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA – Kementerian PUPR akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat dalam penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA perlu dilakukan dengan cermat.

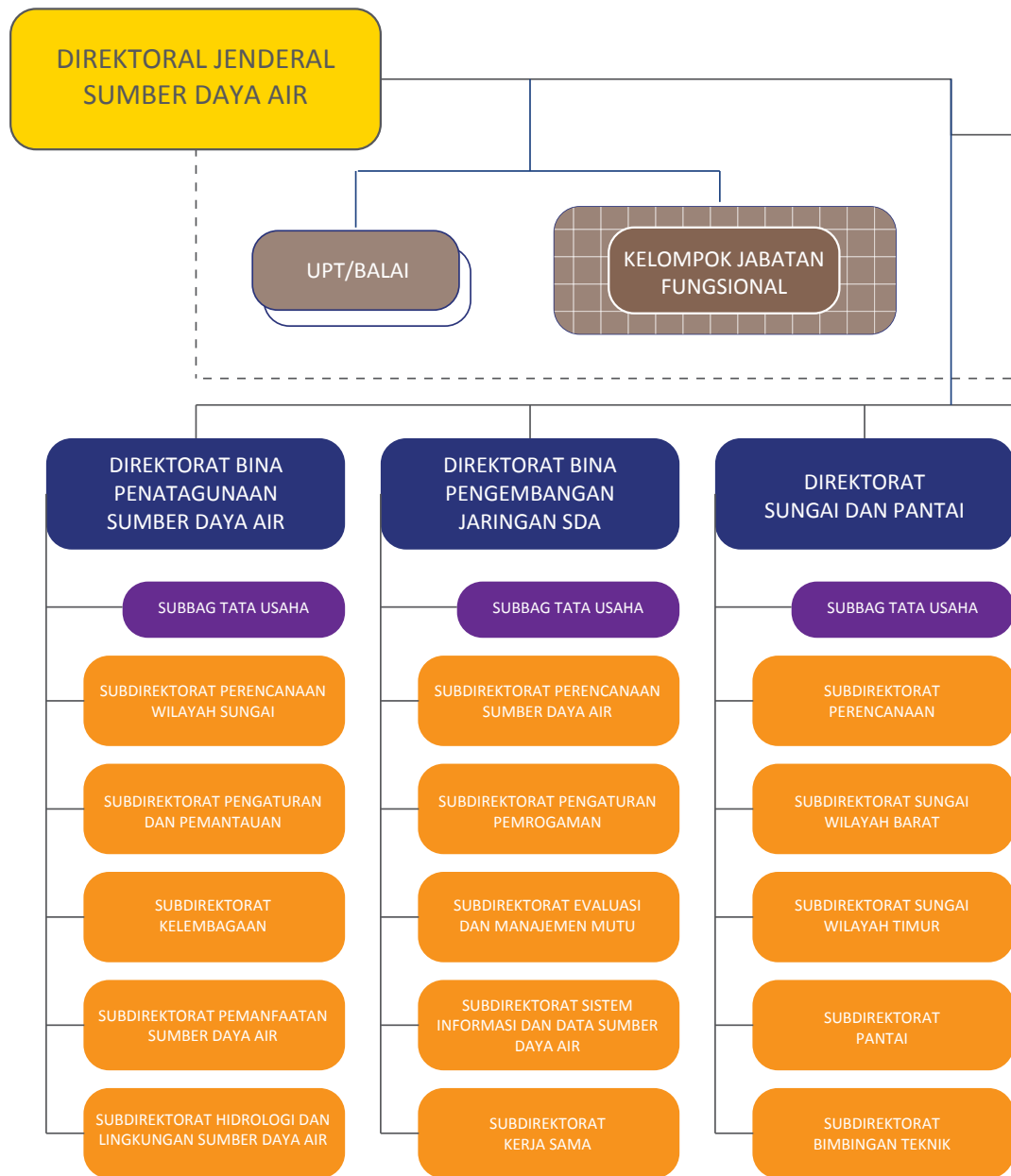
Dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan SDA terpadu, prioritas penguatan kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal SDA 2015-2019 akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

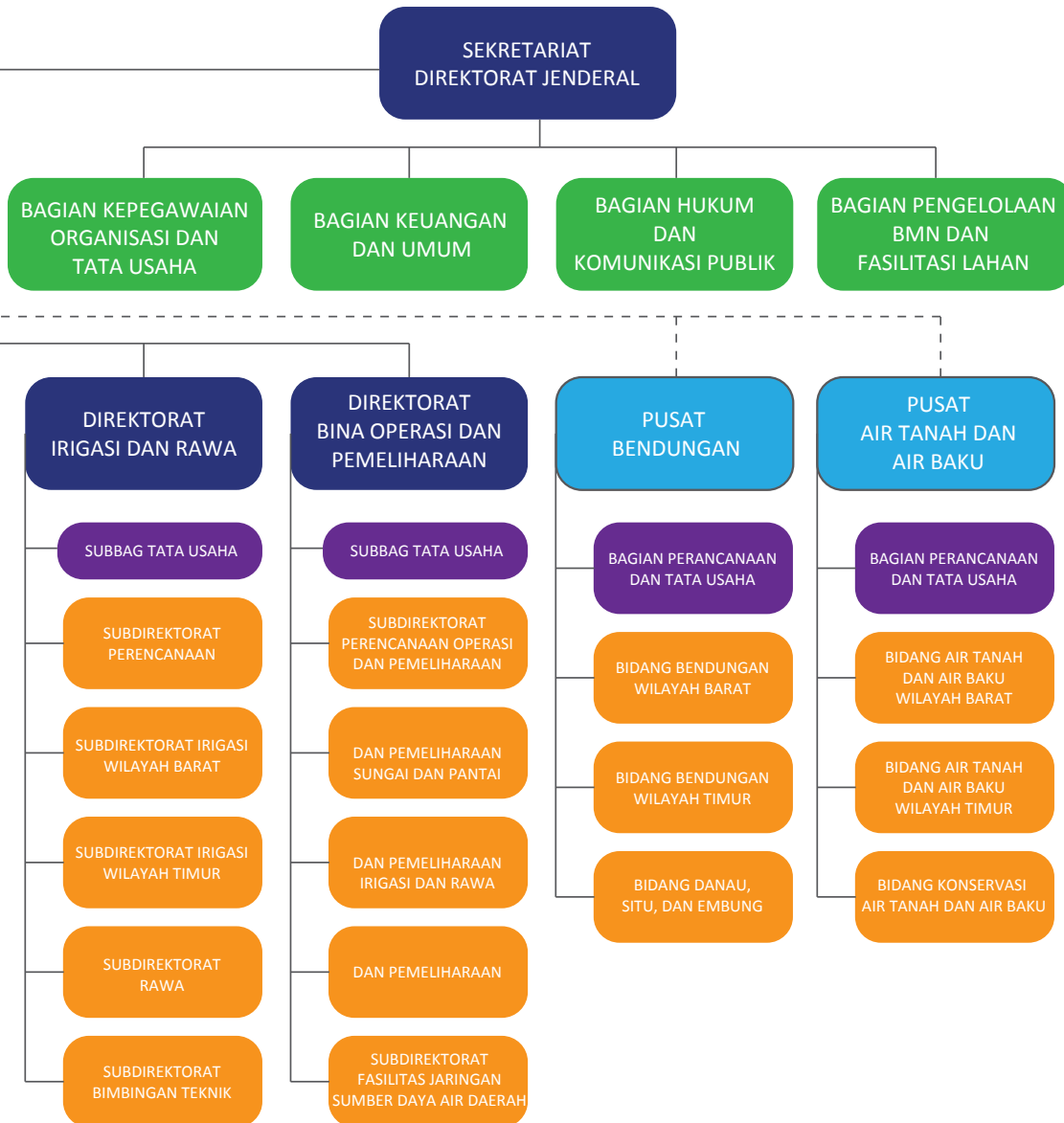
1. Revitalisasi lembaga pengelola SDA terpadu yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal SDA;
2. Penguatan kelembagaan pengelola SDA terpadu dalam rangka peningkatan ketahanan air yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal SDA;
3. Penataan unit pengelola SDA terpadu yang berada di bawah Direktorat Jenderal SDA;
4. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan SDA terpadu;
5. Penguatan manajemen/tata kelola dalam pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan SDA terpadu oleh Direktorat Jenderal SDA;
6. Penguatan kelembagaan penegakan regulasi oleh Direktorat Jenderal SDA terkait pengelolaan SDA terpadu;

7. Penguatan kelembagaan manajemen aparatur sipil negara guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas pengelolaan aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal SDA menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja;
8. Penguatan kelembagaan pengelolaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal SDA agar lebih efektif dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal SDA;
9. Peningkatan koordinasi dan pemanfaatan hasil riset pengelolaan SDA terpadu oleh lembaga riset baik internal Kementerian PUPR maupun eksternal agar lebih efektif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan riset untuk meningkatkan kapasitas inovasi dalam rangka pengelolaan SDA terpadu;
10. Pencermatan analisis biaya dan manfaat dalam penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA.



DAERAH IRIGASI KOMERING
SUMATERA SELATAN







NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG

DKI JAKARTA

BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan



4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal SDA untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Nomenklatur program dan kegiatan yang digunakan Direktorat Jenderal SDA meliputi:

PROGRAM : Pengelolaan Sumber Daya Air

KEGIATAN :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen SDA
2. Pembinaan Penatagunaan SDA
3. Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA
4. Pembinaan Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
5. Pembinaan Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
6. Pembinaan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Tambak
7. Pembinaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
8. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

9. Dukungan Manajemen Wadah Koordinasi SDA di tingkat Nasional
10. Pembinaan Keamanan Bendungan
11. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Tambak
12. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
13. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu
14. Pengelolaan Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
15. Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
16. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA

Struktur program, kegiatan, dan outputnya ini berbeda dengan yang tercantum pada RPJMN 2015-2019. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur organisasi dan hasil evaluasi Kementerian Keuangan bahwa sebagian output yang selama ini digunakan bukan merupakan output (hasil akhir) tapi merupakan outcome (Contoh: output jaringan irigasi yang dibangun pada RPJMN 2015-2019 memiliki satuan hektar (outcome), sementara pada struktur yang baru ini digunakan satuan km (output). Walaupun demikian, capaian output pada RPJMN 2015-2019 tersebut tetap dapat diukur dengan struktur output yang baru.

4.2. TARGET KINERJA

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal SDA yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran
2. Penetapan target relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Target sasaran Direktorat Jenderal SDA 2015-2019 dapat dilihat pada **LAMPIRAN 2**.

4.3. KERANGKA PENDANAAN

Kompleksitas yang dihadapi dalam pengelolaan SDA harus diimbangi dengan kapasitas pendanaan yang kerangkanya disusun jelas, baik terkait sumber maupun mekanismenya.

Sejalan UUD 1945 pasal 33 (3) bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, investasi untuk pengelolaan SDA bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD (termasuk pinjaman/hibah luar negeri dan syariah/surat berharga negara – SBSN). Pelibatan swasta dalam hal ini terbatas pada pemanfaatan SDA dengan ijin, tidak dalam bentuk kerjasama / kontrak.

Investasi Pemerintah untuk pengelolaan SDA, khususnya pada Direktorat Jenderal SDA, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun hal ini juga belum dapat mengimbangi kebutuhan pendanaan yang sebenarnya dibutuhkan. Diperlukan pengelolaan secara cermat terkait ketersediaan pendanaan yang terbatas dan tidak memiliki kepastian tinggi (sangat tergantung dari pendapatan negara), sehingga sasaran strategis nasional yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Pengelolaan yang cermat dilakukan dengan menyusun skala prioritas anggaran, alokasi anggaran harus tetap difokuskan pada program dan kegiatan yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas pengelolaan SDA terpadu nasional untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu diperlukan efisiensi dari belanja terkait operasional agar alokasi yang terbatas menjadi lebih berdayaguna.

Untuk itu, kerangka pendanaan pengelolaan SDA oleh Direktorat Jenderal SDA diarahkan sebagai berikut:

1. Sumber pendanaan adalah APBN yang terdiri atas Rupiah Murni (RM), Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
2. Penyusunan program dan anggaran berdasarkan kriteria prioritas yang ditetapkan sesuai dengan sasaran strategis nasional.
3. Kerangka pendanaan menerapkan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure*) serta anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).
4. Pencapaian target sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 tidak dapat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal SDA (Pemerintah Pusat), sebagian target merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini target pembangunan dan rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi. Untuk kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah ini diusulkan untuk didanai melalui mekanisme

Dana Alokasi Khusus (DAK). Ke depan, mekanisme DAK perlu diperkuat dengan melakukan penajaman kriteria teknis daerah penerima.

Alokasi pendanaan untuk Direktorat Jenderal SDA dalam RPJMN 2015-2019 selama 5 tahun adalah sebesar Rp. 208 Trilyun (belum termasuk anggaran untuk dukungan manajemen). Alokasi pendanaan tersebut disusun dengan rencana target sebagaimana menjadi kebutuhan sesungguhnya Direktorat Jenderal SDA sebesar Rp 316 Trilyun (termasuk pendanaan untuk dukungan manajemen). Alokasi ini belum termasuk kebutuhan untuk melaksanakan tugas baru dari Menteri PUPR terkait penanganan drainase sebagai bagian dari penanganan banjir di perkotaan. Kebutuhan penanganan drainase ini sekitar Rp 3,7 Trilyun. Hal ini akan menjadi perhatian khusus pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

LAMPIRAN



TABEL DAFTAR KEGIATAN, OUTPUT, OUTCOME, dan SATUANNYA

KODE	KEGIATAN/OUTPUT	OUTPUT	OUTCOME
2418	Dukungan Manajemen SDA		
2418.001	NSPK pelaksanaan tugas sekretariat Dewan SDAN	N/S/P/K	N/S/P/K
2418.002	Layanan dukungan manajemen pelaksanaan tugas sekretariat Dewan SDAN	dokumen	dokumen
2418.003	Kebijakan nasional pengelolaan SDA yang disusun/direview	dokumen	dokumen
2418.994	Layanan Perkantoran	Bulan	Bulan
2419	Pembinaan Program dan Anggaran		
2419.001	NSPK perencanaan dan pemrograman SDA	N/S/P/K	N/S/P/K
2419.002	Layanan teknis perencanaan dan pemrograman SDA	Pemda/masyarakat/dunia usaha	Pemda/masyarakat/dunia usaha
2419.003	Layanan dukungan manajemen perencanaan dan pemrograman SDA	BBWS/BWS	BBWS/BWS
2419.994	Layanan Perkantoran	Bulan	Bulan
2420	Pembinaan Penatagunaan SDA		
2420.001	NSPK Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu	N/S/P/K	N/S/P/K
2420.002	Layanan Teknis Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu	Pemda/masyarakat/dunia usaha	Pemda/masyarakat/dunia usaha
2420.003	Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu	BBWS/BWS	BBWS/BWS
2420.994	Layanan Perkantoran	Bulan	Bulan
2421	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya		
2421.001	NSPK penyusunan peraturan perundang-undangan dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, tata usaha, informasi publik, dan lahan	N/S/P/K	N/S/P/K
2421.002	Layanan teknis peraturan perundang-undangan dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, tata usaha, informasi publik, dan lahan	BBWS/BWS/pegawai	BBWS/BWS/pegawai
2421.003	Layanan dukungan manajemen peraturan perundang-undangan dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, tata usaha, informasi publik, dan lahan	BBWS/BWS	BBWS/BWS
2421.994	Layanan Perkantoran	Bulan	Bulan
2422	Pembinaan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Tambak		
2422.001	NSPK irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak	N/S/P/K	N/S/P/K
2422.002	Layanan teknis irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak	Pemda/masyarakat/dunia usaha	Pemda/masyarakat/dunia usaha
2422.003	Layanan teknis pemenuhan SPM irigasi di Daerah	Pemda	Pemda
2422.004	Layanan dukungan manajemen dan teknis pembangunan, persiapan OP dan rehabilitasi irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak	BBWS/BWS	BBWS/BWS
2422.994	Layanan Perkantoran	Bulan	Bulan
2423	Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana		
2423.001	NSPK OP sarana prasarana SDA	N/S/P/K	N/S/P/K
2423.002	Layanan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasarana SDA	Pemda/masyarakat/dunia usaha	Pemda/masyarakat/dunia usaha

KODE	KEGIATAN/OUTPUT	OUTPUT	OUTCOME
2423.003	Fasilitasi penyediaan peralatan pendukung operasi dan pemeliharaan yang dilaksanakan	Pemda/masyarakat t/dunia usaha	Pemda/masyarakat t/dunia usaha
2423.004	Layanan dukungan manajemen dan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasarana SDA	Unit	Unit
2423.005	Layanan dukungan manajemen dan teknis penyusunan dan penetapan peta kawasan rawan bencana	BBWS/BWS	BBWS/BWS
2423.006	Layanan dukungan manajemen dan teknis tanggap darurat bencana	BBWS/BWS	BBWS/BWS
2423.994	Layanan Perkantoran	Bulan	Bulan
2424	Pembinaan Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai		
2424.001	NSPK pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	N/S/P/K	N/S/P/K
2424.002	Layanan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	Pemda/masyarakat t/dunia usaha	Pemda/masyarakat t/dunia usaha
2424.003	Layanan teknis pemenuhan SPM drainase di Daerah	Pemda	Pemda
2424.004	Layanan dukungan manajemen dan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	BBWS/BWS	BBWS/BWS
2424.005	Layanan teknis desain pengendalian banjir	BBWS/BWS	BBWS/BWS
2424.994	Layanan Perkantoran	Bulan	Bulan
5035	Pembinaan Keamanan Bendungan		
5035.001	NSPK keamanan bendungan	N/S/P/K	N/S/P/K
5035.002	Layanan teknis keamanan bendungan	Pemda/masyarakat t/ dunia usaha	Pemda/masyarakat t/ dunia usaha
5035.003	Layanan dukungan manajemen dan teknis keamanan bendungan	BBWS/BWS	BBWS/BWS
5035.994	Layanan Perkantoran	Bulan	Bulan
5036	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Tambak		
5036.001	Layanan teknis irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak	Pemda/masyarakat t/dunia usaha	Pemda/masyarakat t/dunia usaha
5036.002	Tanah untuk konstruksi bendung dan irigasi permukaan kewenangan Pusat, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dibebaskan	hektar	hektar
5036.003	Rencana teknis dan dokumen lingkungan bendung dan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dibangun dan ditingkatkan/direhabilitasi	dokumen	dokumen
5036.004	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dilaksanakan konstruksinya	km	km
5036.005	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang diairi oleh bendungan	km	km
5036.006	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dilaksanakan konstruksinya	bendung	bendung
5036.007	Tanah untuk konstruksi bendung dan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dibebaskan	hektar	hektar
5036.008	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dilaksanakan konstruksinya	MALUKU	MALUKU
5036.009	Bendung irigasi kewenangan Daerah yang dilaksanakan konstruksinya	km	km
5036.010	Jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan konstruksinya	bendung	bendung
5036.011	Jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan konstruksinya	km	km
5036.012	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi	km	km

KODE	KEGIATAN/OUTPUT	OUTPUT	OUTCOME
5036.013	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi	bendung	bendung
5036.014	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi	km	hektar
5036.015	Bendung irigasi kewenangan Daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi	bendung	bendung
5036.016	Jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan/direhabilitasi	km	hektar
5036.017	Jaringan irigasi tambak yang ditingkatkan/direhabilitasi	km	hektar
5036.018	Kawasan rawa yang dikonservasi	kawasan	kawasan
5036.994	Layanan Perkantoran	Bulan	Bulan
5037	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai		
5037.001	Layanan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	Pemda/masyaraka t/dunia usaha	Pemda/masyaraka t/dunia usaha
5037.002	Tanah untuk konstruksi bangunan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dibebaskan	hektar	hektar
5037.003	Rencana teknis dan dokumen lingkungan konstruksi bangunan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi	Dokumen	Dokumen
5037.004	Normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	km	hektar
5037.005	Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan	km	hektar
5037.006	Panjang kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan	km	hektar
5037.007	Stasiun pompa banjir yang dibangun	unit	unit
5037.008	Polder/kolam retensi yang dibangun	buah	buah
5037.009	Flood Forcasting & Warning System (FFWS) yang dikembangkan	BBWS/BWS	BBWS/BWS
5037.010	Pengendali lahar gunung berapi yang dibangun/ditingkatkan	buah	juta m ³
5037.011	Bangunan pemecah gelombang (break water) yang dibangun/ditingkatkan	km	hektar
5037.012	Tembok penahan gelombang (sea wall) yang dibangun/ditingkatkan	km	hektar
5037.013	Saluran drainase yang dibangun/ditingkatkan	km	hektar
5037.014	Bangunan sarana prasarana drainase yang dibangun/ditingkatkan	buah	buah
5037.015	Tanggul yang direhabilitasi	km	hektar
5037.016	Perkuatan tebing yang direhabilitasi	km	hektar
5037.017	Kanal banjir yang direhabilitasi	km	hektar
5037.018	Stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	unit	unit
5037.019	Polder/kolam retensi yang direhabilitasi	buah	buah
5037.020	Pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi	buah	juta m ³
5037.021	Bangunan pemecah gelombang (break water) yang direhabilitasi	km	hektar

KODE	KEGIATAN/OUTPUT	OUTPUT	OUTCOME
5037.022	Tembok penahan gelombang (sea wall) yang direhabilitasi	km	hektar
5037.023	Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dibangun	buah	buah
5037.024	Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi	buah	buah
5037.025	Sungai yang direstorasi	sungai	sungai
5037.026	Sungai dan garis sempadannya yang diupayakan perlindungannya	sungai	sungai
5037.994	Layanan Perkantoran	bulan	bulan
5038	Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu		
5038.001	Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu	Pemda/masyarakat t/dunia usaha	Pemda/masyarakat t/dunia usaha
5038.002	Komunikasi dan layanan publik yang diselenggarakan	%	%
5038.003	Sistem data dan informasi SDA yang diselenggarakan	%	%
5038.004	Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview	Dokumen	Dokumen
5038.005	Data hidrologi dan kualitas air yang dikelola	%	%
5038.006	Rekomendasi Teknis yang diberikan	%	%
5038.007	Alokasi Air yang diberikan	%	%
5038.008	Pengelolaan BMN	%	%
5038.009	Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya	%	%
5038.994	Layanan Perkantoran	bulan	bulan
5039	Pengelolaan Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air		
5039.001	Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	Pemda/masyarakat t/dunia usaha	Pemda/masyarakat t/dunia usaha
5039.002	Tanah untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibebaskan	hektar	hektar
5039.003	Rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun dan ditingkatkan/direhabilitasi	dokumen	dokumen
5039.004	Bendungan baru yang dibangun	bendungan	juta m ³
5039.005	Bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going)	bendungan	juta m ³
5039.006	Prasarana sumber energi yang dibangun	buah	MW
5039.007	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan	buah	juta m ³
5039.008	Bendungan yang direhabilitasi	bendungan	juta m ³
5039.009	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi	buah	juta m ³
5039.010	Danau yang direvitalisasi	danau	danau
5039.011	Danau dan garis sempadannya yang diupayakan perlindungannya	danau	danau
5039.012	Mata air yang dilindungi	mata air	mata air

KODE	KEGIATAN/OUTPUT	OUTPUT	OUTCOME
5039.994	Layanan Perkantoran	Bulan	Bulan
5040	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku		
5040.001	Layanan teknis sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	Pemda/masyarakat/dunia usaha	Pemda/masyarakat/dunia usaha
5040.002	Tanah untuk konstruksi sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku yang dibebaskan	hektar	hektar
5040.003	Rencana teknis dan dokumen lingkungan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi	Dokumen	Dokumen
5040.004	Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun/ditingkatkan	titik	m ³ /detik
5040.005	Embung untuk air baku yang dibangun/ditingkatkan	buah	m ³ /detik
5040.006	Saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan	km	m ³ /detik
5040.007	Intake air baku yang dibangun/ditingkatkan	buah	buah
5040.008	Sumur JIAT yang dibangun/ditingkatkan	titik	Hektar
5040.009	Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun	km	Hektar
5040.010	Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi	titik	m ³ /detik
5040.011	Embung untuk air baku yang direhabilitasi	buah	m ³ /detik
5040.012	Saluran pembawa yang direhabilitasi	km	m ³ /detik
5040.013	Intake air baku yang direhabilitasi	buah	buah
5040.014	Sumur JIAT yang direhabilitasi	titik	Hektar
5040.015	Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi	km	
5040.994	Layanan Perkantoran	bulan	bulan
5300	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA		
5300.001	Layanan teknis OP sarana prasarana SDA	Pemda/masyarakat/dunia usaha	Pemda/masyarakat/dunia usaha
5300.002	Bendungan yang dioperasikan dan dipelihara	bendungan	Juta m ³
5300.003	Unit Pengelola Bendungan yang difungsikan	Unit	Unit
5300.004	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	Buah	Juta m ³
5300.005	Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	Titik	m ³ /detik
5300.006	Embung untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	Buah	m ³ /detik
5300.007	Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara	Buak	m ³ /detik
5300.008	Tanggul/tebing banjir yang dipelihara	Km	Hektar
5300.009	Kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara	Km	Hektar
5300.010	Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Unit

KODE	KEGIATAN/OUTPUT	OUTPUT	OUTCOME
5300.011	Polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara	Buah	Buah
5300.012	Pengendali lahar gunung berapi yang dipelihara	Buah	Juta m ³
5300.013	Bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	Buah	Hektar
5300.014	Flood Forecasting & Warning System (FFWS) yang dioperasikan dan dipelihara	BBWS/BWS	BBWS/BWS
5300.015	Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dioperasi dan dipelihara	Buah	Buah
5300.016	Sungai yang dipelihara	Sungai	Sungai
5300.017	Danau yang dipelihara	Danau	Danau
5300.018	Kawasan Rawa yang dipelihara	Kawasan	Kawasan
5300.019	Mata Air yang dipelihara	Mata air	Mata air
5300.020	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	Km	Hektar
5300.021	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	Bendungan	Bendungan
5300.022	Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	Km	Hektar
5300.023	Jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara	Km	Hektar
5300.024	Sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara	Titik	Hektar
5300.025	Jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara	Km	Hektar
5300.026	Unit pengelola irigasi yang difungsikan	Unit	Unit
5300.027	Peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan	WS	WS
5300.028	Peralatan dan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan SDA	Buah	Buah
5300.029	Kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air yang dilaksanakan	Kegiatan	Kegiatan
5300.994	Layanan Perkantoran	Bulan	Bulan
5301	Pembinaan Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		
5301.001	NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	N/S/P/K	N/S/P/K
5301.002	Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	Pemda/masyarakat/dunia usaha	Pemda/masyarakat/dunia usaha
5301.003	Layanan dukungan manajemen dan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	BBWS/BWS	BBWS/BWS
5301.994	Layanan Perkantoran	Bulan	Bulan
5302	Pembinaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku		
5302.001	NSPK penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	N/S/P/K	N/S/P/K
5302.002	Layanan teknis pengelolaan air tanah dan air baku	Pemda/masyarakat/dunia usaha	Pemda/masyarakat/dunia usaha
5302.003	Layanan dukungan manajemen dan teknis pengelolaan air tanah dan air baku	BBWS/BWS	BBWS/BWS
5302.994	Layanan Perkantoran	Bulan	Bulan

TABEL SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 2015-2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	BASELINE	TARGET	VARIABEL PENGUKURAN	CARA PENGUKURAN		
					KONDISI SAMPAI DENGAN TAHUN 2014		
					URAIAN	%	
Meningkatnya dukungan untuk ketahanan air	Tingkat dukungan untuk ketahanan air nasional (%)	28,95%	67,60%	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Kehidupan sehari-hari	Kapasitas penyediaan air baku mencapai 51,44 m ³ /dt atau sekitar 66,35% penduduk di Indonesia mendapatkan akses air baku.	66,35%	
				Peningkatan KapasitasTampung Per Kapita	Dengan jumlah penduduk tahun 2014 sebesar 252.164.800 jiwa, kapasitas tampungan sampai tahun 2014 sebesar 12,68 miliar m ³ , tampungan per kapita adalah 50 m ³ per kapita. Sementara idealnya adalah 1.975 m ³ per kapita per tahun. Kondisi ini baru 2,5 % dari ideal.	2,50%	
				Peningkatan Layanan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air	Panjang pengendali banjir yang dibangun hingga tahun 2014 adalah 1.447,94 km atau melindungi sekitar 36.199 Ha (LAKIP 2014). Ini berarti baru sekitar 18% dari 200.000 Ha yang harus dilindungi.	18%	
Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi	Tingkat dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi (%)	45,83%	57,28%	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk layanan irigasi	Pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk 252.034.317 jiwa dan kebutuhan beras per kapita adalah 139,15 kg/jiwa. Maka kebutuhan total adalah 62,6 juta ton GKG. Berdasarkan Kepmen No. 293/2014 total daerah irigasi permukaan 7.145.168 Ha. Dengan asumsi produktivitas 5,16 GKG/Ha, IP 1,43 dan alih fungsi lahan 100.000 Ha/tahun, maka total produksi adalah 51,9 juta ton GKG. Ini berarti dukungan irigasi terhadap produksi beras adalah 83%.	83,0%	
				Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk layanan Irigasi	Kondisi daerah irigasi dalam keadaan baik (perbandingan luas daerah irigasi dalam kondisi baik dengan luas daerah irigasi total) sebesar 54,5 %.	54,5%	
				Peningkatan Potensi Sumber Energi	Sampai dengan tahun 2014, potensi energi yang dimiliki oleh bendungan-bendungan milik PU adalah 8.706 MW.	0%	

CARA PENGUKURAN		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PENGUKURAN	SATUAN	BASELINE	TARGET
KONDISI YANG AKAN DICAPAI TAHUN 2019							
URAIAN	%						
Sejalan dengan kebijakan pemenuhan penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar sebesar 100% dari tahun 2015 hingga tahun 2019, penyediaan air baku ditargetkan meningkat kapasitasnya menjadi 118,96 m3/dt.	100%	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	Penambahan kapasitas layanan sarana dan prasarana air baku	m ³ /detik	51,44	67,52
			Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula	Kapasitas layanan sarana dan prasarana air baku yang direhabilitasi	m ³ /detik	34,12	22,00
			Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	Kapasitas layanan sarana dan prasarana air baku yang dioperasikan dan dipelihara	m ³ /detik	47,47	94,75
Dengan perkiraan jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 255.947.272 jiwa, kapasitas tampungan sampai tahun 2019 sebesar 14,47 miliar m3, tampungan per kapita adalah 56,56 m3 per kapita. Sementara idealnya adalah 1.975 m3 per kapita per tahun. Kondisi ini baru 2,8 % dari ideal.	2,80%	Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air	Peningkatan kapasitas tampung sumber air	Volume tampungan 29 bendungan selesai dan embung hingga tahun 2019	juta m ³	12.679,25	14.474,10
			Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air	Volume tampungan bendungan dan embung yang direhabilitasi	juta m ³	5.989,62	3.593,00
			Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air	Volume tampungan bendungan dan embung yang dioperasikan dan dipelihara	juta m ³	12.679,25	16.569,60
Target panjang pengendali banjir yang dibangun hingga tahun 2019 adalah 3.000 km atau melindungi sekitar 200.000 Ha.	100%	Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air	Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Penambahan luas kawasan yang terlindungi (konversi dari panjang sarana dan prasarana pengendali banjir yang dibangun menjadi luas kawasan yang terlindungi)	Hektar	36.199,00	200.000,00
			Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air	Peningkatan persentase kawasan / lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas	%	-	100
			Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	Peningkatan indeks RBO (indeks)	Pengukuran terhadap 14 kriteria sebagaimana diatur pada Pedoman Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola SDA WS (RBO Performance Benchmarking)	indeks	2,24
Pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk 271.512.538 jiwa dan kebutuhan beras per kapita adalah 139,15 kg/jiwa. Maka kebutuhan total adalah 67,5 juta ton. Dengan asumsi tambahan daerah irigasi permukaan 879.232 Ha, total irigasi permukaan menjadi 8.024.400 Ha, produktivitas 5,16 GKG/Ha, IP meningkat menjadi 1,49 dan alih fungsi lahan 100.000 Ha/tahun, maka perkiraan total produksi tahun 2019 adalah 60,9 juta ton GKG. Ini berarti dukungan irigasi terhadap produksi beras adalah 90,3%.	86,12%	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Peningkatan layanan jaringan irigasi	Penambahan luas layanan jaringan irigasi baru kewenangan Pusat (irigasi permukaan, irigasi air tanah, irigasi rawa, irigasi tambak)	Hektar	677.851,00	471.790,81
				Penambahan luas layanan jaringan irigasi baru kewenangan Daerah (irigasi permukaan)	Hektar	-	616.157,03
			Seluruh daerah irigasi dalam kondisi baik (asumsi : memperhitungkan degradasi umur bangunan 5% per tahun).	84,11%	Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi	Peningkatan fungsi dan layanan jaringan irigasi	Luas layanan jaringan irigasi kewenangan Pusat yang direhabilitasi
Luas layanan jaringan irigasi kewenangan Daerah yang direhabilitasi	Hektar	-					1.064.471,76
Peningkatan fungsi dan layanan jaringan irigasi	84,11%	Peningkatan fungsi dan layanan jaringan irigasi	Peningkatan fungsi dan layanan jaringan irigasi	Luas layanan jaringan irigasi kewenangan Pusat yang direhabilitasi	Hektar	3.142.532,18	3.604.791,23
				Luas layanan jaringan irigasi kewenangan Daerah yang direhabilitasi	Hektar	-	-
Dengan selesainya pembangunan 29 bendungan hingga akhir 2019 diperkirakan terdapat tambahan potensi energi sebesar 142,52 MW.	2%	Meningkatnya potensi energi dari sumber-sumber air	Peningkatan potensi energi sumber air	Penambahan potensi energi dari 29 bendungan selesai	MW	8.706,00	8.848,52

TABEL RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 2015-2019

	BASELINE	TARGET					SASARAN PROGRAM
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Tingkat dukungan untuk ketahanan air nasional (%)	28,95	32,97	40,85	48,91	57,34	67,60	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Kehidupan sehari-hari
							Peningkatan Kapasitas Tampung Per Kapita
							Peningkatan Layanan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air
Tingkat dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi (%)	45,83%	52,66%	53,93%	55,15%	56,33%	57,28%	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk layanan Irigasi
							Peningkatan Potensi Sumber Energi

		SATUAN	BASELINE	TARGET					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	PENAMBAHAN	m ³ /dt	51,44	8,65	1200	1187	13,00	22,00	67,52
	MENJADI	m ³ /dt		60,09	7209	83,96	96,96	118,96	
	PROSENTASE	%	66,35	70,66	76,64	82,56	89,04	100,00	
	PENAMBAHAN	juta m3	12,679	1,020	1	103	147	524	1,795
	MENJADI	juta m3		13,700	13,701	13,803	13,950	14,474	
	PROSENTASE	%	2,5	2,67	2,67	2,69	2,71	2,80	
	PENAMBAHAN	Ha	36,199	18,951	44,267	45,667	47,067	49,383	205,333
	MENJADI	Ha		55,150	99,416	145,083	192,150	241,532	
	PROSENTASE	%	18,00	25,57	43,25	6148	80,28	100,00	
	PENAMBAHAN	Ha		181,283	244,962	208,150	236,848	216,705	1,087,948
	MENJADI	Ha	1,844,066	2,025,349	2,270,311	2,478,461	2,715,309	2,932,014	
	PROSENTASE	%	83.00%	85.16%	85.42%	85.64%	85.89%	86.12%	
	PENAMBAHAN	Ha	5,141,407	477,961	691,490	676,103	644,548	509,899	3,000,000
	MENJADI	Ha	2,802,067	3,280,028	3,971,518	4,647,620	5,292,168	5,802,067	
	PROSENTASE	%	54,50%	71,24%	74,77%	78,22%	81,51%	84,11%	
	PENAMBAHAN	MW		113,19	-	1,14	5,92	22,27	142,52
	MENJADI	MW	8,706.00	8,819.19	8,819.19	8,820.33	8,826.25	8,848.52	
	PROSENTASE	%	0%	1,59470%	1,59470%	1,59490%	1,59597%	1,60%	

TABEL L2 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
RENSTRA DITJEN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2015 - 2019

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM 10 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR						
UNIT ORGANISASI : DITJEN SUMBER DAYA AIR						
SASARAN PROGRAM						
1	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku					
1	Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	m ³ /detik	8,65	12,00	11,87	13,00
2	Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula	m ³ /detik	8,20	1,70	2,29	2,96
3	Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	m ³ /detik	49,23	57,88	69,88	81,75
2	Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air					
1	Peningkatan kapasitas tampung sumber air	juta m ³	1.020,38	1,09	102,61	146,62
2	Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air	juta m ³	376,80	766,40	752,80	756,00
3	Terjaganya kapasitas tampung sumber air	juta m ³	12.679	13.700	13.701	13.803
3	Meningkatnya kinerja layanan irigasi					
1	Peningkatan layanan jaringan irigasi	hektar	181.282,79	244.962,37	208.149,70	236.847,95
2	Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi	hektar	477.960,57	691.490,27	676.102,61	644.548,04
3	Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	hektar	3.142.532,18	3.345.174,05	3.424.361,90	3.519.694,19
4	Persentase daerah irigasi yang diairi oleh bendungan	%	11	12	12	12,6

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			30.812.502,25	62.715.168,33	70.356.255,69	76.286.873,04	76.390.980,94	316.561.780,25
	22,00	67,52						
	6,84	22,00						
	94,75	94,75						
	524,15	1.794,85						
	758,00	3.410,00						
	13.950	13.950						
	216.705,03	1.087.947,84						
	509.898,51	3.000.000,00						
	3.604.791,23	3.604.791,23						
	12,6	12,6						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM 10 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR						
UNIT ORGANISASI : DITJEN SUMBER DAYA AIR						
SASARAN PROGRAM						
4	Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air					
1	Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	hektar	18.951	44.267	45.667	47.067
5	Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air					
1	Peningkatan pesentase kawasan/lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas	%	20	20	20	20
6	Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA					
1	Peningkatan indeks RBO (indeks)	indeks	2,24	2,59	2,94	3,29
7	Meningkatnya potensi energi dari sumber-sumber air					
1	Peningkatan potensi sumber air	MW	113,19	0,00	1,14	5,92
KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN WADAH KOORDINASI SDA DI TINGKAT NASIONAL						
UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT HARIAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL						
SASARAN KEGIATAN						
1	NSPK pelaksanaan tugas sekretariat Dewan SDAN					
1	Jumlah NSPK dukungan pelaksanaan tugas sekretariat Dewan SDAN	N/S/P/K	1	1	1	1
2	Layanan dukungan manajemen pelaksanaan tugas sekretariat Dewan SDAN					
1	Jumlah masukan DSDAN yang dirumuskan	dokumen		1	1	1

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			30.812.502,25	62.715.168,33	70.356.255,69	76.286.873,04	76.390.980,94	316.561.780,25
	49.383	200.000						
	20	100,00						
	4,00	4,00						
	22,27	142,52						
			12.906,00	13.195,10	14.118,75	15.107,07	16.164,56	71.491,48
			-	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	1	5						
			3.907,83	3.297,86	3.429,72	3.560,91	3.690,40	17.886,72
	1	110						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7

KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN DSDAN

UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT HARIAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

SASARAN KEGIATAN

3	Kebijakan nasional pengelolaan SDA yang disusun/direview						
1	Jumlah dokumen kebijakan nasional yang disusun/direview	dokumen		1	1	1	
4	Layanan perkantoran						
1	Jumlah bulan layanan	bulan		12	12	12	12

KEGIATAN 2: PEMBINAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN SDA

SASARAN KEGIATAN

1	NSPK perencanaan dan pemrograman SDA						
1	Jumlah NSPK perencanaan dan pemrograman SDA	N/S/P/K		1	1	1	1
2	Layanan teknis perencanaan dan pemrograman SDA						
1	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan pemrograman dan penganggaran	Pemda/masyarakat/dunia usaha		5	5	5	5
3	Layanan dukungan manajemen perencanaan dan pemrograman SDA						
1	Jumlah BBWS/BWS yang diberikan dukungan manajemen perencanaan dan pemrograman SDA	BBWS/BWS		33	33	33	33
4	Layanan perkantoran						
1	Jumlah bulan layanan	bulan		12	12	12	12

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			12.906,00	13.195,10	14.118,75	15,107,07	16.164,56	71.491,48
			6.453,00	6.097,55	6.509,38	6.948,53	7.416,78	33.425,24
	1	4						
			2.545	2.800	3.080	3.388	3.726	15.539
	12	12						
			74.471,86	76.140,03	81.469,84	87.172,72	93.274,81	412.529,27
			536,37	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	5.177,37
	1	5						
			-	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
	5	20						
			48.282	44.922	46.330	47.818	49.385	236.737
	33	33						
			25.653	28.218	31,040	34.144	37.559	156.615
	12	12						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7

KEGIATAN 3: PEMBINAAN PENATAGUNAAN SDA

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA PENATAGUNAAN SDA

SASARAN KEGIATAN

1	NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu							
1	Jumlah NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu	N/S/P/K		1	1	1	1	
2	Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu							
1	Jumlah BBWS/BWS yang diberikan dukungan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu	BBWS/BWS		33	33	33	33	
3	Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu							
1	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan pengelolaan SDA WS, pengelolaan hidrologi WS dan kualitas air sumber air, pembinaan kelembagaan, penyusunan sistem pola investasi serta pembinaan pengendalian pemanfaatan SDA	Pemda/masyarakat/dunia usaha			5	5	5	
4	Layanan perkantoran							
1	Jumlah bulan layanan	bulan		12	12	12	12	

KEGIATAN 4: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA

UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA

SASARAN KEGIATAN

1	NSPK penyusunan peraturan perundang-undangan dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, tata usaha, informasi publik, dan lahan							
1	Jumlah NSPK penyusunan regulasi dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, tata usaha, informasi publik, dan lahan	N/S/P/K		5	5	5	5	

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			106.658,81	102.913,57	70.117,52	77.825,74	86.073,55	443.589,18
			9.143,65	10.058	11.064	12.170	13.387	55.823
	1	5						
			80.740,16	44.023	9.801	24.544	27.394	186.502
	33	33						
			-	30.380	28.955	18.784	20.732	98.851
	5	20						
			16.775	18.453	20.298	22.328	24.560	102.413
	12	12						
			565.306,92	577.969,80	618.427,68	661.717,62	708.037,85	3.131.459,87
			478,77	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	5.078,77
	5	25						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 4: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA						
UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA						
SASARAN KEGIATAN						
2	Layanan teknis peraturan perundang-undangan dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, tata usaha, informasi publik, dan lahan					
1	Jumlah BBWS/BWS/pegawai yang diberi bimbingan teknis regulasi dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, tata usaha, informasi publik, dan lahan	Pemda/ masyarakat/ pegawai		10	10	10
3	Layanan dukungan manajemen peraturan perundang-undangan dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, tata usaha, informasi publik, dan lahan					
1	Jumlah BBWS/BWS yang diberikan dukungan manajemen regulasi dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, tata usaha, informasi publik, dan lahan	BBWS/BWS		33	33	33
4	Layanan perkantoran					
1	Jumlah bulan layanan	bulan		12	12	12
KEGIATAN 5: PEMBINAAN IRIGASI PERMUKAAN, RAWA, DAN TAMBAK						
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA						
SASARAN KEGIATAN						
1	NSPK irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak					
1	Jumlah NSPK irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak	N/S/P/K		1	1	1
2	Layanan teknis irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak					
1	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		5	5	5

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			565.306,92	577.969,80	618.427,68	661.717,62	708.037,85	3.131.459,87
			-	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
	10	40						
			58.626	64.143	74.093	100.867	129.591	427.319
	33	33						
			506.202	510.827	540.235	555.651	572.147	2.685.062
	12	12						
			172.112,526	121.010,645	147.672,565	158.009,645	169.070,320	767.875,702
			3.943,78	2.000	2.000	2.420	2.662	13.226
	1	5						
			-	43.642	43.642	46.677	49.922	183.883
	5	20						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 5: PEMBINAAN IRIGASI PERMUKAAN, RAWA, DAN TAMBAK						
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA						
SASARAN KEGIATAN						
3 Layanan teknis pemenuhan SPM irigasi di Daerah						
1	Jumlah Pemda yang diberi bimbingan/bantuan teknis dalam pemenuhan SPM irigasi di Daerah	Pemda		5	5	5
4 Layanan teknis irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak						
1	Layanan dukungan manajemen dan teknis pembangunan, persiapan OP dan rehabilitasi irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak	BBWS/BWS		33	33	33
5 Layanan perkantoran						
1	Jumlah bulan layanan	bulan		12	12	12
KEGIATAN 6: PEMBINAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA						
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN						
SASARAN KEGIATAN						
1 NSPK OP sarana prasarana SDA						
1	Jumlah NSPK pelaksanaan OP sarana prasarana SDA	N/S/P/K		5	5	5
2 Layanan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasarana SDA						
1	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasarana SDA	Pemda/masyarakat/dunia usaha		25	25	25
3 Layanan dukungan manajemen dan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasarana SDA						
1	Jumlah BBWS/BWS yang diberi dukungan manajemen dan teknis OP sarana dan prasarana SDA	BBWS/BWS		33	33	33
4 Layanan dukungan manajemen dan teknis penyusunan dan penetapan peta kawasan rawan bencana						
1	Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis penyusunan peta kawasan rawan bencana	BBWS/BWS		33	33	33

			Target		Anggaran (Juta)					
			2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
			8	9	10	11	12	13	14	15
					172.112,526	121.010,645	147.672,565	158.009,645	169.070,320	767.875,702
					-	2.000,000	3.000,000	4.000,000	5.000,000	14.000,000
	5	20								
					119.139,387	44.368,875	67.830,796	70.912,752	74.485,824	376.738
	33	20								
					49.029	29.000	31.000	34.000	37.000	180.029
	12	12								
					938.787,46	787.512,82	842.638,72	901.623,43	964.737,07	4.435.299,50
					12.557,33	13.813	15.194	16.714	18.385	76.664
	5	25								
					-	192.568	209.122	227.684	247.322	876.697
	25	100								
					303.733,91	169.923	200.377	232.719	267.057	1.173.810
	33	33								
					-	2.000	2.200	2.420.719	2.662	9.282
	33	33								

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7

KEGIATAN 6: PEMBINAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

SASARAN KEGIATAN

5	Fasilitasi penyediaan peralatan pendukung operasi dan pemeliharaan yang dilaksanakan						
1	Jumlah peralatan yang difasilitasi	unit			1	1	1
2	Jumlah bahan banjir yang difasilitasi	unit			33	33	33
6	Layanan dukungan manajemen dan teknis tanggap darurat bencana						
1	Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis tanggap darurat bencana	BBWS/BWS			33	33	33
7	Layanan perkantoran						
1	Jumlah bulan layanan	Bulan			12	12	12

KEGIATAN 7: PEMBINAAN PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN PANTAI

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI

SASARAN KEGIATAN

1	NSPK pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai						
1	Jumlah NSPK pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	N/S/P/K			1	1	1
2	Layanan dukungan manajemen dan teknis tanggap darurat bencana						
1	Layanan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	Pemda/masyarakat/dunia usaha			5	5	5
3	Layanan teknis pemenuhan SPM drainase di daerah						
1	Jumlah Pemda yang diberi bimbingan/bantuan teknis dalam pemenuhan SPM drainase di daerah	Pemda			20	20	20
4	Layanan dukungan manajemen dan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai						
1	Jumlah BBWS/BWS yang diberi layanan dukungan manajemen dan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	BBWS/BWS			33	33	33

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			938.787,46	787.512,82	842.638,72	901.623,43	964.737,07	4.435.299,50
			-	39.542	39.111	37.789	36.583	153.025
	1	4						
	33	33						
			559.162,39	300.000	300.000	300.000	300.000	1.759.162
	33	33						
			63.334	69.667	76.634	84.297	92.727	386.659
	12	12						
			108.147,77	90.348,49	112.405,82	116.744,23	121.491,32	549.137,62
			-	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
	1	5						
			-	2.000	3.000	4.000	5.000	14.000
	5	20						
				2.000	3.000	4.000	5.000	14.000
	20	80						
			33.926	52.348	66.206	66.824	67.829	287.134
	33	33						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 7: PEMBINAAN PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN PANTAI						
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI						
SASARAN KEGIATAN						
5 Layanan teknis desain pengendalian banjir						
1	Jumlah BBBWS/BWS yang diberi bimbingan/bantuan teknis desain pengendalian banjir	BBWS/BWS		33	33	33
6 Layanan perkantoran						
1	Jumlah bulan layanan	Bulan	12	12	12	12
KEGIATAN 8: PEMBINAAN KEAMANAN BENDUNGAN						
UNIT ORGANISASI : BALAI BENDUNGAN						
SASARAN KEGIATAN						
1 NSPK keamanan bendungan						
1	Jumlah NSPK keamanan bendungan	N/S/P/K	1	1	1	1
2 Layanan teknis keamanan bendungan						
1	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis keamanan bendungan	Pemda/masyarakat/dunia usaha		5	5	5
3 Layanan dukungan manajemen dan teknis keamanan bendungan						
1	Jumlah BBWS/BWS yang diberi dukungan manajemen dan teknis keamanan bendungan	Pemda	20	20	20	20
4 Layanan perkantoran						
1	Jumlah bulan layanan	Bulan	12	12	12	12
KEGIATAN 9: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN, RAWA DAN TAMBAK						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
1 Layanan teknis irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak						
1	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak	Pemda/masyarakat/dunia usaha		5	5	5

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			108.147,77	90.348,49	112.405,82	116.744,23	121.491,32	549.137,62
				2.000	3.000	4.000	5.000	14.000
	33	33						
			74.222	30.000	35.000	35.500	36.000	210.722
	12	12						
			18.980,00	19.405,15	20.763,51	22.216,96	23.772,15	105.137,77
			2.262,08	2.488,29	2.737,12	3.010,83	3.311,91	13.810,22
	1	5						
			-	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	5	20						
			14.172,75	14.017,18	14.846,74	15.718,51	16.633,85	75.389,03
	20	20						
			2.545	2.800	3.080	3.388	3.726	15.539
	12	12						
			8.458.828,13	18.824.933,24	17.577.259,57	20.349.097,28	16.216.742,38	81.426.860,61
			3.864,787	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.904.786,84
	5	20						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 9: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN, RAWA DAN TAMBAK						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
1 Layanan teknis irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak						
2	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan OP irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak	Pemda/masyarakat/dunia usaha		5	5	5
2 Tanah untuk konstruksi bendung dan irigasi permukaan kewenangan Pusat, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dibebaskan						
1	Luas tanah yang dibebaskan	hektar	4.912,83	5.646,80	5.023,64	4.415,95
3 Rencana teknis dan dokumen lingkungan bendung dan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dibangun dan ditingkatkan/direhabilitasi						
1	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendung dan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dibangun dan ditingkatkan/direhabilitasi	dokumen	44	50	50	50
4 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dilaksanakan konstruksinya						
1	Panjang konstruksi jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dilaksanakan	km	2.602,28	411,34	381,45	386,92
5 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang diairi oleh bendungan						
1	Panjang konstruksi jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang diairi oleh bendungan yang dilaksanakan	km	-	10	10	10
6 Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dilaksanakan konstruksinya						
1	Jumlah konstruksi bendung irigasi kewenangan Pusat yang dilaksanakan	bendung	24,00	2,00	6,00	3,00
7 Tanah untuk konstruksi bendung dan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dibebaskan						
1	Luas tanah yang dibebaskan	hektar	-	7.222	7.280	6.409
8 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dilaksanakan konstruksinya *						
1	Panjang jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dilaksanakan konstruksinya	km	-	3.576,74	2.499,38	3.251,73

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			8.458.828,13	18.824.933,24	17.577.259,57	20.349.097,28	16.216.742,38	81.426.860,61
			3.864.787	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.904.786,84
	5	20						
				500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	3.742,93	23.742,15						
				10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	50	244						
				872.960	671.668	938.433	729.607	3.212.668,53
	378,82	4,160.80						
				175.267	116.350	174.446	113.645	579.708
	10	10						
			-	397.988	414.196	630.988	287.583	1.730.754
	3,00	38,00						
			-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	5.768	26,679						
			-	8.941.852	6.359.047	8.239.922	7.598.788	31.139.609,36
	2.995,28	12,323.14						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 9: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN, RAWA DAN TAMBAK						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
9	Bendung irigasi kewenangan Daerah yang dilaksanakan konstruksinya *					
1	Jumlah konstruksi bendung irigasi kewenangan Daerah yang dilaksanakan	bendung	-	12,00	9,00	14,00
10	Jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan konstruksinya					
1	Panjang jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan konstruksinya	km	397,48	382,01	568,09	490,33
11	Jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan konstruksinya					
1	Panjang jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan konstruksinya	km	82,16	24,12	24,00	24,00
12	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi					
1	Panjang konstruksi jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi	km	6.460,53	3.899,70	3.723,40	3.477,20
13	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi					
1	Jumlah konstruksi bendung irigasi kewenangan Pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi	bendung	4	11	8	9
14	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi *					
1	Panjang konstruksi jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi	km	-	5.400,86	5.917,36	5.816,33
15	Bendung irigasi kewenangan Daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi *					
1	Jumlah konstruksi bendung irigasi kewenangan Daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi	bendung	-	11	9	6

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			8.458.828,13	18.824.933,24	17.577.259,57	20.349.097,28	16.216.742,38	81.426.860,61
			-	240.000	270.000	520.000	270.000	1.300.000
	9,00	44,00						
			516.409,74	764.024	1.136.179	980.662	889.162	4.286.437
	444,58	2.282,49						
			121.104,42	40.788	45.288	43.913	16.500	267.594
	4,00	158,28						
			3.001.944,09	1.659.131	1.726.288	1.999.456	1.372.517	9.759.335
	2.601,93	20.162,76						
			-	22.000	16.000	18.000	14.000	70.000
	7	39						
			-	1.779.723	2.669.584	2.669.584	1.547.055	8.665.947
	4.154,89	21.289,44						
			-	22.000	18.000	12.000	16.000	68.000
	8	34						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7

KEGIATAN 9: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN, RAWA DAN TAMBAK

UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS

SASARAN KEGIATAN

16	Jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan/direhabilitasi						
1	Panjang konstruksi jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan/direhabilitasi	km		1.203,91	2.025,69	1.715,89	1.598,36
17	Jaringan irigasi tambak yang ditingkatkan/direhabilitasi						
1	Panjang konstruksi jaringan irigasi tambak yang ditingkatkan/direhabilitasi	km		295,75	154,75	145,52	132,36
18	Kawasan rawa yang dikonservasi						
1	Jumlah kawasan rawa yang dikonservasi	kawasan		0,00	8,00	8,00	9,00
19	Layanan perkantoran						
1	Jumlah bulan layanan	bulan		12	12	12	12

KEGIATAN 10: PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN PANTAI

UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS

SASARAN KEGIATAN

1	Layanan teknis Pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai						
1	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	Pemda/masyarakat/dunia usaha		-	5	5	5
2	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan OP pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	Pemda/masyarakat/dunia usaha		-	5	5	5

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			8.458.828,13	18.824.933,24	17.577.259,57	20.349.097,28	16.216.742,38	81.426.860,61
	1.549,45	8.093,30	665.917,21	2.430.386	2.662.813	2.617.348	1.869.699	10.246.163
	109,41	837,78	201.635,99	203.081	186.541	188.508	164.766	944.531
				160.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	680.000,00
	9,00	34,00						
			87.030	95.733	105.306	115.837	127.420	531.326
	12	12						
			8.269.736,96	12.685.149,44	15.129.133,10	15.529.314,04	17.501.850,70	69.115.184,24
			5.042.159,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.082.159,20
	5	20						
	5	20						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 10: PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN PANTAI						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
2 Tanah untuk konstruksi bangunan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dibebaskan						
1	Luas tanah yang dibebaskan	hektar	510	1.005	1.505	1.505
3 Rencana teknis dan dokumen lingkungan konstruksi bangunan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi						
1	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bangunan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi	dokumen	41	49	49	49
4 Normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan						
1	Panjang konstruksi normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dilaksanakan	km	284.26	496.00	511.00	527.00
5 Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan						
1	Panjang konstruksi bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang dilaksanakan	km	0.00	168.00	174.00	179.00
6 Panjang kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan						
1	Panjang konstruksi kanal banjir yang dilaksanakan	km		3	3	2
7 Stasiun pompa banjir yang dibangun						
1	Jumlah konstruksi stasiun pompa yang dilaksanakan	unit		3.00	2.00	2.00
8 Polder/kolam retensi yang dibangun						
1	Jumlah konstruksi polder/kolam retensi yang dilaksanakan	buah		2.00	2.00	2.00
9 Flood Forecasting & Warning System (FFWS) yang dikembangkan						
1	Jumlah BBWS/BWS yang memiliki FFWS	BBWS/BWS		10.00	10.00	10.00

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			8.269.736,96	12.685.149,44	15.129.133,10	15.529.314,04	17.501.850,70	69.115.184,24
				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
	1.500	6.025						
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	49	237						
				5.762.009,07	7.415.362,81	7.267.223,51	9.197.430,00	29.642.025,39
	493.74	2.312.00						
				-	1.199.736,97	1.730.919,37	1.692.295,46	2.409.245,82
	247.00	768.00						
				-	300.000,00	300.000,00	200.000,00	1.000.000,00
	2	10						
				-	150.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00
	2.00	9.00						
				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	2.00	8.00						
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	10.00	40.00						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 10: PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN PANTAI						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
10 Pengendali lahar gunung berapi yang dibangun/ditingkatkan						
1	Jumlah konstruksi pengendali lahar gunung berapi yang dilaksanakan	buah	60	55	63	64
11 Bangunan pemecah gelombang (<i>break water</i>) yang dibangun/ditingkatkan						
1	Panjang bangunan pemecah gelombang (<i>break water</i>) yang dibangun	km	61,11	84,77	1,25	1,25
12 Tembok penahan gelombang (<i>sea wall</i>) yang dibangun/ditingkatkan						
1	Panjang konstruksi tembok penahan gelombang (<i>sea wall</i>) yang dilaksanakan	km		1,25	88,99	156,43
13 Saluran drainase yang dibangun/ditingkatkan						
1	Panjang konstruksi saluran drainase yang dilaksanakan	km		1,00	1,00	1,00
14 Bangunan sarana prasarana drainase yang dibangun/ditingkatkan						
1	Jumlah konstruksi bangunan sarana prasarana drainase yang dilaksanakan	buah		1,00	1,00	1,00
15 Tanggul yang direhabilitasi						
1	Panjang konstruksi normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang direhabilitasi	km	126,31	135,21	225,00	149,00
16 Perkuatan tebing yang direhabilitasi						
1	Panjang konstruksi bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang direhabilitasi	km	0,00	60,00	75,00	60,00
17 Kanal banjir yang direhabilitasi						
1	Panjang konstruksi kanal banjir yang direhabilitasi	km		3	3	2

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			8.269.736,96	12.685.149,44	15.129.133,10	15.529.314,04	17.501.850,70	69.115.184,24
			410.502,79	617.394,49	612.424,28	455.549,27	522.713,45	2.618.584,27
	64	306						
			1.817.699,11	1.017.236,26	288.789,36	668.039,65	360.338,29	4.152.102,68
	1,25	149,63						
				172.603,10	1.067.922,00	1.877.171,74	1.604.350,00	4.722.046,84
	133,7	380,37						
				600.000,00	660.000,00	726.000,00	798.600,00	2.784.600,00
	1,00	4,00						
				200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
		-						
			539.206,30	1.126.286,25	1.226.681,73	1.007.507,32	898.138,50	4.797.820,10
	158,00	793,52						
				391.907,58	405.227,24	331.802,44	294.942,83	1.423.880,09
	64,75	259,75						
				15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	2	10						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 10: PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN PANTAI						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
18 Stasiun pompa banjir yang direhabilitasi						
1	Jumlah konstruksi stasiun pompa yang direhabilitasi	unit		3,00	2,00	2,00
19 Polder/kolam retensi yang direhabilitasi						
1	Jumlah konstruksi polder/kolam retensi yang direhabilitasi	buah		1,00	1,00	1,00
20 Pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi						
1	Jumlah konstruksi pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi	buah	21	14	20	20
21 Bangunan pemecah gelombang (break water) yang direhabilitasi						
1	Panjang konstruksi bangunan pemecah gelombang (break water) yang direhabilitasi	km	0,87	2,70	3,03	2,55
22 Tembok penahan gelombang (sea wall) yang direhabilitasi						
1	Panjang tembok penahan gelombang (sea wall) yang direhabilitasi	km	-	0,10	0,10	0,10
23 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dibangun						
1	Jumlah konstruksi bangunan pengendali sedimen (<i>check dam</i>) yang dilaksanakan	buah	100	20	20	20
24 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi						
1	Jumlah konstruksi bangunan pengendali sedimen (<i>check dam</i>) yang direhabilitasi	buah	5	5	5	5
25 Sungai yang direstorasi						
1	Jumlah sungai yang direstorasi	sungai	13,00	7,00	7,00	7,00

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			8.269.736,96	12.685.149,44	15.129.133,10	15.529.314,04	17.501.850,70	69.115.184,24
				3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
	2,00	9,00						
				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	1,00	4,00						
			249.518,01	164.900,00	102.400,00	101.100,00	96.600,00	714.518,01
	20	95						
			8.816,24	29.000,00	124.723,00	66.473,00	42.525,00	271.537,24
	2,45	11,60						
				1.639,26	1.803,18	1.983,50	2.181,85	7.607,78
	0,10	0,40						
			28.814,74	20.000,00	23.000,00	26.000,00	29.000,00	126.814,74
	20	180						
			11.365	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	127.389,95
	5	25						
			107.622,47	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	317.622,47
	8,00	42,00						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target				
			2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	
KEGIATAN 10: PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN PANTAI							
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS							
SASARAN KEGIATAN							
26 Sungai dan garis sempadannya yang diupayakan perlingkungannya							
1	Jumlah sungai dan garis sempadannya yang diupayakan perlingkungannya	sungai		20.00	20.00	20.00	
27 Layanan perkantoran							
1	Jumlah bulan layanan	Bulan	12	12	12	12	
KEGIATAN 11: PENINGKATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN SDA TERPADU							
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS							
SASARAN KEGIATAN							
1 Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu							
1	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis pengelolaan SDA terpadu	Pemda/masyarakat/dunia usaha	-	10	10	10	
2 Komunikasi dan layanan publik yang diselenggarakan							
1	Persentase peningkatan penyelenggaraan komunikasi dan layanan publik	%	-	20	20	20	
3 Sistem data dan informasi SDA yang diselenggarakan							
1	Persentase peningkatan penyelenggaraan SISDA	%	-	20	20	20	
2	Persentase penyelenggaraan monitoring banjir dan kekeringan	%		100	100	100	
4 Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview							
1	Jumlah pola pengelolaan SDA WS kewenangan pusat yang disusun/direview	dokumen	10	10	6	6	
2	Jumlah rencana pengelolaan SDA WS kewenangan pusat yang disusun/direview	dokumen	4	5	6	5	

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			8.269.736,96	12.685.149,44	15.129.133,10	15.529.314,04	17.501.850,70	69.115.184,24
				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	20,00	80,00						
			54.033	59.436	65.380	71.918	79.110	329.878
	12	12						
			1.300.755,79	1.250.281,21	1.261.046,21	1.298.517,71	1.215.861,36	6.326.462,26
			905.815,40	914.721,21	921.971,21	950.385,21	852.575,61	4.545.468,62
	10	40						
				43.890,00	47.643,75	52.408,13	57.071,44	201.013,31
	20	80						
				91.670,00	102.931,25	117.224,38	131.214,31	443.039,94
	20	80						
	100	100						
				40.000,00	28.500,00	18.500,00	15.000,00	102.000,00
	5	37						
	3	23						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7

KEGIATAN 11: PENINGKATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN SDA TERPADU

UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS

SASARAN KEGIATAN

5	Data hidrologi dan kualitas air yang dikelola						
1	Persentase peningkatan pengelolaan data hidrologi dan kualitas air	%		-	20	20	20
6	Rekomendasi teknis yang diberikan						
1	Persentase layanan rekomendasi teknis yang diberikan	%		-	20	20	20
7	Alokasi air yang diberikan						
1	Persentase layanan alokasi air yang diberikan	%		-	100	100	100
8	Pengelolaan BMN						
1	Persentase layanan pengelolaan BMN	%		-	100	100	100
9	Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya						
1	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga PSDA	%		-	20	20	20
10	Layanan perkantoran						
1	Jumlah bulan layanan	bulan		12	12	12	12

KEGIATAN 12: PENGELOLAAN BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS

SASARAN KEGIATAN

1	Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya						
1	Jumlah Pemda/masyarakat / dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	5	5	5

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			1.300.755,79	1.250.281,21	1.272.546,21	1.320.017,71	1.360.861,36	6.504.462,26
				60.000,00	58.000,00	55.800,00	53.380,00	227.180,00
	20	80						
				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	20	80						
				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	100	100						
				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	100	100						
				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	20	80						
			394.940	20.000	22.000	24.200	26.620	487.760
	12	12						
			5.492.459,94	12.761.818,41	20.071.889,95	21.329.713,95	22.634.392,31	82.290.274,55
			4.336.153	10.000	10.000	10.000	10.000	4.376.153
	5	20						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 12: PENGELOLAAN BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
1 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya						
2	Jumlah Pemda/masyarakat / dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan OP bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha	-	5	5	5
2 Tanah untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibebaskan						
1	Luas tanah yang dibebaskan	hektar	2.094	5.862	11.403	12.074
3 Rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun dan ditingkatkan/direhabilitasi						
1	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun dan ditingkatkan/direhabilitasi	dokumen	45	37	30	23
4 Bendungan baru yang dibangun						
1	Jumlah konstruksi bendungan baru yang dilaksanakan	bendungan	13	8	9	11
5 Bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going)						
1	Jumlah konstruksi bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going)	bendungan	16 on going/ 13 baru/6 selesai	23 on going/ 8 baru /1 selesai	30 on going/9 baru /5 selesai	34 on going/11 baru /9 selesai
6 Prasarana sumber energi yang dibangun						
1	Jumlah konstruksi prasarana sumber energi yang dilaksanakan	buah			5	5
7 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan						
1	Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan	buah	309	114	190	225

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			5.492.459,94	12.761.818,41	20.071.889,95	21.329.713,95	22.634.392,31	82.290.274,55
			4.336.153	10.000	10.000	10.000	10.000	4.376.153
	5	20						
				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
	12.074	43.507						
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	22	157						
				4.912.885,18	5.216.998,85	6.186.425,77	7.708.222,70	24.024.533
	8	49						
	36 on going/8 baru /8 selesai	65 On Going/49 Baru/ 29 Selesai		4.322.914,92	10.450.333,56	10.368.727,70	9.856.153,08	34.998.129
	36	65						
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	5	15						
				734.075,70	1.160.000,00	1.900.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00
	250	1.088						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 12: PENGELOLAAN BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
8 Bendungan yang direhabilitasi						
1	Jumlah konstruksi bendungan yang direhabilitasi	bendungan	5	10	10	10
9 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi						
1	Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi	buah	59	182	114	130
10 Danau yang direvitalisasi						
1	Jumlah danau yang direvitalisasi	danau	2,00	5,00	6,00	6,00
11 Danau dan garis sempadannya yang diupayakan perlindungannya						
1	Jumlah danau dan garis sempadannya yang diupayakan perlindungannya	danau		6,00	6,00	6,00
12 Mata air yang dilindungi						
1	Jumlah mata air yang dilindungi	mata air		5,00	5,00	5,00
13 Layanan perkantoran						
1	Jumlah bulan layanan	bulan	12	12	12	12
KEGIATAN 13: PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR BAKU						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
1 Layanan teknis sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku						
1	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	Pemda/masyarakat/dunia usaha	-	5	5	5

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			5.492.459,94	12.761.818,41	20.071.889,95	21.329.713,95	22.634.392,31	82.290.274,55
			152.127,55	78.223,83	81.379,80	283.444,11	222.351,46	817.527
	10	45						
			149.111,66	712.703,17	793.577,29	606.555,89	707.648,54	2.969.597
	140	625						
			80.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.230.000,00
	6,00	25,00						
				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
	6,00	24,00						
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	5,00	20,00						
			40.992	45.091	49.600	54.560	60.017	250.261
	12	12						
			3.077.456,95	5.880.770,60	5.885.436,62	6.026.195,29	5.726.477,36	26.596.336,82
			2.334.443	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.374.443,36
	5	20						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 13: PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR BAKU						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
1 Layanan teknis sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku						
2	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi pemberian bimbingan teknis perencanaan OP sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	Pemda/masyarakat/dunia usaha	-	5	5	5
2 Tanah untuk konstruksi sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku yang dibebaskan						
1	Luas tanah yang dibebaskan	hektar	6	11	11	11
3 Rencana teknis dan dokumen lingkungan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi						
1	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi	dokumen	30	36	36	36
4 Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun/ditingkatkan						
1	Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang dilaksanakan	titik	5	5	5	5
5 Embung untuk air baku yang dibangun/ditingkatkan						
1	Jumlah konstruksi embung untuk air baku yang dilaksanakan	buah	18	20	20	20
6 Saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan						
1	Panjang konstruksi saluran pembawa yang dilaksanakan	km	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Intake air baku yang dibangun/ditingkatkan						
1	Jumlah konstruksi intake air baku yang dilaksanakan	buah	100,00	100,00	100,00	100,00

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			3.077.456,95	5.880.770,60	5.885.436,62	6.026.195,29	5.726.477,36	26.596.336,82
			2.334.443	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.374.443,36
	5	20						
				200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
	11	50						
				10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	36	174						
				2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
	5	25						
				200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
	20	98						
				4.166.270	4.172.236	4.479.030	3.898.628	16.716.164
	1.000,00	5.000,00						
	100,00	500,00						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 13: PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR BAKU						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
8 Sumur JIAT yang dibangun/ditingkatkan						
1	Jumlah konstruksi sumur JIAT yang dilaksanakan	titik	106,00	164,00	174,00	116,00
9 Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun						
1	Panjang konstruksi Jaringan Irigasi Air Tanah yang dilaksanakan	km	320,50	494,50	489,93	348,20
10 Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi						
1	Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi	titik	-	15	15	15
11 Embung untuk air baku yang direhabilitasi						
1	Jumlah konstruksi embung untuk air baku yang direhabilitasi	buah	6	5	5	5
12 Saluran pembawa yang direhabilitasi						
1	Panjang konstruksi saluran pembawa yang direhabilitasi	km	1.616,42	146,67	240,46	462,50
13 Intake air baku yang direhabilitasi						
1	Jumlah konstruksi intake air baku yang selesai direhabilitasi	buah	226	20	31	64
14 Sumur JIAT yang direhabilitasi						
1	Jumlah konstruksi sumur JIAT yang direhabilitasi	titik	306	328	308	263
15 Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi						
1	Panjang konstruksi Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi	km	496,801	841,928	792,328	679,928
16 Layanan perkantoran						
1	Jumlah bulan layanan	bulan	12	12	12	12

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			3.077.456,95	5.880.770,60	5.885.436,62	6.026.195,29	5.726.477,36	26.596.336,82
				82.000	87.000	58.000	53.500	280.500
	107,00	667,00						
			203.836,24	321.425	318.451	226.330	204.230	1.274.273
	314,20	1.967,33						
			-	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	15	60,0						
			-	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
	5	26						
			402.890	148.595	131.088	39.719	56.130	778.422
	1.425,42	3.891,47						
			-	40.160	62.168	12.800	429.680	660.808
	215	557						
			-	117.870	110.926	95.190	86.412	410.398
	238	1.443,00						
			117.255,91	50.516	47.540	40.796	37.034	293.141
	617,228	3.428,214						
			19.031	20.935	23.028	25.331	27.864	116.189
	12	12						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 14: OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SDA						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
1	Layanan teknis OP sarana prasarana SDA					
1	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana dan prasarana SDA	Pemda/masyarakat/dunia usaha	-	25	25	25
2	Bendungan yang dioperasikan dan dipelihara					
1	Bendungan yang dioperasikan dan dipelihara	bendungan	208	214	215	220
3	Unit pengelola bendungan yang difungsikan					
1	Jumlah unit pengelola bendungan yang difungsikan	unit		25	25	25
4	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara					
1	Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	buah	1.061	1.370	1.484	1.674
5	Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara					
1	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	titik	-	5,00	10,00	15,00
6	Embung untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara					
1	Jumlah embung untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	buah	-	18,00	38,00	58,00
7	Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara					
1	Jumlah intake air baku yang dioperasikan dan dipelihara	buah	-	100	200	300
2	Panjang saluran pembawa air baku yang dioperasikan dan dipelihara	km	-	1.000	1.000	1.000

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			2.215.893,14	9.418.135,47	8.554.341,96	9.548.627,11	10.616.188,23	40.353.185,90
			387.862,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	427.863
	25	25						
				1.271.870,25	1.385.641,61	1.609.969,72	1.821.727,07	6.089.209
	229	229						
				57.370,25	75.000,00	75.000,00	75.000,00	282.370
	25	25						
				274.000,06	296.800,06	334.800,06	379.800,06	1.285.400
	1,899	1,899						
			25.150,88	327.396	426.644	489.941	547.963	1.817.096
	20,00	20						
			25.150,88	327.396	426.644	489.941	547.963	1.817.096
	78,00	78						
			25.150,88	327.396	426.644	489.941	547.963	1.817.096
	400	400						
	1.000	1.000						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 14: OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SDA						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
8 Tanggul/tebing banjir yang dipelihara						
1	Panjang tanggul banjir yang dipelihara	km	2.728,30	2.212,50	2.708,50	3.219,50
9 Kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara						
1	Panjang konstruksi kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara	km		0	3	3
10 Stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara						
1	Jumlah konstruksi stasiun pompa yang dipelihara	unit	1,00	1,00	4,00	6,00
11 Polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara						
1	Jumlah konstruksi polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara	buah		0,00	2,00	4,00
12 Pengendali lahar gunung berapi yang dipelihara						
1	Jumlah pengendali lahar gunung berapi yang dipelihara	buah	267	327,00	382,00	445,00
13 Bangunan pengamanan pantai yang dipelihara						
1	Panjang konstruksi pengamanan pantai yang dipelihara	km	135,55	136,42	139,22	142,35
14 Flood Forecasting & Warning System (FFWS) yang dioperasikan dan dipelihara						
1	Jumlah BBWS/BWS yang mengoperasikan dan memelihara FFWS	BBWS/BWS	-	0,00	10,00	20,00
15 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dioperasikan dan dipelihara						
1	Jumlah bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dioperasikan dan dipelihara	buah	-	100,00	120,00	140,00
16 Sungai yang dipelihara						
1	Jumlah sungai yang dipelihara	sungai	-	13,00	20,00	20,00

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			2.215.893,14	9.418.135,47	8.554.341,96	9.548.627,11	10.616.188,23	40.353.185,90
			377.487,74	442.500,00	541.700,00	643.900,00	749.300,00	2.754.887,74
	3.746,50	3.747						
				-	12.000,00	12.000,00	8.000,00	32.000,00
	2	3						
				500,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	9.500,00
	8,00	8						
				-	1.500,00	3.000,00	4.500,00	9.000,00
	6,00	6						
			32.380,28	65.400,00	76.400,00	89.000,00	101.800,00	364.980,28
	509,00	509						
			60.943,15	68.210,00	69.610,00	71.175,00	72.500,00	342.438,15
	145,00	145						
			-	3.770.609	2.000.000	2.000.000	2.000,000	9.770.608,95
	30,00	30						
			0,00	20.000,00	24.000,00	28.000,00	32.000,00	104.000,00
	160,00	160						
			-	417.900,00	455.400,00	554.700,00	637.300,00	2.065.300,00
	20,00	20						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 14: OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SDA						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
17 Danau yang dipelihara						
1	Jumlah danau yang dipelihara	danau	0,00	2,00	7,00	10,00
18 Kawasan rawa yang dipelihara						
1	Panjang tanggul banjir yang dipelihara	kawasan	0,00	0,00	8,00	16,00
19 Mata air yang dipelihara						
1	Jumlah mata air yang dipelihara	mata air		0,00	5,00	10,00
20 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara						
1	Panjang jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	km	47.530	50.133	50.544	50.925
21 Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara						
1	Jumlah bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	bendung		24,00	2,00	6,00
22 Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara						
1	Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	km	7.034	7.431	7.813	8.381
23 Jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara						
1	Panjang jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara	km	259	555	710	855
24 Sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara						
1	Jumlah sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara	titik		106,00	270,00	444,00
23 Jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara						
1	Panjang Jaringan Irigasi Air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	km	3.673	3.993,20	4.487,70	4977,63

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			2.215.893,14	9.418.135,47	8.554.341,96	9.548.627,11	10.616.188,23	40.353.185,90
				600,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	8.700,00
	10,00	10						
				-	4.000,00	8.000,00	12.500,00	24.500,00
	25,00	25						
				-	500,00	1.000,00	1.500,00	3.000,00
	15,00	15						
			947.916	1.253.317	1.389.961	1.527.765	1.795.934	6.914.892,90
	51.312	51.312						
				4.800	500	1.200	600	7.100,00
	3,00	24						
			230.614	371.555	468.787	586.684	709.723	2.367.362,31
	8.872	8.872						
			37.620	27.749	42.583	59.866	79.007	246.825,66
	988	988						
			65.617	10.600	27.000	44.400	56.000	203.617,15
	560,00	560						
				19.966	26.926	34.843	42.607	124.342,18
	5.325,83	5.325,83						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
KEGIATAN 14: OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SDA						
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS						
SASARAN KEGIATAN						
26 Unit pengelola irigasi yang difungsikan						
1	Jumlah unit pengelola irigasi	unit		23,00	23,00	23,00
27 Peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan						
1	Jumlah WS yang memiliki peta kawasan rawan bencana	WS		16	16	16
28 Peralatan dan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan SDA						
1	Jumlah peralatan yang dioperasikan dan dipelihara	unit		16	16	16
2	Jumlah bangunan workshop yang dibangun dan dipelihara	buah		10	10	10
29 Kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air yang dilaksanakan						
1	Jumlah kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air	kegiatan		40,00	40,00	41,00
30 Layanan perkantoran						
1	Jumlah bulan layanan	bulan		12	12	12
KEGIATAN 15: PEMBINAAN BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA						
UNIT ORGANISASI: PUSAT BENDUNGAN						
SASARAN KEGIATAN						
1 NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya						
1	Jumlah NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	N/S/P/K		1	1	1
2 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya						
1	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	Pemda/masyarakat/dunia usaha		5	5	5

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			2.215.893,14	9.418.135,47	8.554.341,96	9.548.627,11	10.616.188,23	40.353.185,90
			-	77.000	80.000	85.000	85.000	327.000,00
	23,00	23						
			-	160.000	160.000	160.000	150.000	630.000,00
	15	16						
			-	32.000	32.000	32.000	30.000	126.000,00
	15	16						
	10	10						
			-	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	81.000,00
	41,00	162						
			-	60.000	70.000	80.000	90.000	300.000
	12	12						
			-	65.247,48	86.809,70	90.820,38	95.490,21	338.367,76
			-	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
	1	5						
			-	12.270	16.021	17.123	18.300	63.713
	5	20						

Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi	Target				
			2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	
3 Layanan dukungan manajemen dan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya							
1	Jumlah BBWS/BWS yang diberi layanan dukungan manajemen dan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	BBWS/BWS		33	33	33	
4 Layanan perkantoran							
1	Jumlah bulan layanan	bulan	12	12	12	12	
KEGIATAN 16: PEMBINAAN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR BAKU							
UNIT ORGANISASI: PUSAT AIR TANAH DAN AIR BAKU							
SASARAN KEGIATAN							
1 NSPK penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku							
1	Jumlah NSPK penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	N/S/P/K	1	1	1	1	
2 Layanan teknis pengelolaan air tanah dan air baku							
1	Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	Pemda/masyarakat/dunia usaha		5	5	5	
3 Layanan dukungan manajemen dan teknis pengelolaan air tanah dan air baku							
1	Jumlah BBWS/BWS yang diberi layanan dukungan manajemen dan teknis pengelolaan air tanah dan air baku	BBWS/BWS		33	33	33	
4 Layanan perkantoran							
1	Jumlah bulan layanan	bulan	12	12	12	12	

Keterangan :

- 1) * Merupakan kewenangan Daerah yang pendanaannya diusulkan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 2) * Merupakan tugas tambahan dari Menteri PUPR, belum dialokasikan pada pagu Renstra Rp 316 T
- 3) Usulan kebutuhan pendanaan dengan target sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 yang diusulkan Ditjen SDA adalah Rp 316,56 Trilyun. Berdasarkan Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, target yang ditetapkan sama, namun alokasi pendanaan turun menjadi Rp 208,58 Trilyun (selisih Rp 107,89 Trilyun). Apabila alokasi pendanaan sesuai dengan pendanaan pada RPJMN 2015-2019, maka beberapa target yang ditetapkan tidak dapat tercapai, antara lain : pembangunan bendungan, embung, pengendali banjir, pengaman pantai, dan rehabilitasi pengendali banjir

	Target		Anggaran (Juta)					
	2019	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	8	9	10	11	12	13	14	15
			-	28.629	37.383	39.953	42.699	148.665
	33	33						
			-	22.348	31.206	31.324	31.829	116.708
	12	12						
			-	40.336,88	49.224,19	52.669,88	56.356,77	198.587,73
			-	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
	1	5						
			-	6.501,064	9.107,257	10.074,965	11.108,432	36.792
	5	20						
			-	21.835,817	26.916,932	28.074,917	29.276,341	106.104
	33	33						
			-	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
	12	12						

Keterangan :

- 4) Terdapat perbedaan struktur kegiatan, sasaran kegiatan (output) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) dengan struktur yang ada pada RPJMN 2015-2019, dengan mempertimbangkan perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kaidah Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK). Beberapa output pada RPJMN 2015-2019 merupakan outcome (contoh: output jaringan irigasi yang dibangun, pada RPJMN 2015-2019 memiliki satuan hektar-outcome, sedangkan pada struktur yang baru memiliki satuan km-output). Namun demikian, hal-hal yang ditargetkan pada RPJMN 2015-2019 tetap dapat diukur menggunakan struktur yang baru.

TABEL DAFTAR DAERAH TERTINGGAL
RENSTRA DITJEN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2015 - 2019

NO.	KABUPATEN	PROVINSI
1	Aceh Singkil	NAD
2	Nias	SUMATERA UTARA
3	Nias Selatan	SUMATERA UTARA
4	Nias Utara	SUMATERA UTARA
5	Nias Barat	SUMATERA UTARA
6	Kepulauan Mentawai	SUMATERA BARAT
7	Solok Selatan	SUMATERA BARAT
8	Pasaman Barat	SUMATERA BARAT
9	Musi Rawas	SUMATERA SELATAN
10	Seluma	BENGKULU
11	Lampung Barat	LAMPUNG
12	Bondowoso	JAWA TIMUR
13	Situbondo	JAWA TIMUR
14	Bangkalan	JAWA TIMUR
15	Sampang	JAWA TIMUR
16	Pandeglang	BANTEN
17	Lebak	BANTEN
18	Lombok Barat	NUSA TENGGARA BARAT
19	Lombok Tengah	NUSA TENGGARA BARAT
20	Lombok Timur	NUSA TENGGARA BARAT
21	Sumbawa	NUSA TENGGARA BARAT
22	Dompu	NUSA TENGGARA BARAT
23	Bima	NUSA TENGGARA BARAT
24	Sumbawa Barat	NUSA TENGGARA BARAT
25	Lombok Utara	NUSA TENGGARA BARAT
26	Sumba Barat	NUSA TENGGARA TIMUR
27	Sumba Timur	NUSA TENGGARA TIMUR
28	Kupang	NUSA TENGGARA TIMUR
29	Timor Tengah Selatan	NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	KABUPATEN	PROVINSI
32	Alor	NUSA TENGGARA TIMUR
33	Lembata	NUSA TENGGARA TIMUR
34	Ende	NUSA TENGGARA TIMUR
35	Manggarai	NUSA TENGGARA TIMUR
36	Rote Ndao	NUSA TENGGARA TIMUR
37	Manggarai Barat	NUSA TENGGARA TIMUR
38	Sumba Barat Daya	NUSA TENGGARA TIMUR
39	Sumba Tengah	NUSA TENGGARA TIMUR
40	Nagekeo	NUSA TENGGARA TIMUR
41	Manggarai Timur	NUSA TENGGARA TIMUR
42	Sabu Raijua	NUSA TENGGARA TIMUR
43	Banggai Kepulauan	SULAWESI TENGAH
44	Donggala	SULAWESI TENGAH
45	Toli-Toli	SULAWESI TENGAH
46	Buol	SULAWESI TENGAH
47	Parigi Moutong	SULAWESI TENGAH
48	Toju Una-Una	SULAWESI TENGAH
49	Sigi	SULAWESI TENGAH
50	Jeneponto	SULAWESI TENGAH
51	Konawe	SULAWESI TENGAH
52	Bombana	SULAWESI TENGAH
53	Boalemo	GORONTALO
54	Pohuwato	GORONTALO
55	Gorontalo Utara	GORONTALO
56	Polewali Mandar	SULAWESI BARAT
57	Buru	MALUKU
58	Buru Selatan	MALUKU
59	Kepulauan Aru	MALUKU
60	Maluku Tengah	MALUKU

NO.	KABUPATEN	PROVINSI
63	Seram Bagian Barat	MALUKU
64	Seram Bagian Timur	MALUKU
65	Halmahera Barat	MALUKU UTARA
66	Halmahera Selatan	MALUKU UTARA
67	Halmahera Timur	MALUKU UTARA
68	Kepulauan Sula	MALUKU UTARA
69	Pulau Morotai	MALUKU UTARA
70	Sambas	KALIMANTAN BARAT
71	Bengkayang	KALIMANTAN BARAT
72	Landak	KALIMANTAN BARAT
73	Ketapang	KALIMANTAN BARAT
74	Sintang	KALIMANTAN BARAT
75	Kapuas Hulu	KALIMANTAN BARAT
76	Melawi	KALIMANTAN BARAT
77	Kayong Utara	KALIMANTAN BARAT
78	Seruyan	KALIMANTAN TENGAH
79	Hulu Sungai Utara	KALIMANTAN SELATAN
80	Nunukan	KALIMANTAN TIMUR
81	Teluk Wondama	PAPUA BARAT
82	Teluk Bintuni	PAPUA BARAT
83	Sorong Selatan	PAPUA BARAT
84	Sorong	PAPUA BARAT
85	Raja Ampat	PAPUA BARAT
86	Tambrauw	PAPUA BARAT
87	Maybrat	PAPUA BARAT
88	Merauke	PAPUA
89	Jayawijaya	PAPUA
90	Nabire	PAPUA
91	Kepulauan Yapen	PAPUA
92	Biak Numfor	PAPUA
93	Paniai	PAPUA

NO.	KABUPATEN	PROVINSI
94	PuncakJaya	PAPUA
95	BovenDigoel	PAPUA
96	Mappi	PAPUA
97	Asmat	PAPUA
98	Yahukimo	PAPUA
99	Pegunungan Bintang	PAPUA
100	Tolikara	PAPUA
101	Sarmi	PAPUA
102	Keerom	PAPUA
103	Waropen	PAPUA
104	Supiori	PAPUA
105	Mamberamo Raya	PAPUA
106	Nduga	PAPUA
107	Lanny Jaya	PAPUA
108	Mamberamo Tengah	PAPUA
109	Yalimo	PAPUA
110	Puncak	PAPUA
111	Dogiyai	PAPUA
112	Intan Jaya	PAPUA
113	Deiyai	PAPUA
114	Pulau Taliabu	MALUKU UTARA
115	Malaka	NUSA TENGGARA TIMUR
116	Kabupaten Banggai Laut	SULAWESI TENGAH
117	Mamuju Tengah	SULAWESI BARAT
118	Morowali Utara	SULAWESI TENGAH
119	Konawe Kepulauan	SULAWESI TENGGARA
120	Mahakam Ulu	KALIMANTAN TIMUR
121	Pesisir Barat	LAMPUNG
122	Musi Rawas Utara	SUMATERA SELATAN

**TABEL DAFTAR KAWASAN PERBATASAN
RENSTRA DITJEN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2015 - 2019**

NO	PULAU	KABUPATEN	KECAMATAN
1	SUMATERA	Sabang	Sukakarya
2	SUMATERA	Serdang Berdagai	Tanjung Beringin
3	SUMATERA	Rokan Hilir	Pasirlimau Kapuas, Sinaboi
4	SUMATERA	Bengkalis	Bukit Batu, Bantan, Rupa Utara, Rupa, Bengkalis
5	SUMATERA	Indragiri Hilir	Pulau Burung, Tanah Merang, Gaung Anak Serka, Kateman
6	SUMATERA	Kepulauan Meranti	Merbau, Rangsang, Pulau Merbau, Tasik Putri Uyu, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir
7	SUMATERA	Dumai	Dumai, Dumai Timur, Dumai Barat, Sungai Sembilan, Medang Kampa
8	SUMATERA	Pelalawan	Kuala Lumpur
9	SUMATERA	Natuna	Bunguran Timur, Serasan, Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Subi, Serasan Timur, Bunguran Utara
10	SUMATERA	Kep. Anambas	Jemaja, Jemaja Timur, Palmatak, Siantan
11	SUMATERA	Kota Batam	Belakang Padang, Batam Kota, Bulang Sekupang, Lubuk Raja, Nongsa, Batu Ampar, Batu Aji
12	SUMATERA	Bintan	Bintan Utara, Tambelan, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Gunung Kijang
13	SUMATERA	Karimun	Kundur, Meral, Moro, Unggar, Meral Barat, Tebing
14	NUSA TENGGARA	Kupang	Amfoang Timur
15	NUSA TENGGARA	Timor Tengah Utara	Insana Utara, Kefemenanu, Miaomaffo Barat, Bikomi Utara, Bikomi Tengah, Bikomi Selatan, Bikomi Nalulat, Mutis, Musi, Nalbenu
16	NUSA TENGGARA	Belu	Atambua, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Lasiolat, Tasifeto Timur, Raihat, Tasifeto Barat, Nanaet Dubesi
17	NUSA TENGGARA	Malaka	Malaka Barat, Kobalima Timur, Kobalima, Malaka Tengah, Wewiku
18	NUSA TENGGARA	Rote Ndao	Rote Barat Daya, Rote Ndao, Rote Baru,
19	NUSA TENGGARA	Alor	Teluk Mutiara, Alor Timur, Alor Selatan, Alor Barat Daya, Pureman, Mataru, Pantar, Pantar Tengah, Pantar Barat Laut, Pantar Barat
20	NUSA TENGGARA	Sabu Raijua	Raijua
21	SULAWESI	Kep. Sangihe	Tabukan Utara, Tahuna, Marore, Kendahe
22	SULAWESI	Kep. Talaud	Melonguane, Miangas, Nanusa
23	MALUKU	Keb. Morotai	Morotai Selatan, Morotai Jaya, Morotai Utara, Morotai Barat, Morotai Timur
24	MALUKU	Kab. Maluku Tenggara Barat	Tanimbar Selatan, Selaru, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Yaru
25	MALUKU	Kab. Maluku Barat Daya	Wetar, Pulau-pulau Terselatan, Pulau Leti, Moalakar
26	MALUKU	Keb. Kepulauan Aru	Aru Tengah Selatan, Aru Selatan, Aru Selatan Timur
27	KALIMANTAN	Kab. Sambas	Paloh, Sajingan Besar
28	KALIMANTAN	Kab. Bengkayang	Jagoi Babang, Siding
29	KALIMANTAN	Kab. Sanggau	Entikong, Sekayam
30	KALIMANTAN	Kab. Sintang	Ketungau Hulu, Ketungau Tengah
31	KALIMANTAN	Kab. Kapuas Hulu	Badau, Puring Kencana, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Selatan

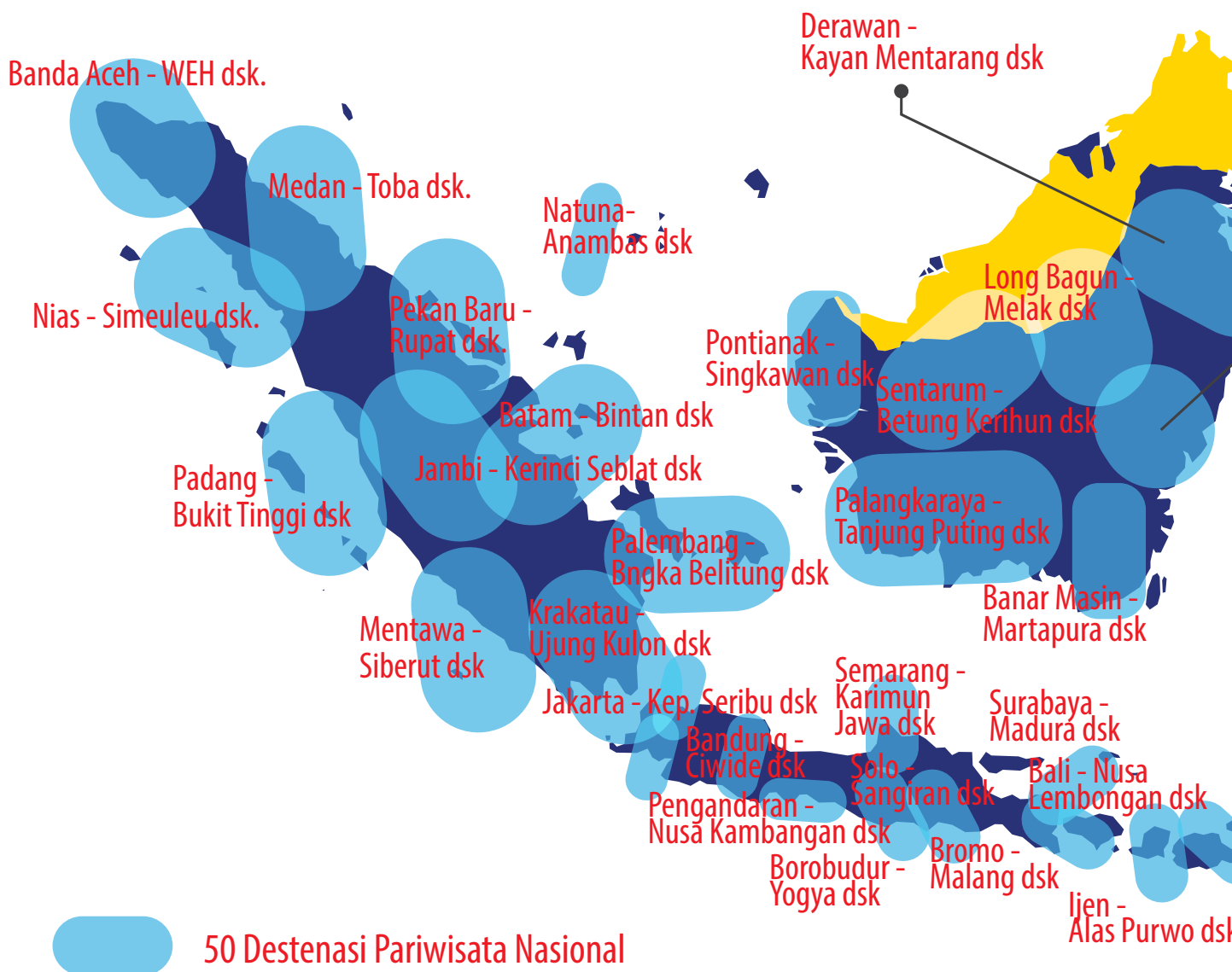
NO	PULAU	KABUPATEN	KECAMATAN
32	KALIMANTAN	Kab. Mahakam Ulu	Long Apari, Long Pahangai
33	KALIMANTAN	Kab. Malinau	Kayan Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Bahau Hulu, Kayan Selatan
34	KALIMANTAN	Kab. Nunukan	Sebatik Barat, Krayan Selatan, Krayan, Lumbis, Sebuku, Sebatik, Lumbis Ogong, Simanggaris, Tulin Onsoi, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Utara
35	PAPUA	Kab. Merauke	Eligobel, Muting, Sota, Uilin, Naukenjeri
36	PAPUA	Kab. Boven Digoel	Mindiptana, Tanah Merah, Jair, Waraopko
37	PAPUA	Kab. Pegunungan Bintang	Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, Oksomol, Tarub, Murkim, Kiwirok Timur, Mufinop
38	PAPUA	Kab. Keerom	Web, Senggi, Waris, Arso Timur, Towe
39	PAPUA	Kab. Jayapura	Muara Tami, Jayapura Utara
40	PAPUA	Kab. Supiori	Supiori Barat, Supiori Utara, Kep. Aruri
41	PAPUA	Kab. Raja Ampat	Kep. Ayau, Ayau

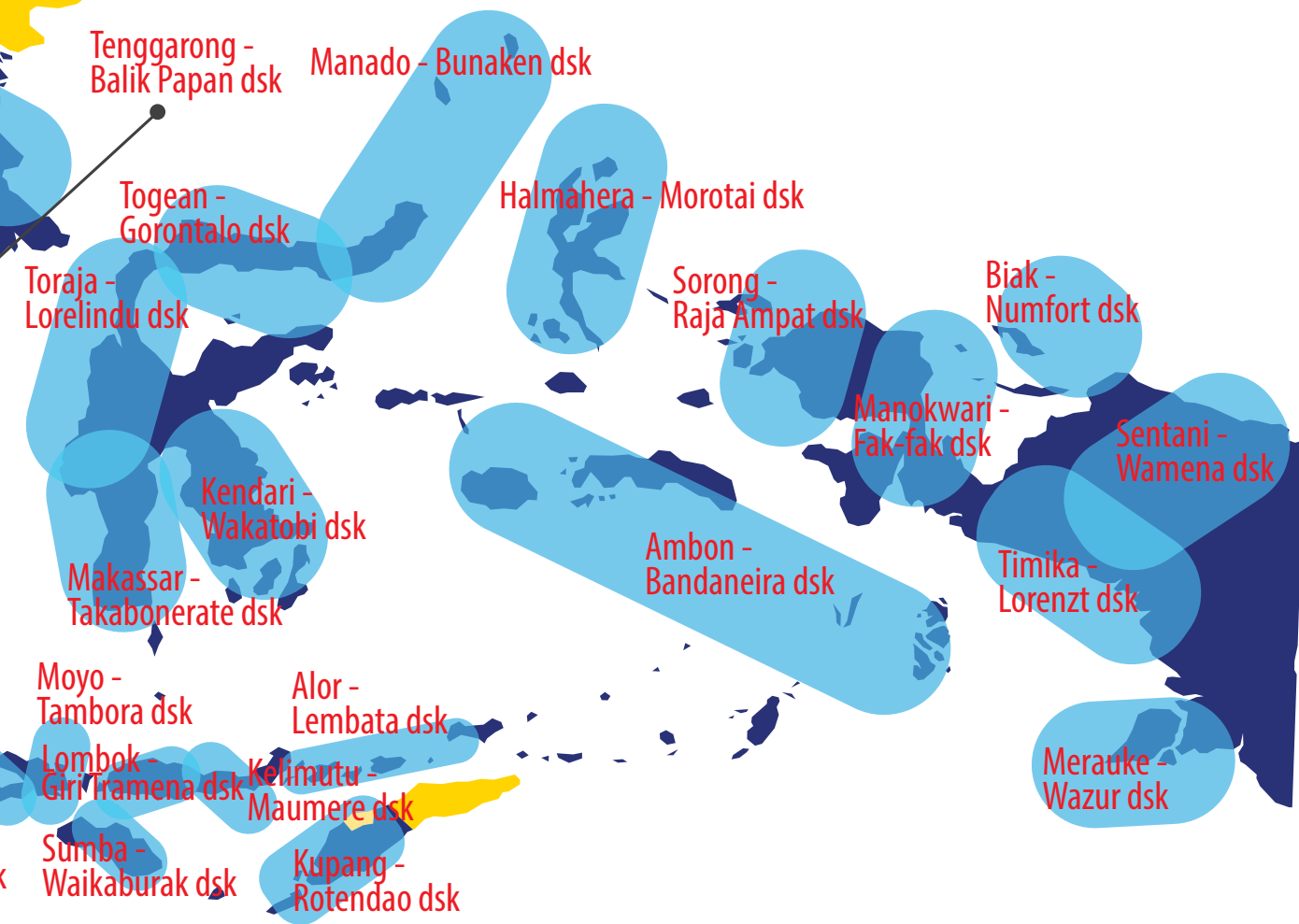
TABEL DESTINASI PARIWISATA NASIONAL

NO.	NAMA DAERAH
1	DPN BANDA ACEH-WEH dan sekitarnya
2	DPN NIAS-SIMEULUE dan sekitarnya
3	DPN MEDAN-TOBA dan sekitarnya
4	DPN MENTAWAI-SIBERUT dan sekitarnya
5	DPN PADANG-BUKIT TINGGI dan sekitarnya
6	DPN PEKAN BARU-RUPAT
7	DPN JAMBI-KERINCI SEBLAT dan sekitarnya
8	DPN BATAM-BINTAN dan sekitarnya
9	DPN NATUNA-ANAMBAS dan sekitarnya
10	DPN PALEMBANG-BABEL dan sekitarnya
11	DPN BENGKULU-ENGGANO dan sekitarnya
12	DPN KRAKATAU-UJUNG KULON dan sekitarnya
13	DPN JAKARTA-KEP SERIBU dan sekitarnya
14	DPN BOGOR-HALIMUN dan sekitarnya
15	DPN BANDUNG-CIWIDEY dan sekitarnya
16	DPN PANGANDARAN-NUSA KAMBANGAN dan sekitarnya
17	DPN SEMARANG-KARIMUN JAWA dan sekitarnya
18	DPN SOLO-SANGIRAN dan sekitarnya
19	DPN BOROBUDUR-YOGYAKARTA dan sekitarnya
20	DPN BROMO-MALANG dan sekitarnya
21	DPN SURABAYA-MADURA dan sekitarnya
22	DPN UJEN-ALASPURWO dan sekitarnya
23	DPN BALI-NUSA LEMBONGAN dan sekitarnya
24	DPN LOMBOK-GILI TRAMENA dan sekitarnya
25	DPN MOYO-TAMBORA dan sekitarnya
26	DPN KOMODO-RUTENG dan sekitarnya
27	DPN KELIMUTU-MEUMERE dan sekitarnya
28	DPN SUMBA-WAKABUBAK dan sekitarnya
29	DPN ALOR-LEMBATA dan sekitarnya
30	DPN KUPANG-ROTE NDAO dan sekitarnya
31	DPN PONTIANAK-SINGKAWANG dan sekitarnya

NO.	NAMA DAERAH
32	DPN SENTARUM-BETUNG KEHIRUN dan sekitarnya
33	DPN PALANGKARAYA-TANJUNG PUTING dan sekitarnya
34	DPN LONG BAGUN-MELAK dan sekitarnya
35	DPN TENGGARONG-BALIK PAPAN dan sekitarnya
36	DPN DERAWAN-KAYAN MENTARANG dan sekitarnya
37	DPN BANJARMASIN-MARTAPURA dan sekitarnya
38	DPN MAKASSAR-TAKABONERATE dan sekitarnya
39	DPN TORAJA-LORELINDU dan sekitarnya
40	DPN TOGEAN-GORONTALO dan sekitarnya
41	DPN MANADO-BUNAKEN dan sekitarnya
42	DPN KENDARI-WAKATOBİ dan sekitarnya
43	DPN HALMAHERA-MOROTAI dan sekitarnya
44	DPN AMBON-BANDANEIRA dan sekitarnya
45	DPN SORONG-RAJA AMPAT dan sekitarnya
46	DPN MANOKWARI-FAK-FAK dan sekitarnya
47	DPN BIAK-NUMFOR dan sekitarnya
48	DPN SENTANI-WAMENA dan sekitarnya
49	DPN TIMIKA-LORENZT dan sekitarnya
50	DPN MERAUKE-WAZUR dan sekitarnya

PETA SEBARAN DESTINASI PARIWISATA NASIONAL







DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

